

MOTTO HIDUP

**YOU'LL NEVER WALK ALONE !!!**



**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI**

**SOSIALISASI PEMIKIRAN DAN GERAKAN KHILAFAH OLEH  
HIZBUT TAHRIR INDONESIA DI KOTA MALANG**

**(Kasus: Sosialisasi Pemikiran Khilafah Kepada Mahasiswa di Kota Malang)**

**SKRIPSI**

Disusun oleh:

**Muhammad Fadzar Firdaus**

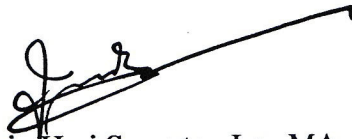
**NIM. 135120500111004**

Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** dalam Ujian Komprehensif

Pada Tanggal 5 Juli 2018

Tim Penguji,

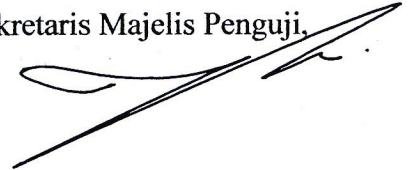
Ketua Majelis Penguji,



Amin Heri Susanto., Lc., MA., Ph. D

NIK. 201607 750909 1 001

Sekretaris Majelis Penguji,



Ibnu Asqori Pohan., S.Sos., MA

NIK. 201607 831118 1 001

Anggota Penguji I,



Ahmad Hasan Ubaid., S. IP., M. IP

NIK. 201607 820421 1 001

Anggota Penguji II,



H.B. Habibi Subandi., S. Sos., MA

NIK. 201304 840905 1 001

Malang, 5 Juli 2018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Unti Ludigdo., SE., M. Si., Ak

NIP. 196908121994021001

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

**Nama : Muhammad Fadzar Firdaus**

**NIM : 135120500111004**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“SOSIALISASI PEMIKIRAN DAN GERAKAN KHILAFAH OLEH HIZBUT TAHRIR INDONESIA DI KOTA MALANG” (Kasus: Sosialisasi Pemikiran dan Gerakan Khilafah kepada Mahasiswa di Kota Malang)**. Adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang sudah saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 5 Juli 2018  
Pembuat Pernyataan,



Muhammad Fadzar Firdaus

NIM. 135120500111004

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : **Sosialisasi Pemikiran dan Gerakan Khilafah oleh  
Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Malang**

Disusun oleh : Muhammad Fadzar Firdaus

NIM : 135120500111004

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Politik Pemerintahan dan Hubungan Internasional

Program Studi : Ilmu Politik

Konsentrasi : *Governance* dan Transisi Demokrasi

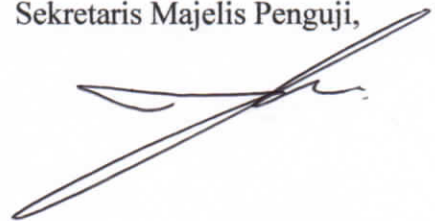
Malang, 5 Juli 2018

Ketua Majelis Penguji,



Amin Heri Susanto., Lc., MA., Ph. D  
NIK. 201607 750909 1 001

Sekretaris Majelis Penguji,



Ibnu Asqori Pohan., S.Sos., MA  
NIK. 201607 831118 1 001

## ABSTRACT

**Muhammad Fadzar Firdaus, Undergraduate Program, Political Science Department, Major of Political, Government and International Relations Science, Faculty of Sosial Sciences Universitas Brawijaya, Malang, 2018. Socialization of Khilafah Thought and Movement done by Hizbut Tahrir Indonesia in Malang City. Mentor Team: Amin Heri Susanto, Lc., MA., Ph.D dan Ibnu Asqori Pohan, S. Sos., MA.**

---

This research identified the socialization of khilafah thought and movement done by Hizbut Tahrir Indonesia in Malang city. It involved several parties as the object of the socialization that is the people of Malang city and the subject of the socialization that is the cadres of Malang city HTI. Type of this research is a qualitative descriptive research with data collecting method using primary data through interview also using secondary data that has been analyzed by data condensing. The data validity of this research used interactive data model.

*Khilafah* thought disseminated by HTI is one of many Islamic thoughts which exist in Indonesia. The way of socialization conducted by HTI is a form of Islamic thought socialization process that is done in Indonesia. This process involved general public, university student, and HTI cadres itself who they will later communicate one another so that they could be recruited and become the part of HTI.

The result of this research was that *khilafah* thought socialization strategy done by HTI was illustrated in several ways like *Dakwah Fardhiyyah*, weekly coaching, open discussion, weekly bulletin and mass show. This *Khilafah* thought socialization generated some important points which were sturdy character of the cadre, feel necessary to correct the government, feel necessary to return *khilafah*, dare to get closer to the society and feel necessary to redo the *Khilafah* thought socialization to the society. So all cadres recruited by HTI were having similarity in thought.

**Kata Kunci:** thought socialization, *Khilafah*, University student and Strategy.



## ABSTRAK

**Muhammad Fadzar Firdaus, Program Sarjana, Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan dan Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya, Malang, 2018. Sosialisasi Pemikiran *Khilafah* oleh HTI di Kota Malang. Tim Pembimbing: Amin Heri Susanto, Lc., MA., Ph.D dan Ibnu Asqori Pohan, S. Sos., MA.**

---

Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana strategi sosialisasi pemikiran khilafah yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Malang. Hal ini melibatkan beberapa pihak yang menjadi bagian dari objek sosialisasi pemikiran yakni masyarakat Kota Malang dan subjek dari sosialisasi yakni kader-kader HTI Kota Malang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan proses pengumpulan data menggunakan data primer yaitu wawancara serta data sekunder yang telah dianalisis menggunakan kondensasi data. Keabsahan data dari penelitian ini menggunakan model data interaktif.

Pemikiran *Khilafah* yang disebarkan oleh HTI merupakan salah satu dari banyak pemikiran-pemikiran Islam yang ada di Indonesia. Cara sosialisasi yang dilakukan oleh HTI merupakan bentuk dari proses sosialisasi pemikiran Islam yang dilakukan di Indonesia. Proses ini melibatkan masyarakat umum, mahasiswa dan kader dari HTI sendiri yang nantinya mereka akan melakukan komunikasi satu sama lain sehingga dapat terekrut dan menjadi bagian dari HTI.

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah strategi sosialisasi pemikiran *Khilafah* yang dilakukan HTI tergambar dalam beberapa cara seperti *Dakwah Fardhiyyah*, pembinaan pekanan, diskusi terbuka, buletin pekanan dan unjuk massa merupakan bagian dari strategi sosialisasi pemikiran *Khilafah* yang HTI usahakan. Sedangkan sosialisasi pemikiran *Khilafah* ini menghasilkan beberapa poin penting diantaranya kokohnya karakter kader, merasa penting untuk memperbaiki pemerintahan, merasa penting untuk mengembalikan *khilafah*, berani mendekatkan diri kepada masyarakat dan merasa penting untuk kembali melakukan sosialisasi pemikiran *khilafah* ini kepada masyarakat. Sehingga seluruh kader yang terekrut oleh HTI memiliki kesamaan secara pemikiran.

**Kata Kunci: Sosialisasi Pemikiran, *Khilafah*, Mahasiswa dan Strategi.**

## DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

<i>Ahlu al Halli wa al Aqli</i>	: Institusi khusus yang berfungsi sebagai badan legislatif yang diataati.
<i>Amar Ma'ruf Nahyi Munkar</i>	: Perintah mengajak kepada yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk
<i>At- Tahriir</i>	: Pembebasan
<i>Bai'at</i>	: Janji untuk ta'at
BEM	: Badan Eksekutif Mahasiswa
BKIM IPB	: Badan Kerohanian Islam Mahasiswa Insitut Pertanian Bogor
BKLDK	: Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus
<i>Dakwah Fardhiyyah</i>	: Seruan ke jalan Allah yang dilakukan oleh seorang Da'i
<i>Daulah</i>	: Negara
<i>Diin</i>	: Agama
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DPM	: Dewan Perwakilan Mahasiswa
FSLDK	: Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus
GMNI	: Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia
GP Malang	: Gema Pemebebasan Malang
<i>Hizb</i>	: Partai

HMI	: Himpunan Mahasiswa Islam
HT	: Hizbut Tahrir
HTI	: Hizbut Tahrir Indonesia
IMM	: Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
IPB	: Institut Pertanian Bogor
<i>Istilaamul Hukmi</i>	: Memperbaiki Pemerintahan
KAMMI	: Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
KH.	: Kiai Haji
<i>Khalifah</i>	: Perwakilan
<i>Khilafah</i>	: Salah satu sistem pemerintahan dalam Islam
<i>Khilafah Islamiyyah</i>	: Pemerintahan Islam
<i>Khulafaa' ar Rasyidin</i>	: Empat Sahabat Utama Rasulullah SAW.
KMNU	: Keluarga Mahasiswa Nadhatul Ulama
<i>Kufr</i>	: Diambil dari Kata Kafir yang artinya mengingkari Allah
LDK	: Lembaga Dakwah Kampus
LKM	: Lembaga Kedaulatan Mahasiswa
<i>Manhaj</i>	: Cara Beragama
<i>Muamalah</i>	: Perlakuan atau tindakan kepada orang lain
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
<i>Musyrif</i>	: Pembimbing
Nadhiyyin	: Masyarakat NU
NU	: Nadhatul Ulama

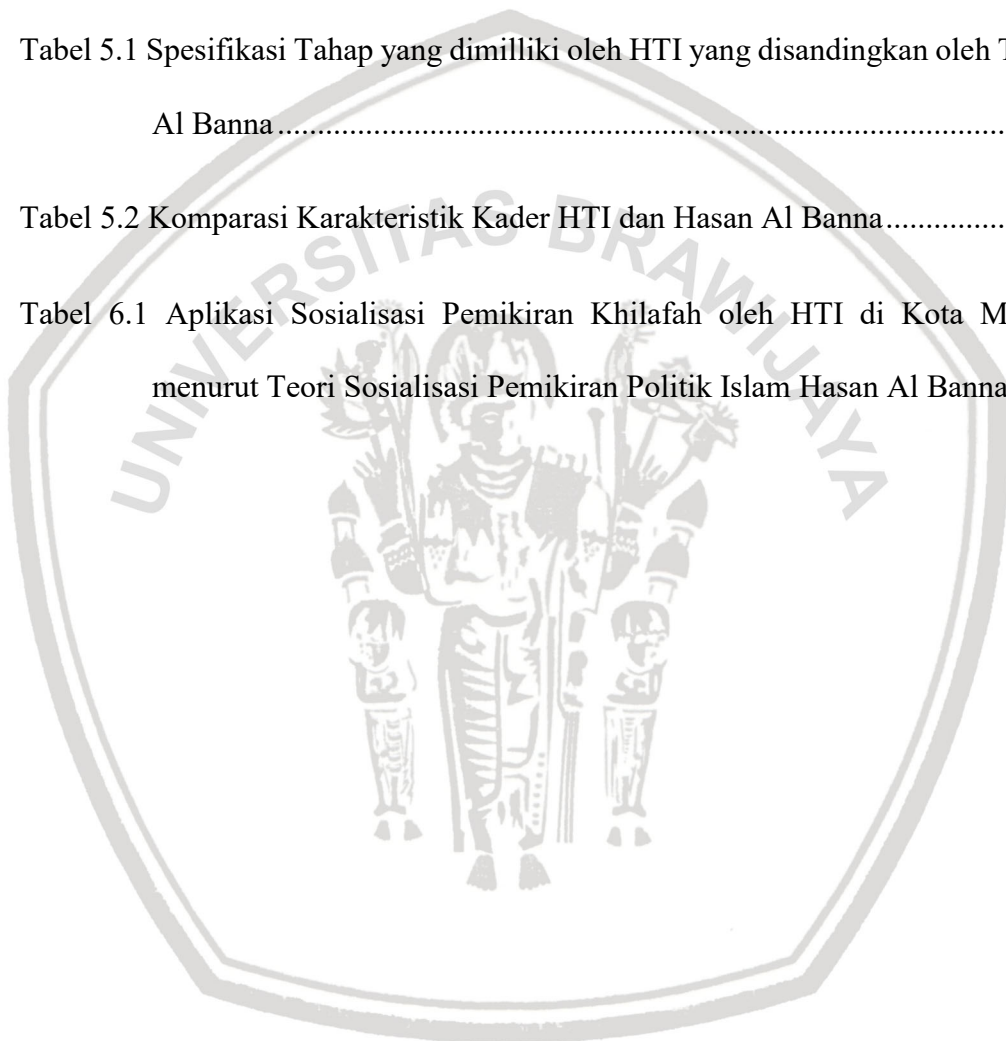


OMEK	: Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus
PBNU	: Pengurus Besar Nadhatul Ulama
PERPPU	: Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang
PMII	: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
PTN	: Perguruan Tinggi Negeri
PTS	: Perguruan Tinggi Swasta
<i>Salaf</i>	: Generasi Nabi dan Para Sahabat
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIMNAS	: Simposium Nasional
<i>Syariah</i>	: Hukum yang berlandaskan Islam
<i>Syumul</i>	: Menyeluruh
<i>Ta'aruf</i>	: Proses Pengenalan
<i>Tafahum</i>	: Proses Pemahaman
<i>Tafa'ul</i>	: Tahap Berinteraksi
<i>Takaful</i>	: Rasa senasib dan sepenanggungan
<i>Tatsqif</i>	: Pembinaan
<i>Ukhuwwah Islamiyyah</i>	: Persaudaraan atas dasar Islam



## Daftar Tabel

Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	43
Tabel 4.1 Karakteristik Gerakan Dakwah Hizbut Tahrir .....	67
Tabel 5.1 Spesifikasi Tahap yang dimiliki oleh HTI yang disandingkan oleh Tahap Al Banna .....	102
Tabel 5.2 Komparasi Karakteristik Kader HTI dan Hasan Al Banna.....	109
Tabel 6.1 Aplikasi Sosialisasi Pemikiran Khilafah oleh HTI di Kota Malang menurut Teori Sosialisasi Pemikiran Politik Islam Hasan Al Banna .	109



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘aaliimiin. Sebuah kata yang sepantasnya terucap sebagai bentuk puji syukur kepada Allah SWT yang telah membimbing hambaNya yang lemah ini agar mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“SOSIALISASI PEMIKIRAN DAN GERAKAN KHILAFAH OLEH HIZBUT TAHRIR INDONESIA DI KOTA MALANG” (Kasus: Sosialisasi Pemikiran dan Gerakan Khilafah kepada Mahasiswa di Kota Malang).**

Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang disusun oleh penulis dengan tujuan menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Dengan selesainya proses penulisan skripsi ini, penulis berharap segala ilmu yang berhasil didapatkan selama menuntut ilmu di Ilmu Politik Universitas Brawijaya ini merupakan ilmu yang berkah sehingga dapat bermanfaat minimal untuk pribadi penulis sehingga penulis mampu berkiprah lebih luas dimasyarakat sehingga mampu menjadi pribadi yang bermanfaat bagi almamater, bangsa dan Agama.

Berkat dukungan dan bimbingan beberapa pihak dalam penyelesaian studi, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT.
2. Ayahanda Oong Moch Dahlan dan Umi Yeyet Slametiningih tercinta, serta kedua adik tersayang Salsabilla Rahmaningsih dan Zahra Zaqiyahningsih yang selalu menjadi alasan terkuat untuk segera menyelesaikan pendidikan S1 ini dengan cara yang sebaik-baiknya.

3. Prof. Dr. Unti Ludigdo selaku dekan FISIP periode 2016, atas kesediaannya penulis menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Serta Dr. Sholih Muadi SH., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya.
4. Bapak Amin Heri Susanto, Lc., MA., Ph.D dan Bapak Ibnu Asqori Pohan., S. Sos., MA selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan arahan penelitian skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Hasan Ubaid., S.IP., M. IP dan Bapak H.B. Habibi Subandi., S. Sos., MA selaku dosen penguji yang memberikan kritikan yang konstruktif sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Para tenaga pengajar (dosen) program studi Ilmu Politik serta jajaran yang senantiasa memberikan ilmu dan pengetahuannya selama masa tempuh studi penulis.
7. Tim “Metode Penelitian” yang akhirnya bisa menjadi salah satu bagian terpenting dalam selesainya penulisan skripsi ini
8. Tim “Label Merah” yang setiap harinya selalu menanyakan “siapa yang lagi diperpus?”
9. Bro dan sist fillah “AllahuGhooyaatunaa” gengs dan “14150117-5670118” yang tiada henti-hentinya mengajarkan dinamika kehidupan gerakan di Kampus, sehingga kita mampu untuk berusaha maksimal agar menutup amanah dengan predikat Husnul Khotimah.
10. “Pondok 32” yang selalu mengingatkan tentang pentingnya Tsiqoh, Amal Yaumy, dan ukhuwwah.
11. Rumah Terbaik, “KAMMI FISIP” dan “ISSC FISIP UB” yang sudah mau memberikan wadah terbaik untuk berdinamika. Belajar menjadi seorang



muslim yang *syumul*. Rumah ini akan selalu menjadi rumah terbaik. Insya Allah.

12. Keluarga besar “Alumni HK16” dimanapun kalian berada, yang telah mengajarkan bagaimana ukhuwwah bisa terbentuk. Bagaimana cara survive untuk hidup.
13. Keluarga besar “KAMMI Brawijaya” yang menjadi bagian penting dalam berproses di kampus.
14. Keluarga besar “Ilmu Politik 2013” yang sudah mengisi dan mewarnai masa perkuliahan.
15. Keluarga besar “Alief” yang memberikan tempat tinggal gratis nan nyaman diakhir masa perkuliahan. 😊

Semoga segala hal yang kalian berikan adalah suatu bentuk motivasi diri bagi penulis, yang mampu menjadikan pengalaman penulis untuk menjadi lebih baik lagi dalam mengamati dan menganalisa suatu fenomena politik. Penulis berharap, laporan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, civitas akademik FISIP Universitas Brawijaya, khususnya Program Studi Ilmu Politik, untuk lebih kritis dalam mengamati fenomena politik secara langsung di Indonesia. Penulis meyakini bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Malang, 19 Juli 2018

Penulis,

Muhammad Fadzar Firdaus., S. IP



## Ucapan Terima Kasih

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

*"Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." (HR. Muslim, no. 2699)*

Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah atas izin Allah SWT saya mampu menyelesaikan studi selama 5 tahun di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya. Semoga dengan selesainya masa studi yang dilalui ini mampu menjadikan diri saya termasuk orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT.

Dengan selesainya Skripsi ini, maka skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Oong Moch Dahlan dan Umi Yeyet Slametiningsih tercinta, serta kedua adik tersayang Salsabilla Rahmaningsih dan Zahra Zaqiyahningsih yang selalu menjadi menjadi alasan terkuat untuk segera menyelesaikan pendidikan S1 ini dengan cara yang sebaik-baiknya.
2. Seluruh dosen Prodi Ilmu Politik Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmunya hingga mampu mencerdaskan mahasiswanya.
3. Tim "Metode Penelitian" Adul, Uzman, Sarah, Salma, Shofura, Poma, Anis, Ina dan Zahro yang akhirnya bisa menjadi salah satu bagian terpenting dalam selesainya penulisan skripsi ini
4. Serta Tim Sayapnya "Big Family Bani Fadzar" Lintas Generasi Bang Eja, Mba Nurul, Mas Dennis, Mba Roro, Bang Adit, Mba Livi, Mba Ayu, Mas Wimbo,

- Mas Kukuh, Bang Ijals, Bang Arham, Mas Malik, Fafa, Echan, Dije, Adzka, Reza, Zidny, Jali, Abhi, Nofri, Faiz, Dhillah, Jihan, Alifah, Iqoh, Ayu yang telah menjadi bagian terpenting dalam proses kehidupan di Kampus tercintaah
5. Tim “Label Merah” Adul, Shofy, Arif, Bang Izzi, Beni, Eman, Hakim, Fathan, Habib, Hani, Hasna, Ina, Nuhi, Aniy, Rando, Danu, Jalal, Shofur, Udin yang setiap harinya selalu menanyakan “siapa yang lagi diperpus?”
  6. Bro dan sist fillah “AllahuGhooyaatunaa” gengs Adul, Masykur, Arif, Fitrah, Sarah, Eliza, Mayla, Della, Icha, Aniy dan “14150117-5670118” yang tiada henti-hentinya mengajarkan dinamika kehidupan gerakan di Kampus, sehingga kita mampu untuk berusaha maksimal agar menutup amanah dengan predikat Husnul Khotimah.
  7. “Pondok 32” yang selalu mengingatkan tentang pentingnya Tsiqoh, Amal Yaummy, dan ukhuwwah.
  8. Rumah Terbaik, “KAMMI FISIP” dan “ISSC FISIP UB” yang sudah mau memberikan wadah terbaik untuk berdinamika. Belajar menjadi seorang muslim yang *syumul*. Rumah ini akan selalu menjadi rumah terbaik. Insya Allah.
  9. Keluarga besar “Alumni HK16” dimanapun kalian berada, yang telah mengajarkan bagaimana ukhuwwah bisa terbentuk. Bagaimana cara survive untuk hidup.
  10. Keluarga besar “KAMMI Brawijaya” yang menjadi bagian penting dalam berproses di kampus.
  11. Keluarga besar “Alief” yang memberikan tempat tinggal gratis nan nyaman diakhir masa perkuliahan. ☺

## Daftar Bagan

Bagan 2.1 Kerangka Penelitian .....	39
Bagan 3.1 Alur Teknis Pengolahan Data Model Mils dan Huberman.....	50
Bagan 5.1 Kronologi Sosialisasi Pemikiran <i>Khilafah</i> oleh HTI di Kota Malang .	74
Bagan 5.2 Dampak, Bentuk dan Hasil dari Sosialisasi Pemikiran <i>Khilafah</i> .....	75





## Daftar Gambar

Gambar 4.1 Peta Kota Malang .....	64
Gambar 5.1 Diskusi Terbuka “ <i>Menolak Lupa 94 Tahun Dunia Tanpa Khilafah</i> ” Oleh Gema Pembebasan Kota Malang (3/3).....	31
Gambar 5.2 Buletin Al Islam .....	76
Gambar 5.3 Buletin Al Islam Hoax .....	77
Gambar 5.4 Buletin Kaffah.....	78
Gambar 5.5 Info Grafis Penjelasan Penggunaan Ruang Publik yang Digunakan oleh HTI untuk Mempromogandakan <i>Khilafah</i> .....	80

## Daftar Isi

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI ..	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN .....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO HIDUP .....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK .....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT .....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR .....	Error! Bookmark not defined.
Ucapan Terima Kasih.....	Error! Bookmark not defined.
Daftar Isi .....	xii
Daftar Gambar.....	Error! Bookmark not defined.
Daftar Tabel .....	Error! Bookmark not defined.
Daftar Bagan .....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian .....	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Dasar Teoritis.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.(a). Sosialisasi Politik .....	Error! Bookmark not defined.
2.1.(b). Sosialisasi Politik Islam .....	Error! Bookmark not defined.
2.2 Tinjauan Konseptual.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.(a) Politik Islam .....	Error! Bookmark not defined.
2.2.(b). Konsep <i>Khilafah</i> .....	Error! Bookmark not defined.
2.3 Penelitian Terdahulu .....	Error! Bookmark not defined.
2.4 Kerangka Pemikiran .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
3.1 Jenis Penelitian .....	Error! Bookmark not defined.

3.2	Lokasi dan Objek Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.3	Fokus Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.4	Teknik Penentuan Informan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.5.(a).	Studi Kepustakaan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.5.(b).	Wawancara.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.5.(c).	Observasi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.5.(d).	Studi Dokumentasi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.6	Teknik Analisis Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.7	Validitas Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV: PROFIL HIZBUT TAHRIR INDONESIA</b>		<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1	Sekilas Tentang Hizbut Tahrir.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1.(a)	Sejarah Berdirinya Hizbut Tahrir.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1.(b)	Sejarah Masuknya Hizbut Tahrir Indonesia ke Indonesia .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Bookmark not defined.</b>		
4.1. (c)	Karakteristik Dakwah Hizbut Tahrir	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2	Sekilas Tentang Sayap Gerakan Mahasiswa Hizbut Tahrir Indonesia: Gerakan Mahasiswa Pembebasan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3	Sekilas Tentang Kota Malang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V: ANALISIS SOSIALISASI PEMIKIRAN <i>KHILAFAH</i> OLEH HIZBUT TAHRIR DI KOTA MALANG</b>		<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1	Kronologi Sosialisasi Pemikiran <i>Khilafah</i> oleh HTI di Kota Malang..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.2	Strategi Sosialisasi Pemikiran <i>Khilafah</i> oleh HTI di Kota Malang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.2.(a)	Dakwah <i>Fardhiyyah</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.2.(b)	Pembinaan Pekanan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.2.(c)	Diskusi Terbuka .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.2.(d)	Buletin Pekanan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.2.(e)	Unjuk Massa.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.3	Analisa Hasil Sosialisasi Pemikiran <i>Khilafah</i> oleh HTI di Kota Malang	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

5.3.(a) Karakter Kader Sebagai Penopang Utama Pemikiran *Khilafah* **Error! Bookmark not defined.**

5.3.(b) Merasa Penting untuk Memperbaiki Pemerintahan ..... **Error! Bookmark not defined.**

5.3.(c) Merasa Penting untuk Mengembalikan *Khilafah*... **Error! Bookmark not defined.**

5.3.(d) Harus Berani Mendekatkan Diri Kepada Masyarakat ..... **Error! Bookmark not defined.**

5.3.(e) Merasa Penting untuk Melakukan Sosialisasi Kembali tentang Pemikiran *Khilafah* kepada Masyarakat ..... **Error! Bookmark not defined.**

5.4 Pandangan Kritis Peneliti ..... **Error! Bookmark not defined.**

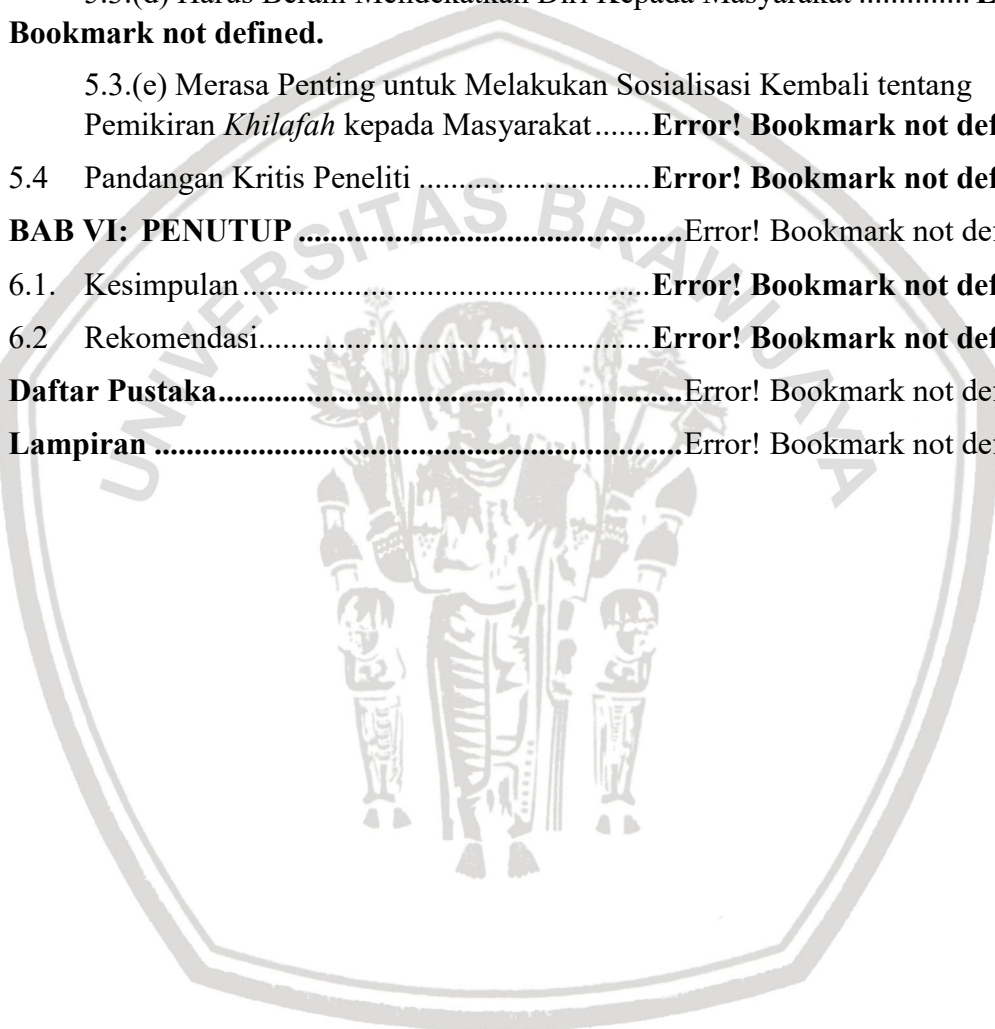
**BAB VI: PENUTUP** ..... **Error! Bookmark not defined.**

6.1. Kesimpulan ..... **Error! Bookmark not defined.**

6.2 Rekomendasi ..... **Error! Bookmark not defined.**

**Daftar Pustaka** ..... **Error! Bookmark not defined.**

**Lampiran** ..... **Error! Bookmark not defined.**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, pendekatan politik Islam muncul jauh lebih dalam. Narasi *Khilafah Islamiyyah* muncul kembali kepermukaan setelah adanya sejumlah kelompok muslim menyuarkan secara nyaring pentingnya penyelenggaraan negara atas dasar syariah. Hal ini dipicu oleh mereka yang merasakan bahwa menyampaikan narasi politik Islam melalui partai politik Islam menemukan kegagalan melawan arus demokrasi dan mengelola negara. Di Indonesia, hal ini memicu munculnya slogan-slogan yang mengarah dan menuntun ditegakkannya pemerintahan atas dasar *Khilafah*.

*Khilafah Islamiyyah* merupakan salah satu dari bentuk sistem pengelolaan negara yang berlandaskan Islam. Secara literal menurut Ganai,<sup>1</sup> *Khilafah* berarti pergantian terhadap pendahulu yang bersifat baik secara individu maupun kelompok. Sedangkan secara teknis, *Khilafah* adalah lembaga pemerintahan Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah. *Khilafah* merupakan medium untuk menegakkan *din* (agama) dan memajukan *syariah*<sup>2</sup>.

Dimensi gerakan ini cukup luas dan kompleks, tetapi secara ideologis kelompok ini secara keseluruhan menganut paham “salafisme radikal”, yakni berorientasi pada penciptaan kembali masyarakat *salaf* (generasi Nabi Muhammad

---

<sup>1</sup> Ghulam Nabi Ganai (2001). “Muslim Thinkers and Their Concept of *Khilafah* dalam *Hamdard Islamicus: Quartely Journal of Studies and Reseach in Islam*, Vol. XXIV, No 1 Hal. 59

<sup>2</sup> *Ibid.*



dan para Sahabatnya) dengan cara yang tegas dan lugas. Bagi mereka, Islam pada masa kaum *salaf* inilah yang merupakan Islam yang sempurna, murni, dan bersih dari tambahan-tambahan yang tidak berdasar dari Qur'an, Sunnah dan Ijma' Ulama (Bid'ah) yang dipandang dapat menggerus kemurnian Islam itu sendiri.

Fenomena ini muncul sebagai anti-tesis dari gerakan Islam yang sudah lama bersemai di Indonesia. Meskipun Muhammadiyah dan Nadhatul Ulama<sup>3</sup> merupakan gerakan Islam yang berpengaruh atas perpolitikan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pengaruh yang diberikan oleh K.H. Hasyim Asyari dengan resolusi jihadnya serta K.H. Ahmad Dahlan dengan pendekatan pendidikan yang bernafaskan Islam. Hal ini akhirnya dapat memicu kemerdekaan Indonesia. Sehingga perjuangan ummat Islam dengan kemerdekaan Indonesia tidak bisa dipisahkan begitu saja.

Seiring berjalannya waktu, gerakan Islam modern lambat laun semakin menjamur di Indonesia. Masuknya gerakan Islam transnasional pun menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Sebagai negara demokrasi, akhirnya Indonesia membuka keran pemikiran-pemikiran baru di Indonesia yang berasal dari berbagai mancanegara. Begitupun dengan pemikiran Islam modern. Maka muncullah pemikiran politik Islam yang mempunyai gagasan *Khilafah Islamiyyah*.

*Khilafah Islamiyyah* ini merupakan gagasan dari salah satu gerakan Islam baru di Indonesia. Gagasan ini dicanangkan oleh Hizbut Tahrir yang merupakan salah satu gerakan transnasional yang akhirnya dapat masuk ke Indonesia sejak

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

tahun 1980an di Bogor<sup>4</sup>. Menggunakan nama Hizbut Tahrir Indonesia, HTI menjadi salah satu gerakan yang *massive* dan berkembang di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan munculnya kantor-kantor cabang HTI yang tersebar di Indonesia secara luas.

Gerakan yang didirikan oleh Syaikh Taqiyyuddin An-Nabhani<sup>5</sup> ini bertujuan untuk memulai kehidupan yang islami yakni dengan mendirikan negara Islam di negara-negara Arab terlebih dahulu. Kemudian, negara-negara ini mulai menerapkan hukum dan perundang-undangan Islam dalam masyarakat Arab sebagai *starting point* menuju negeri-negeri Islam lain untuk memulai kehidupan Islam disana setelah HT menguasai negeri-negeri tersebut.

Pada prinsipnya, Hizbut Tahrir menganggap bahwa banyak negara-negara yang berdasar Islam atau yang mayoritas penduduknya adalah ummat muslim tetapi justru berpihak pada sistem *kufr* dan bersekongkol dengan negara sekuler. Dengan rasa kecewa dengan negara-negara tersebut, Hizbut Tahrir melakukan serangkaian aktifitas-aktifitas terbuka maupun rahasia untuk mendirikan negara *Khilafah*. Salah satu contoh kecilnya adalah melakukan pertemuan-pertemuan kecil antar anggota Hizbut Tahrir dengan beberapa masyarakat umum dan melakukan diskusi sekaligus *brainstroming* terhadap pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir seperti penerapan *Khilafah* di negara tertentu.

---

<sup>4</sup> Lubis, E.S.D.D dan Ma'arif Jamuin (2015), *Jurnal. Infiltrasi Pemikiran dan Gerakan HTI di Indonesia*. SUHUF Vol.27 No. 2. [journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/download/1431/983](http://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/download/1431/983), di akses pada 14 Mei 2017 pukul 10.00 WIB

<sup>5</sup> Hussain (2012), *Menuju Jama'atul Muslimin*, Jakarta: Robbani Press. Hlm 297

Kota Malang merupakan salah satu kota yang menjadi ladang sosialisasi pemikiran *Khilafah* ini secara *massive*. Hal ini berdasar dari yang ditemui oleh peneliti dalam beberapa kesempatan mengobservasi kampus-kampus di Kota Malang. Sebut saja Lembaga Dakwah Fakultas Ilmu Komputer dan Lembaga Dakwah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya menjadi ladang sosialisasi yang *massive* pemikiran ini. Hal ini juga terjadi di Universitas Negeri Malang, Lembaga Dakwah Kampusnya dikuasai oleh HTI. Hal tersebut amat memudahkan kader-kader HTI untuk mensosialisasikan pemikirannya kepada khalayak. Belum lagi aksi dari Gema Pembebasan Malang yang beberapa kali digelar. Terkini Gema Pembebasan melakukan Aksi Bela Palestina di Jl. Veteran Kota Malang<sup>6</sup>. Hal ini membuktikan bahwa Kota Malang juga merupakan salah satu lahan dakwah yang luar biasa yang dapat dimanfaatkan oleh HTI.

Dalam perjalanannya, HTI mendapatkan ujian yang amat berliku sejak munculnya video yang mengatasmakan HTI. Menurut beritasatu.com, HTI menghebohkan diri dengan adanya *bai'at Khilafah* di Kampus IPB. Menurut klarifikasi dari pihak IPB, hal itu terjadi karena agenda tersebut bagian dari kegiatan Simposium Nasional (Simnas) Lembaga Dakwah Kampus 2017 oleh Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus Nasional (BKLDK) Nasional yang kebetulan Badan Kerohanian Islam Mahasiswa Insitut Pertanian Bogor (BKIM IPB) yang didaulat sebagai tuan rumah. Agenda yang menghadirkan kurang lebih

---

<sup>6</sup> Radar Cakrawala. "*Aksi Bela Palestina Gema Pembebasan Malang*". <http://www.radarcakrawala.com/2017/12/aksi-bela-palestina-gema.html> di akses pada 10 Januari 2018

1.500 peserta dari 242 Perguruan Tinggi di Indonesia ini menjadi sorotan khalayak dan menjadi polemik yang berkepanjangan.

Polemik tersebut berujung kepada kewaspadaan pemerintah terhadap gerak-gerik yang dilakukan oleh HTI. Pemerintah merasa bahwa gerakan yang dibawa oleh HTI berpotensi untuk memecah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berdasarakan dari pemikiran *Khilafah* yang disosialisasikan secara *massive* oleh HTI sejak kedatangannya di Indonesia yang menegaskan bahwa *Khilafah Islamiyyah* merupakan satu-satunya solusi untuk mengurus carut marutnya negeri ini. Hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan PERPPU No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang akhirnya membatasi gerak HTI secara terstruktur hingga mengakibatkan pembubaran HTI oleh Kementerian Dalam Negeri pada 19 Juli 2017<sup>7</sup>. Maka melihat dari paparan diatas, peneliti mencoba untuk mengkaji terkait “*Sosialisasi Pemikiran Khilafah oleh Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Malang*”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan inti dari masalah yang hendak untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dimana, Hizbut Tahrir sampai saat ini masih terus melakukan sosialisasi pemikiran *Khilafah*nya secara *massive*. Maka penelitian ini memiliki rumusan masalah antara lain:

*Bagaimana bentuk sosialisasi pemikiran dan gerakan Khilafah yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Malang?*

---

<sup>7</sup> Ambaranie Nadia Kemala Movanita. “HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah”. <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah> di akses pada 1 Januari 2018 pukul 21.00 WIB

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan posisi sosialisasi pemikiran *khilafah* oleh Hizbut Tahrir dalam teori Sosialisasi Politik Islam (*Maratibul 'Amal*) yang dikemukakan oleh Hasan Al-Banna
2. Mendeskripsikan strategi sosialisasi pemikiran *Khilafah* oleh HTI kota Malang.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Setiap proses penyusunan penelitian yang ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya diharapkan dapat membawa manfaat bagi pihak-pihak terkait. Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Memberikan wawasan kepada pembaca tentang pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia dan mengetahui bagaimana cara Hizbut Tahrir Indonesia dalam mensosialisasikan pemikiran *Khilafah* yang Hizbut Tahrir Indonesia perjuangkan
2. Memberikan rekomendasi kepada Hizbut Tahrir Indonesia dalam melakukan proses sosialisasi pemikiran *Khilafah* yang Hizbut Tahrir Indonesia perjuangkan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Dasar Teoritis

Dalam penyelesaian suatu penelitian diperlukannya teori yang berfungsi sebagai pisau analisis dan memperkuat argumentasi pembahasan dengan teori yang sudah ada sebelumnya, teori yang sudah ada tersebut kemudian dikaitkan dengan fenomena yang hendak di angkat dalam penelitian tersebut, sehingga timbulnya kesinambungan antara teori dengan pembahasan penelitian tersebut, teori-teori yang digunakan hendaknya berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas mengenai “Sosialisasi Pemikiran *Khilafah* Oleh Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Malang”

##### 2.1.(a). Sosialisasi Politik

Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. David Easton dan Jack Dennis<sup>1</sup> mengambil dari perspektif proses. Mereka menyebutkan bahwa sosialisasi politik merupakan proses pengembangan lewat mana seseorang memperoleh orientasi politik.

Kennet P. Langton mengartikan secara luas, bahwa sosialisasi politik merupakan cara bagaimana masyarakat mentransmisikan budaya politik dari satu

---

<sup>1</sup> <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131474282/pendidikan/HAND-OUT+KULIAH+ILMU+POLITIK-SOSIALISASI+POLITIK+DAN+BUDAYA+POLITIK.pdf> di akses pada 15 Januari 2018 pukul 10.00 WIB

generasi ke generasi yang lain<sup>2</sup>. Sedangkan, Dawson dan Prewitt's melihat bahwa sosialisasi politik sebagai proses dan hasil. Ia mengemukakan sosialisasi politik sebagai proses pengembangan bagaimana seorang warga negara matang secara politik.<sup>3</sup>

Sedangkan Almond dan Verba menyebutkan bahwa orientasi politik dan pola tingkah laku individu diperoleh dari sosialisasi politik. Ditambahkan lagi bahwa orientasi politik menurutnya mencakup hal-hal berikut

1. Orientasi Kognitif: pengetahuan tentang kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan output
2. Orientasi Afektif: perasaan terhadap sistem politik, peranannya para aktor dan penampilannya
3. Orientasi Evaluatif: keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai-nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Tiga poin tersebut apabila dilihat dari sudut pandang individu, orientasi afektif yang dimaksud adalah berkaitan dengan aspek perasaan seorang individu dengan kapasitasnya sebagai warga negara. Hal tersebut ditekankan pada perasaan khusus yang dimiliki oleh individu mengenai aspek-aspek sistem politik tertentu yang dapat membuat individu-individu tersebut menerima atau menolak sebuah sistem politik. Sedangkan orientasi kognitif yaitu mengenai tingkat pengetahuan

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

individu tentang segala sistem politik meliputi tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan, yang diambil oleh pemerintah atau mengenai simbol-simbol dalam sistem politik secara keseluruhan.

Sementara itu orientasi evaluatif yang dimaksud adalah orientasi politik individu yang ditentukan oleh orientasi moral. Norma-norma yang dianut seorang warga negara menjadi dasar sikap dan perilaku yang ditunjukkan olehnya terhadap sebuah sistem politik. Pengertian warga negara terhadap sistem politik itu merupakan suatu kemampuan untuk mengukur kesadaran tentang politik, bagian-bagian, simbol-simbol, dan sekaligus norma-norma yang dimiliki masyarakat. Ketiga orientasi tersebut sangat berpengaruh pada individu dalam menyikapi sebuah sistem politik, dan ketiganya sangat berhubungan seperti yang dicontohkan oleh Syamsyudin<sup>4</sup> tentang saling berhubungannya ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut:

Untuk dapat memberikan suatu penilaian tentang seorang pemimpin, seorang warga negara dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang pemimpin tersebut secara memadai. Namun demikian, tentulah bahwa pengetahuan tersebut telah dipengaruhi oleh berbagai aspek dan yang paling dominan adalah perasaannya sendiri. Demikian pula sebaliknya bahwa pengetahuan seseorang tentu juga dipengaruhi oleh pengetahuan simbol politik yang sedang berlangsung. Bahkan dikatakan bahwa pengetahuan tentang simbol saling mempengaruhi perasaan seseorang terhadap sistem politik secara keseluruhan.

Selain itu, agar dapat diperoleh pula yang tepat dan petunjuk yang relevan mengenai orientasi seseorang terhadap kehidupan politik, terlebih dahulu harus dikumpulkan sebagai informasi, yang meliputi pengetahuan keterlibatan, dan

---

<sup>4</sup> Sastroadmodjo Sudijono (1995): *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Pres. Hal:39

penilaian seseorang terhadap salah satu objek pokok dari orientasi politik. Kantraprawira<sup>5</sup> yang mengemukakan bahwa objek orientasi politik meliputi keterlibatan seseorang terhadap:

- a. Sistem politik secara keseluruhan, meliputi antara lain intensitas pengetahuan, ungkapan perasaan, yang ditandai oleh apresiasi terhadap sejarah, ukuran lingkup lokasi, persoalan kekuasaan, karakteristik konsitusional negara atau sistem politiknya.
- b. Proses input. Meliputi antara lain intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses penyaluran serta tuntutan yang diajukan atau di organisasi oleh masyarakat, termasuk perasaan untuk menerjemahkan atau mengkonversi tuntutan tersebut sehingga menjadi kebijaksanaan yang otoritatif sifatnya. Dengan demikian proses input antara lain meliputi pula pengamatan atas partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan alat komunikasi massa yang nyata-nyatanya berpengaruh dalam kehidupan politik sebagai sarana penampung berbagai tuntutan.
- c. Proses output. Meliputi antara lain intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses aktivitas berbagai cabang pemerintahan yang berkenaan dengan penerapan dan pemaksaan keputusan-keputusan otoritatif. Singkatnya berkenaan dengan fungsi pembuatan aturan perundang-undangan oleh badan legislatif, fungsi pelaksanaan aturan oleh eksekutif dan fungsi peradilan

---

<sup>5</sup> Kantraprawira, Rusadi (1988): *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru. Hal. 31

d. Diri sendiri. Meliputi antara lain intensitas pengetahuan dan frekuensi perbuatan seseorang dalam mengambil peranan di arena sistem politik. Dipersoalkan apakah yang menjadi hak, kekuasaan, dan kewajibannya. Apakah yang bersangkutan dapat memasuki lingkungan orang atau kelompok yang mempunyai pengaruh atau bahkan bagaimana caranya untuk meningkatkan pengaruhnya sendiri. Kemudian lebih lanjut dipersoalkan kriteria apa saja yang dipakainya dalam membentuk pendapat dalam masyarakatnya atau dalam sistem politik sebagai keseluruhan.

Dari berbagai jenis orientasi politik yang didapat melalui proses sosialisasi politik, diharapkan masyarakat dapat memiliki pandangan, daya pikir, serta daya tangkap tentang kehidupan politik yang sedang berlangsung juga memiliki acuan dan keyakinan yang jelas dalam politik agar dapat diteruskan ke generasi berikutnya.

Selain orientasi politik yang sudah dikemukakan sebelumnya, Almond dan Verba menekankan bahwa sosialisasi politik menunjukkan pada proses sikap dan tingkah laku politik individu diperoleh dan dibentuk sehingga sarana bagi suatu generasi untuk mencapai patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya. Nilai-nilai yang didapat melalui sosialisasi politik yang sejalan dengan tradisi dapat dipengaruhi dan melandasi sikap seseorang atau kelompok terhadap sebuah sistem politik yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan



bernegara dan sudah tentu dalam kehidupan politiknya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Yahya Muhaimin<sup>6</sup> yang menyebutkan bahwa:

Kehidupan politik dan negara memerlukan sikap yang menunjukkan dukungan serta kesetiaan warganya kepada sistem politik dan kepada negara yang ada. Sikap ini dilandasi oleh nilai-nilai yang berkembang dalam diri warga masyarakat negara itu, baik sebagai individu atau kelompok. Tatanan dan proses politik akan memberikan makna pada anggota masyarakat bilamana sejalan dengan nilai dan tradisi yang dipegang oleh anggota masyarakat.

Dari metode penyampaian pesan, sosialisasi politik dibagi menjadi dua; pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Melalui pendidikan politik yang merupakan proses dialogik antara pemberi dan penerima pesan, masyarakat dapat mengenal dan mempelajari nilai, norma dan simbol-simbol politik seperti partai politik. Sedangkan indoktrinasi politik ialah proses sepihak yang dilakukan oleh penguasa untuk memobilisasi dan memanipulasi masyarakat untuk menerima nilai, norma dan simbol politik yang dianggap ideal dan baik. Dalam negara demokrasi sosialisasi politik yang dilakukan oleh partai politik adalah melalui pendidikan politik, bukan melalui indoktrinasi politik. Menurut Alfian<sup>7</sup> pendidikan politik merupakan sebuah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang akan dibangun. Hal ini relevan seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa sosialisasi politik merupakan proses untuk mentransformasikan nilai-nilai politik.

---

<sup>6</sup> Sastroadmodjo Sudijono (1995): *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press. Hal. 217

<sup>7</sup> Alfian (1981): *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia. Hal. 235



Sedangkan menurut M. Nasir, sosialisasi politik lebih ditekankan pada aspek pembinaan warga negara kearah kehidupan dan cara berfikir yang sesuai dengan pola yang ditentukan partai. Maksudnya adalah bahwa proses sosialisasi yang dilakukan partai politik tersebut dapat menanamkan suatu hal kepada masyarakat tentang cara pandang yang dianut oleh partai tersebut. Sehingga diharapkan warga negara dapat berfikir dan bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh partai yang tercermin dalam sikap politik seseorang. Tentang sikap politik yang terbentuk dalam proses sosialisasi politik ini menurut Almond dan Verba, ada seperangkat hubungan dengan tiga anggapan mengenai hal ini yakni:

1. Pengalaman sosialisasi yang akan mempengaruhi tingkah laku politik dikemudian hari yang terjadi sebelumnya dalam kehidupan
2. Pengalaman ini bukan pengalaman yang bersifat politik, akan tetapi memiliki berbagai konsekuensi politik laten yaitu tidak dimaksudkan melukiskan dampak politik dan dampak tersebut tidak terorganisir
3. Proses sosialisasi selalu bersifat unredaksional dimana pengalaman-pengalaman mendasar dalam keluarga mempunyai pengaruh penting terhadap struktur sekuler politik tetapi sebaiknya tidak dipengaruhi oleh politik.

Sehingga tingkah laku politik seseorang dapat diketahui dari pengalaman awal meskipun hal tersebut sifatnya non politik. Karena sosialisasi politik sangat sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidup sehingga sumber dari sikap politik. Sedangkan

fungsi dari sosialisasi politik sendiri diungkapkan oleh Sudijono Sastroadmodjo<sup>8</sup> adalah sebagai berikut:

Fungsi sosialisasi politik itu sangat penting, sebab sosialisasi politik dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik yang pada gilirannya dapat mendorong partisipasi maksimal dalam sistem politiknya

Melalui pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian sosialisasi politik adalah proses berkesinambungan yang dilakukan oleh partai politik untuk memberikan pengetahuan mengenai sistem politik agar mampu untuk mengapresiasi dan menanggapi fenomena politik masyarakat serta menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam politik sosialisasi ini berkaitan dengan nilai-nilai ini dialokasikan dalam masyarakat melalui pendidikan politik agar menjadi warga negara yang sesuai dengan ideologi dan cara berfikir partai tersebut.

#### 2.1.1.(a) *Macam-Macam Sarana Sosialisasi Politik*

Dalam melakukan sosialisai politik, menurut Apter<sup>9</sup> banyak macam-macam sarana atau agen-agen dalam melakukan sosialisasi politik. Diantaranya:

##### 1. Keluarga

Fase awal pembelajaran seorang anak dalam keluarga juga dapat terjadi saat proses belajar dalam keluarga sebelum anak sadar mengenai politik. Apter menyatakan bahwa orang-orang dewasa adalah warga negara yang dapat mengutarakan sikap mengenai masyarakat, atau rasa suka atau bencinya

<sup>8</sup> Eka Wahyuningsih (2013). Skripsi: *Konstruksi Pendidikan Politik pada Sekolah Menengah Atas di Kota Pangkalpinang*. UPI. repository.upi.edu

<sup>9</sup> E. Apter, David 263

mereka terhadap pemimpin-pemimpin politik dan pimpinan-pimpinan partai, dan menanggapi isu-isu yang mempengaruhi mereka. Hal-hal seperti itu dirasakan oleh anak-anak jauh sebelum mereka memahaminya.

Keluarga mempunyai peranan yang menentukan dalam proses sosialisasi nilai politik terhadap warga negara ataupun individu karena keluarga mempunyai kesempatan untuk menurunkan nilai-nilai politiknya kepada seseorang individu justru pada saat masa kanak-kanak<sup>10</sup>. Selain itu, ada asumsi lain yang menyatakan bahwa sosialisasi politik yang diperoleh seorang anak dapat terjadi karena hal yang tidak disengaja.

## 2. Sekolah

Menurut Efriza<sup>11</sup> pendidikan telah dipandang sebagai satu variabel penting dalam kegiatan menjelaskan tingkah laku politik, dan terdapat banyak pembuktian tidak langsung yang menyatakan pendidikan itu penting sebagai agen sosialisasi politik. Hal ini dapat dipahami karena di sekolah anak-anak dididik di dalam suatu proses yang sangat teratur, sistematis, dan nilai-nilai politik bisa diturunkan secara langsung ataupun tidak langsung oleh guru-guru kepada anak didik.

Sekolah memberikan pengertian kepada kaum muda tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. Sekolah memberikan pandangan yang lebih konkret tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan

<sup>10</sup> Efriza (2012) <http://digilib.unila.ac.id/3314/17/BAB%20II.pdf> diakses pada 11 Januari 2018 Pukul 14.35. Hal 22

<sup>11</sup> *Ibid* Hal. 23

politik. Sekolah juga merupakan “saluran pewarisan” nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakatnya

### 3. *Peer Group*

Pada prosesnya, ketika anak-anak itu muncul dari pengaruh awal keluarganya masuk ke dalam dunia yang lebih besar dari sekolah dan kelompok-kelompok sebaya, maka mereka terkena pengaruh-pengaruh lain yang dapat memperkuat atau justru bertentangan dengan politisasi awalnya

Kelompok teman sebaya merupakan suatu kelompok dari orang-orang yang seusia dan memiliki status yang sama dalam mengembangkan sikap dan perilaku, dengan siapa seseorang umumnya berhubungan atau bergaul. Sosialisasi politik melalui kelompok teman sebaya bersifat informal dan langsung<sup>12</sup>

### 4. *Media Massa*

Menurut Efriza<sup>13</sup> Di dalam suatu masyarakat yang sifatnya terkungkung atau dimana rezim berkuasa secara totaliter, dengan sendirinya, tidak banyak nilai-nilai politik yang bisa diturunkan. Tetapi dalam suatu masyarakat yang demokratis, nilai-nilai politik yang dikandung media massa sangat bervariasi. Media massa dalam hal ini, baik media cetak seperti surat kabar dan majalah maupun media elektronik seperti radio, televisi, dan media online, semakin memegang peranan penting dalam

---

<sup>12</sup> *Ibid.* Hal 36

<sup>13</sup> *Ibid.* Hal 38

mempengaruhi cara pandang, cara pikir, cara tindak, dan sikap politik seseorang.

#### 5. Kontak-kontak politik langsung

Kontak-kontak politik langsung dengan pemerintah, lembaga politik dan kehidupan politik sangat mempengaruhi sikap-sikap dan perilaku politik individu dan kelompok-kelompok untuk tetap setia atau tidak, bersedia mendukung atau tidak terhadap sistem politik, pemerintah atau partai politik yang semula didukungnya.

Organisasi-organisasi ataupun lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya mempunyai peranan pula menyalurkan nilai-nilai politik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa melalui berperannya pola aliran politik dalam organisasi-organisasi maka secara langsung anggota-anggota suatu organisasi kemasyarakatan terlibat atau mempunyai kesempatan yang sama besar untuk menurunkan atau menyebarkan nilai-nilai politik kedalam organisasi tersebut maupun kepada anggota masyarakat yang bukan anggota dari organisasi-organisasi tersebut.<sup>14</sup>

#### 2.1.(b). Sosialisasi Politik Islam

Imam Syahid Hasan Al Banna, secara teori menyebutkan bahwa sosialisasi politik dapat dilakukan melalui tahapan-tahapannya. Dengan dimulai dari memperbaiki individu, lalu melalui keluarga, setelah itu masyarakat, lalu memasukkan nilai-nilai ke tempat agen-agen sosialisasi tersebut beraktivitas. Hingga akhirnya sendi-sendi

---

<sup>14</sup> *Ibid.* Hal 48



*stakeholders* yang ada di masyarakat secara umum tersosialisasi secara menyeluruh.<sup>15</sup>

Ada tujuh tahapan yang dikemukakan oleh Imam Syahid Hasan Al Banna untuk melakukan sosialisasi politik yang ia maksud:

1. *Ishlahul Fardhi wa I'daad ar Rijal* (Perbaikan kepribadian dan penyiapan SDM).<sup>16</sup> Point ini merupakan point penting yang harus dilakukan. Hal ini merupakan modal dasar perjuangan politik bagi ummat Islam. Karena merekalah calon-calon politisi yang akan berkembang menjadi seorang negarawan. Perbaikan diri yang tersebut meliputi
  - a. *Saliimul 'Aqiidah* (Aqidah yang lurus)
  - b. *Shoshiul 'Ibaadaah* (Ibadah yang benar)
  - c. *Matiinul Khuluq* (Akhlaq yang kokoh)
  - d. *Mutsafaqul Fiqr* (Wawasan yang luas)
  - e. *Qowiyul Jism* (Fisik yang kuat)
  - f. *Qoodirun 'Ala Al Kasbi* (Mandiri dalam usaha)
  - g. *Mujaahidu Lil Hawahu* (Memiliki kesungguhan diri)
  - h. *Harishun 'Ala Waqtihi* (Pandai Mengelola waktunya)
  - i. *Munazhamun Fii Su'unihi* (Mampu mengorganisasi urusannya)
  - j. *Naafti'un Lil Ghoirihi* (Bermanfaat bagi orang lain)

<sup>15</sup> Elvandi Muhammad (2011), *Inilah Politikku*, Solo: Era Adicitra Intermedia, Hal. 181

<sup>16</sup> Ramadhan, A. A.-M. (2015), *Manhaj Ishlah*. Solo: Era Adicitra Intermedia. Hlm. 180



2. *Binaa'ul Ushrah Muslimah* (Pembinaan dalam keluarga Muslim).<sup>17</sup> Point ini merupakan langkah kedua dari cara melakukan sosialisasi politik. Aplikasi dalam langkah kedua ini merupakan menjaga keluarga dan memastikan keluarga agar menghargai *fikrah* nya sebagai muslim. Menjaga etikanya dalam perilaku sehari-hari. Sehingga dari keluarga ini memunculkan SDM-SDM baru untuk terus memperjuangkan Politik Islam yang diusung serta diusahakan.

Syaikh Musthafa Mashur menyebutkan dalam Fiqh Sunnah<sup>18</sup>:

Sebagaimana yang dicita-citakan oleh setiap umat Islam yang merupakan pencerminan kehidupan Islam, baik aqidah, akhlaq, dan tingkah lakunya, demikian juga diharapkan rumah tangga para SDM ini agar menjadi pusat pelaksanaan seluruh ajaran Islam dalam hidup berkeluarga yang benar dan teliti. Oleh karenanya diharapkan seorang suami muslim yang memikul tanggungjawab dan tugas-tugas rumah tangganya sesuai dengan ketentuan Islam. Karena diharapkan agar seorang ayah muslim mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Islam serta memeliharanya dengan adab-adab Islam, memberi pemahaman Islam yang sejati kepada menara dan memperhatikan seluruh peringkat hidup anak-anaknya.

Dengan demikian, membangun keluarga yang Islami merupakan salah satu strategi yang amat penting. Karena, dengan menerapkan tahap ini, seharusnya secara otomatis keluarga ini dapat dengan mudah untuk menerima nilai-nilai politik yang menjadi landasan keluarga tersebut dalam berpolitik. Hingga, ketika melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat luar, keluarga secara otomatis menjadi objek sosialisasi.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hlm. 236

<sup>18</sup> Masyhur, M. (2009), *Fiqh Dakwah*. Jakarta: Al Itishom.

3. *Irsyaadul Mujtama'* (Membimbing Masyarakat).<sup>19</sup> Tahap ini merupakan proses transformasi nilai-nilai kebaikan yang diyakini pribadi kepada masyarakat. Pada tahap ini SDM-SDM yang telah dibentuk mulai memasuki lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada untuk memberi pengaruh yang baik. Aplikasi dari tahap ini bisa juga disebut sebagai infiltrasi gerakan. Dalam pelaksanaannya, para SDM-SDM yang sudah terbentuk mampu berperilaku dan menjalankan konsep *Amar Ma'ruf Nahyi Munkar*. SDM-SDM tersebut dapat berinteraksi langsung dengan struktur masyarakat yang ada. Fase ini dapat disebut sebagai orbit sosial.

Dr. Abdurrahman Al-Mursy Ramadhan menyebutkan dalam bukunya bahwa Islam mempunyai manhaj dalam membangun masyarakat sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Imam Syahid Hasan Al Banna. Diantaranya<sup>20</sup>:

- a. Mewaspadaai problematika dan faktor-faktor penyebab kehancuran
- b. Membasmi penyakit sosial dan akarnya bila terjadi. Setiap penyakit ada obatnya
- c. Menjadikan asas perbaikan dan obat pertama dalam setiap pengobatan adalah kesalehan jiwa dan solidaritas sosial antar masyarakat
- d. Melingkupi semua itu dengan hal-hal yang dapat menghilangkan kesulitan dan tidak menyebabkan kesengsaraan

---

<sup>19</sup> Ramadhan, A. A.-M. (2015), Op. Cit. Hlm. 248

<sup>20</sup> *Ibid.*

- e. Meletakkan kaidah-kaidah umum dan meninggalkan yang *furu'*
- f. Menetapkan metode-metode penerapan
- g. Mengharuskan penyebaran dakwah dengan hikmah, *mauzi'ah hasanah* dan penerapan yang benar sehingga dapat menyentuh semua ummat manusia.

Hasan Al Banna menyebutkan<sup>21</sup>:

Bahwa Islam setelah itu berupaya mengantisipasi problematika sosial. Pertama-tama melakukan upaya preventif terhadap hal-hal yang bisa menyebabkannya, lalu membasmi masalah yang terlanjur ada. Setiap masalah sosial dalam Islam pasti ada obatnya, dan obat pertama untuk setiap pengobatan adalah kesalehan jiwa dan solidaritas sosial antar masyarakat

Islam melingkupi semua itu. Islam tidak mengajak manusia meniti jalan kesulitan, dan tidak membawa manusia ke arah yang sulit. Akan tetapi, Islam mengendaki kemudahan bukanlah kesulitan. Islam meletakkan kaidah yang bersifat umum dan membiarkan hal-hal yang sifat rinci. Islam menjelaskan cara-cara penerapannya, setelah itu membiarkan waktu yang bekerja. Islam dengan begitu merupakan syariat dalam tiap dimensi ruang dan waktu.

4. *Tahriirul Wathan* (Membebaskan Negeri).<sup>22</sup> Pada tahap ini, SDM-SDM yang sudah dibentuk harapannya dapat membesakan negerinya dari penjajahan negeri barat. Secara konteks hal ini menyeluruh terhadap politik, sosial, ekonomi, psikologis dan budaya serta moral. Dengan ini Hasan Al

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hlm 298

Banna menjadikan pembebasan negeri dan kemerdekaannya secara total serta pengusiran penjajah dari negeri muslim sebagai kewajiban dan tujuan politik yang diupayakan sebelum mewujudkan pemerintahan Islam.

Dalam upaya pemerdekaan serta pembebasan negeri dari penjajah dan dalam rangka meraih kemerdekaan politik serta hak-haknya, Al Banna mengisyaratkan rambu dan manhaj yang bisa mewujudkan itu serta bisa diadopsi oleh yang lain dengan berkata:<sup>23</sup>

“Harus ada jihad yang panjang, pahit, berat dan berkelanjutan. Dan hal ini akan terwujud dengan persatuan yang sempurna, ikatan yang menyeluruh, rasa kesatuan yang menghimpun dari hati ke hati, usaha berlipat ganda, disamping konsisten pada kaidah yang benar dan arah yang tepat menuju rambu kebaikan. Hari dimana ini terjadi maka tak ada ritangan satu pun di jalan kita dan pasti kita akan meraih hak kita dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, Insya Allah. Keimanan dan cinta melahirkan kesatuan yang hakiki. Dialah yang paling kita butuhkan sekarang, Allah”

Hal ini sudah diaplikasikan oleh Al Banna ketika beliau menyiapkan masyarakat Mesir melalui Ikhwanul Muslimin untuk menghadapi penjajahan Inggris. Al Banna mampu untuk membangkitkan semangat masyarakat Mesir terkait hal tersebut. Kemudian, dengan pidato-pidatonya saat melawa Inggris yang memberikan banyak pengorbanan ketika perang Terusan Suez. Banyak lembaran yang sudah dituliskan tapi sebagian masih ada yang belum terungkap oleh sejarah sampai hari ini. Sementara disaat yang sama, yang lain hanya cukup dengan slogan, pidato dan khutbah pembakar semangat.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hlm. 298

Hasan Al Banna juga menyampaikan langkah-langkah mengusir penjajah dari negeri Islam, yang pada saat itu Mesir dengan berusaha mengusir Inggris dari negerinya, diantaranya:<sup>24</sup>

- a. Harus membangkitkan umat, menyadarkannya dan menyiapkannya untuk berkonfrontasi.
- b. Menghimpun suara masyarakat dan menyatukan kekuatan serta usaha seputar hal ini lalu mengkoordinasikan langkah-langkahnya.
- c. Mengadopsi kampanye media yang dapat memberi tekanan pada skala internasional (baik pemerintahan maupun rakyat) untuk menjelaskan masalah ini dan meraih dukungan
- d. Melawan kelemahan pemerintah dan intervensi asing yang menyetir pemerintah sekehendaknya dengan menggunakan opini umum untuk menghadapi kerusakan ini.
- e. Usaha damai dengan penjajah
- f. Perlawanan harus diumumkan, membatalkan semua kesepakatan dan ikatan lalu menyiapkan rakyat disegala bidang untuk menghadapi ini
- g. Senjata boikot
- h. Perlawanan sosial seperti ini, termasuk didalamnya perlawanan militer membutuhkan persiapan dan pengorbanan yang memerlukan persiapan jiwa

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, Hlm. 302



- i. Partisipasi jama'ah secara nyata dalam konfrontasi militer melawan penjajah. Bahkan Jama'ah merupakan pilar utama dalam perlawanan ini.

5. *'Ishlahul Hukumah* (memperbaiki pemerintahan).<sup>25</sup> Fase ini mungkin mirip dengan fase ke-3. Akan tetapi, secara khusus dalam fase ini SDM-SDM yang sudah disiapkan siap untuk melakukan infiltrasi kepada lembaga-lembaga pemerintahan. Bekerja untuk ummat dan mencari maslahat untuk ummat. Pada fase ini, para SDM yang sudah disiapkan seharusnya mampu melakukan *amar ma'ruf nahyi munkar* secara melalui lembaga-lembaga pemerintahan sehingga masyarakat yang ada di negeri tersebut dapat mengimpelementasikan apa-apa yang sudah diusahakan oleh para SDM yang sudah terbina tersebut.
6. *I'adatul Qiyaniid Daulih Lil Ummati Islamiyyah* (mengembalikan peran ummat Islam dalam percaturan Internasional)<sup>26</sup>. Ketika memasuki tahap ini, maka syarat utama yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan 5 (lima) tahap sebelumnya secara menyeluruh. Ketika 5 (lima) tahap sebelumnya sudah paripurna, maka menjalankan tahap ini tidaklah sulit. Hal ini dikarenakan tiap-tiap negara yang sudah menyelesaikan 5 (lima) tahap sebelumnya sama-sama sudah siap untuk menyatukan negara-negara muslim yang ada. Seperti halnya Uni-Eropa, maksud menyatukan negara-

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Hlm. 320

<sup>26</sup> *Ibid.*



negara Islam disini adalah seperti itu. Mendirikan kepemimpinan ummat Islam dalam suatu bentuk pemerintahan yang jelas landasannya.

Al Banna menyebutkan bahwa berdirinya pemerintah Islam merupakan bagian dasar dari *manhaj* Islam. Beliau menjelaskan bahwa pengaturan kehidupan dan pendirian pemerintahan Islam merupakan asa keimanan dan keyakinan terhadap syariat Islam. Ia menolak pemisahan antara agama dan politik. Al Banna berkata “... *Islam datang sebagai aturan, pemimpin agama, negara, syariat dan pelaksanaannya...*”

Agama Islam menjadikan pemerintahan sebagai salah satu pilar bangunannya. Ia tidak hanya menjadi alat pengarah dan nasihat, namun harus diwujudkan dalam realitas kehidupan. Nabi SAW menempatkan masalah pemerintahan sebagai salah satu dari inti Islam. Dalam literatur Fiqh, ia masuk pada pembahasan aqidah dan *ushul*, bukan kedalam masalah fiqh dan cabang.

Oleh karena itu, Al Banna<sup>27</sup> menjadikan politik sebagai bagian dari tujuan utama yang diupayakan oleh jama'ah, dan diupayakan oleh ummat muslimin. Beliau menyebutkan dalam tingkatan amal dan tujuan jama'ah “... *setelah itu kita menginginkan pemerintah muslim yang bisa membimbing anggota masyarakatnya ke Masjid ...*” Al Banna<sup>28</sup> melanjutkan “... *kami akan bekerja untuk menghidupkan sistem*

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

*pemerintahan Islam dengan seluruh wujudnya dan membentuk pemerintahan Islam di atas sistem ini ...”*

Hasan Al Banna juga menyebutkan tentang dua asas utama, beliau menyebutkan perhatikanlah selalu terhadap dua hal utama yang ingin dicapai diantaranya:<sup>29</sup>

- a. Agar negara muslim merdeka dari setiap dominasi asing. Hal itu merupakan hak asasi manusia. Tidak ada yang mengingkari kecuali orang zhalim lagi durhaka, atau para penjajah durjana
  - b. Agar negara ini berdiri sebuah daulah Islamiyyah yang merdeka dan menerapkan hukum Islam, merealisasikan sistem sosialnya, mendeklarasikan prinsip-prinsipnya yang lurus, dan menyampaikan dakwahnya yang bijak kepada seluruh manusia.
7. *I’laanu ustadziyatul ‘alam* (mendeklarasikan Islam sebagai soku guru peradaban alam semesta)<sup>30</sup> tahap ini merupakan tahap terakhir. Yakni menjadi kan Islam dengan Al-Qur’an dan Hadits akan berperan penuh dalam kehidupan manusia hingga ke sendi-sendi kehidupan yang ada. Semua ilmu pengetahuan akan berkembang atas dasar Allah. Melakukan kegiatan berpolitik atas dasar Allah. Sehingga, membentuk masyarakat yang damai serta sejahtera dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Hasan Al Banna menyebutkan:

“setiap jengkal tanah yang diatasnya ada seorang muslim mengucapkan syahadatyn adalah bagian yang mahal dari negara kami. Maka kami akan menuntut kemedekaannya dan

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*, Hlm. 388

membebaskannya dari penjajah asing yang zhalim. Kami akan berjuang demi hal itu dengan sepenuh kekyaran yang kami miliki. Negara yang membentang dari batas Indonesia di sebelah Timur hingga ke Casablanca disebelah barat harus menikmati udara kemerdekaan, persatuan dan kedamaian dibawah naungan ikatan, sistem dan kondisi yang telah ditetapkan oleh AlQur'an dan ditunjukkan kepadanya oleh Islam sebagai agamanya, aqidahnya, sistemnya dan syariatnya”<sup>31</sup>

Al Banna menyakini bahwa *Khilafah* adalah lambang kesatuan Islam dan bentuk formal dari ikatan antar bangsa muslim. *Khilafah* merupakan identitas Islam yang umat Islam wajib memikirkan urusannya dan menaruh perhatian terhadap kondisinya. Menurut Al Banna, *Khilafah* merupakan tempat rujukan bagi banyak hukum dalam agama Islam. Hadits-hadits yang menjelaskan tentang kewajiban mengangkat imam dan hukum iamamh tidak meninggalkan ruang keraguan lagi bahwa salah satu kewajiban umat Islam adalah *concern* untuk memikirkan masalah *Khilafah* sejak ia diselewengkan dari manhajnya kemudian dihapus sama sekali sampai hari ini.

Al Banna menjadikan fikrah *Khilafah* dan upaya mengembalikannya sebagai agenda utama dalam manhajnya.<sup>32</sup> Sebagaimana Albanna juga mengerahkan usaha dalam langkah-langkah cepat untuk mengembalikan eksistensi internasional umat Islam dalam upaya mewujudkan kemajuan serta perkembangannya ditengah komunitas masyarakat dan memiliki andil posistif di dunia internasional. Langkah-langkah ini mengambil bentuk yang beragam dan variatif serta fase-fase yang bertahap. Kalau hasil awal

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

dari langkah-langkah ini belum terlihat, itu karena tingginya tujuan besar tersebut, dimana ada tujuan-tujuan yang harus mendahuluinya ditambah persiapan panjang yang menyertainya. Betapapun berat rintangannya yang menghalangi, hal itu tidak berpengaruh terhadap keyakinan dan upaya mereka dalam mewujudkan tujuan mulia itu dan bekerja untuk meraihnya.

Jika tahapan-tahapan yang dikemukakan oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna dapat direalisasikan dalam melakukan sosialisasi politik, maka politik dengan bernafaskan Islam akan sangat mudah diterapkan. Karena landasan dari sosialisasi ini adalah memulainya dari diri sendiri, sampai mengakar kepada keluarga.

## **2.2 Tinjauan Konseptual**

Dalam suatu penelitian perlu adanya konsep yang digunakan, untuk memperkuat argumentasi dalam suatu pembahasan penelitian. Konsep juga diperlukan untuk mendukung teori yang digunakan dalam penelitian tersebut. Sehingga adanya kesinambungan antara teori dan konsep dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa konsep yang dirasa relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

### **2.2.(a) Politik Islam**

Secara bahasa, politik yang dalam bahasa Arab disebut sebagai *as-siyasah* yang berarti mengelola, mengatur, memerintah dan melarang sesuatu. Atau secara definisi

disebutkan berarti prinsip-prinsip dan seni mengelola persoalan publik.<sup>33</sup> Syaikh Yusuf Qardhawi juga menyebutkan dalam kamus *Al-Kamil* bahwa politik adalah semua yang berhubungan dengan pemerintahan dan pengelolaan masyarakat madani.<sup>34</sup>

Dalam 114 surat di Al-Qur'an, yang terdapat lebih dari enam ribu ayat istilah politik tidak akan didapati sama sekali. Yusuf Qardhawi menyebutkan dalam buku yang berjudul *Mu'jam Alfazh AlQur'an* yang diterbitkan Pusat Riset Bahasa Arab, ia tidak akan pernah ditemui<sup>35</sup>. Namun bukan berarti konsep politik Islam memang tidak diatur. Beberapa elemen kaum muslimin ada yang menyepakati untuk menolak memasukkan politik dalam kehidupan berIslam berdasar karena poin ini, bahwa Islam tidak mengenal politik karena tidak adanya sama sekali istilah politik dalam Al-Qur'an. Padahal secara kaidah, segala urusan kaum muslimin tidak semua secara langsung tertulis dengan jelas di Al-Qur'an.

Makna politik atau *Siyasah* dalam Al-Qur'an selalu disampaikan dalam bentuk kiyasan yang tidak langsung menyebutkan kata *siyasah* atau politiknya. Melainkan dengan bentuk kata yang mensiratkan bahwa itu adalah hasil atau proses dari sebuah produk politik seperti kerajaan, kedudukan serta amanah dan masih banyak bentuk kata yang mengintepretasikan sebuah proses atau hasil dari politik.

فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا  
عَظِيمًا

<sup>33</sup> Elvandi, M. (2011), *Inilah Politikku*. Solo: Era Adicitra Intermedia., Hal 3

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.* Hlm. 4



Sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. (Q.S *An Nisa*:54)

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ  
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (Q.S *Al Hajj*:41)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S: *An-Nisa*: 58)

Tiga kutipan ayat diatas, tidak ada satupun ayat yang menyebut secara jelas kata politik. Namun, kutipan-kutipan ayat diatas menyinggung kata kerajaan, kedudukan, hukum dan keadilan. Hal-hal tersebut merupakan sebuah proses atau hasil dari kegiatan berpolitik. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Islam memandang bentuk pengelolaan urusan manusia dapat disebut sebagai politik. Hal tersebut juga untuk makna-makna yang serupa dan sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Maka kata *siyasi* atau *siyash* memang tidak *termaktub* secara jelas di dalam Al-Qur'an, akan tetapi prinsip-prinsip politik sangat di tekankan didalamnya sebagai pegangan manusia dalam berinteraksi di tengah masyarakatnya.

Hasan Al Banna mengemukakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna yang mencakup seluruh aspek kehidupan.<sup>36</sup> Al Banna mengkritik pemikiran yang memisahkan antara agama dan politik. Ia menyatakan bahwa gerakan Islam yang menjauhkan politik dari tujuan-tujuannya, tidak bisa disebut sebagai gerakan Islam dengan pemahaman yang menyeluruh tentang Islam.<sup>37</sup> Al Banna mengatakan:<sup>38</sup>

“dapat saya nyatakan dengan lantang, bahwa seorang muslim tidak sempurna Islamnya kecuali menjadi seorang politisi, berpandangan jauh dalam urusan ummatnya. Dapat saya katakan bahwa pembatasan dan pelucutan adalah sesuatu yang tidak diakui oleh Islam. Sehingga menjadi kewajiban setiap organisasi Islam untuk menjadikan agenda utamanya adalah memperhatikan urusan umatnya secara politik dan jika tidak maka ia masih memerlukan pemahaman makna kata Islam”

Al Banna memberikan beberapa tuntutan praktis terkait Politik Islam yang ia kemukakkan kepada para pemimpin dan penguasa Arab, diantaranya:<sup>39</sup>

- a. Menghapuskan sistem kepartaian yang memecah-belah umar Islam dan mencabik-cabik rakyat menjadi kelompok-kelompok yang tidak menuntut dengan cara islami dan hanya berselisih untuk memperebutkan keuntungan materi dan kepentingan pribadi, tanpa memperhatikan kepentingan umum. Dan mengarahkan kekuatan umat Islam secara politik dalam satu arah dan satu barisan
- b. Memperbaiki undang-undang sehingga sesuai dengan syariat Islam dan setiap cabangnya

<sup>36</sup> Ishaq, M. M. (2012), *Fiqh Politik Hasan Al-Banna*. Jakarta: Robbani Press., Hlm 5

<sup>37</sup> *Ibid.* Hlm 7

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*, Hlm. 44

- c. Memperkuat tentara dan memperbanyak sanggar-sanggar pemuda dan menggelorakan semangatnya untuk berjihad secara Islami
- d. Memperkuat hubungan antara negara-negara Islam seluruhnya, khususnya bangsa Arab untuk menjadi pelopor, bagi pemikiran serius dan praktis tentang *Khilafah Islamiyyah* yang hilang
- e. Menyebarkan ruh Islam di kantor-kantor pemerintahan sehingga semua pegawai merasakan tuntunan ajaran Islam
- f. Mengawasi perilaku pegawai secara personal dan memisahkan urusan pribadi dan urusan kerja
- g. Mendahulukan waktu kerja kantor, baik dimusim panas atau musim dingin, sehingga membantu melaksanakan kewajiban dan menghapus banyak bergadang
- h. Menghapus suap dan menggaji dengan cukup serta hal-hal yang diperbolehkan menurut undang-undang saja
- i. Menimbang semua pekerjaan pemerintah dengan pertimbangan hukum dan ajaran Islam sehingga aturan upacara, undangan, pertemuan resmi, penjara, rumah sakit tidak berbenturan dengan ajaran Islam. Rotasi pekerjaan dengan pembagian yang tidak bertabrakan dengan waktu shalat
- j. Pendayagunaan ulama Al-Azhar dalam pekerjaan militer, administrasi dan pelatihannya..

Selain tuntutan-tuntutan diatas, Al Banna juga mengemukakan pendapatnya agar kemudia bangsa Arab dan Islam kembali kepada sistem hidup

yang islami dan tatakota yang kembali kepada Islam. Tampilan Islam yang dimaksud adalah:<sup>40</sup>

- a. Menyatakan bahwa pemerintahannya adalah islami, mengaktualisasikan pemikiran Islam dalam bernegara dengan tampilan resmi
- b. Menghormati kewajiban-kewajiban dan simbol-simbol Islam, serta mengharuskan pelaksanaan kepada seluruh pegawai dan pejabat, dan hendaknya pejabat tinggi menjadi teladan dalam hal ini bagi yang lain
- c. Mengharamkan semua yang memabukkan yang telah diharamkan dalam Islam, berupa *khamr* dan yang sejenisnya, termasuk zina dan yang menjadi pendahuluannya, riba dan yang berkaitan dengannya, berupa judi, dan usaha-usaha haram. Hendaknya negara menjadi teladan, dalam hal ini sehingga negara tidak memperbolehkan apapun dari semua itu dan tidak melindunginya dengan kekuatan undang-undang dan tidak memperlakukan rakyat atas dasar ini
- d. Memperbarui *manhaj* (sistem) pendidikan sehingga menjadi pendidikan Islam sekaligus pendidikan nasional. Artinya, pengajaran dilakukan dengan bahasa Arab, sejarah nasional mendapatkan perhatian yang baik, bertujuan pada pembentukan karakter pelajar dengan ajaran Islam dan memberi wawasan kepada akal mereka dengan hukum dan hikmah Islam
- e. Pemerintah menerbitkan *tauji*h (arahan) islami ini dalam setiap tindakan.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, Hlm 46

Hal-hal diatas merupakan hak Islam yang menjadi kewajiban setiap muslim. Menurut Al Banna, hal-hal diatas merupakan sebuah tampilan Islam yang harus bisa dilakukan jika memegang kendali politik. Karena sejatinya, Islam tidak akan pernah memparsialkan hal politik dengan hal Islam itu sendiri.

### 2.2.(b). Konsep *Khilafah*

Ibnu Khaldun dalam Mukaddimahya menjelaskan tentang *Khilafah* dimulai dengan hakikat kekuasaan. Beliau menyebutkan bahwa ketika hakikat kekuasaan merupakan konsekuensi dari kehidupan bermasyarakat dari manusia, yang melahirkan kekuasaan dan pemaksaan dimana keduanya merupakan pengaruh dari sifat amarah dan hewani maka kontrol kekuasaan dari rezim yang berkuasa terhadap rakyatnya dalam kehidupan dunia mereka seringkali melebihi batas dan menyimpang dari garis kebenaran. Sebab rezim tersebut biasanya menggiring mereka kepada sesuatu yang diluar kemampuannya demi memenuhi tujuan-tujuan nafsunya. Kondisi semacam ini berbeda-beda antar rezim satu dengan rezim lainnya berdasarkan perbedaan tujuan-tujuan yang mereka ingin capai, baik pada zaman dahulu maupun zaman sekarang.<sup>41</sup>

Melihat kondisi semacam itu, maka sulit bagi ummat untuk mematuhi peraturan semacam itu. Fanatisme yang mereka miliki akan mendorong mereka untuk membuat huru-hara dan melakukan pembunuhan. Karena itu, instabilitas yang terjadi dalam sosial kemasyarakatan ini membutuhkan hukum politik yang harus dipatuhi semua pihak. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada bangsa Persia

---

<sup>41</sup> Ibnu Khaldun. (2001), "*Mukaddimah*". Terj. Masturi Ilham, Malik Supar, Abidun Zuhri. Jakarta: Pustaka Al Kautsar., Hlm. 334



dan bangsa-bangsa lain. Apabila suatu kerajaan atau pemerintahan tidak memiliki aturan hukum yang jelas, maka tidak akan tercapai stabilitas nasional dan tidak mampu berdiri dengan tegak.<sup>42</sup>

Kemudian Ibnu Khaldun berkata:

Jika hukum-hukum ini dirumuskan oleh para cendekiawan dan para pemimpin kerajaan dan para pakarnya berdasarkan akal murni mereka, maka dikatakan sebagai hukum akal. Sedangkan apabila dirumuskan dari syariat yang diturunkan Allah SWT. Maka dikatakan sebagai hukum agama yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat sekaligus.<sup>43</sup>

Hal tersebut terjadi karena tujuan penciptaan manusia bukanlah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di dunia saja. Sebab kehidupan dunia bersifat sementara, fana dan sia-sia karena akhir perjalanan kehidupan dunia ini adalah kematian dan kepunahan. Tujuan penciptaan manusia adalah memberikan kebahagiaan mereka di akhirat kelak melalui agama mereka. Karena itulah turun syariat-syariat Allah yang dapat mengantarkan mereka untuk mencapai tujuan tersebut dalam berbagai sikap dan perilaku mereka, baik ibadah maupun muamalah, bahkan dalam kekuasaan sekalipun yang merupakan sesuatu yang natural bagi manusia yang memiliki kecenderungan hidup bermasyarakat. Karenanya, menurut Ibnu Khaldun, kebijakan-kebijakan kekuasaan tersebut didasarkan pada aturan-aturan agama agar semua pihak terlindungi dengan aturan-aturan syariat.<sup>44</sup> Ibnu Khaldun melanjutkan, sedangkan kekuasaan yang dijalankan dengan sewenang-wenang, saling menguasai dan mengabaikan kekuatan fanatisme dari bangsa yang

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*, Hlm 335

<sup>44</sup> *Ibid.*

mendukungnya, maka hal itu merupakan kebijakan yang sesat, menimbulkan permusuhan sekaligus merupakan sikap tercela.<sup>45</sup>

Hal ini pun sebagaimana yang terjadi sebagai kensekuensi dari kehidupan berpolitik. Kekuasaan yang hanya didasari pada hukum politik dan aturan-aturan yang dihasilkannya, juga tercela karena hukum tersebut tanpa petunjuk Allah. Karena Allah yang membuat hukum jauh lebih mengetahui kepentingan-kepentingan seluruh makhluk-Nya, termasuk perkara-perkara yang berhubungan dengan kehidupan akhirat yang tidak kita sebagai makhluknya mengetahui.

Melalui berbagai keterangan diatas, dapat kita mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun terhadap *Khilafah*. Ibnu Khaldun menyimpulkan pengertian dari khilafah seperti ini:

“Bahwa karakter dasar kekuasaan cenderung memerintah masyarakat berdasarkan tujuan dan keinginan naluriyah mereka. Sedangkan kekuasaan politik cenderung memerintah masyarakat berdasarkan akalnya; yakni tentang bagaimana mendatangkan kebaikan-kebaikan dunia dan mencegah terjadinya bahaya yang menganacam. Sedangkan kekuasaan dari suatu ke*Khalifahan* cenderung memerintah masyarakat berdasarkan syariat, baik dalam kepentingan-kepentingan akhirat maupun kepentingan-kepentingan dunia yang kembali kepadanya, sebab seluruh aktivitas di dunia, di sisi Allah, hanyalah sebagai alat untuk mencapai kehidupan akhirat, kekhalifahan inipada hakikatnya merupakan pengganti atau wakil Allah dalam menjaga agama dan kehidupan dunia.”<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*, Hlm. 337

Jumhur ulama sepakat bahwa mengangkat seorang *Khilafah* atas umat Islam adalah wajib berdasarkan *syariat*.<sup>47</sup> Mereka memberikan alasan terhadap kewajiban itu berdasarkan beberapa hal berikut:<sup>48</sup>

1. *Ijma'* sahabat atas pengangkatan *Khilafah*, sampai-sampai mereka mendahulukan perkara bai'at atas penguburan jenazah Rasulullah SAW.
2. Bahwa perkara-perkara yang statusnya wajib seperti menegakkan *huduud* dan menjaga perbatasan tidak bisa dilakukan secara sempurna kecuali dengan adanya *Khaliifah*, dan suatu kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaannya karena adanya sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib.
3. Dalam pengangkatan *Khilafah* terdapat maslahat dan mencegah dari *kemudharatan*. Ini wajib berdasarkan *Ijma'*.

Sebagian kelompok kaum muslimin berpendapat bahwa pengangkatan *Khilafah* wajib berdasarkan akal. Mereka beralasan bahwa setiap umat harus memiliki kekuatan yang menjaga undang-undangnya dan mengatur urusan masing-masing individunya serta adanya seorang penguasa sebagai penjaga adalah termasuk kebutuhan mendesak dari sebuah komunitas manusia. Syaikh Kholaf menyebutkan bahwa Ibnu Kholdun dalam kitabnya yang bernama *Muqoddimah* mengatakan:

“Sebagian orang berpendapat menyimpang (nylench) dengan berkata tidak wajib mengangkat seorang khalifah secara mutlak baik berdasarkan akal atau pun syariat. Diantara mereka adalah al Asham dari kalangan Mu'tazilah, sebagian Khawarij dan yang lainnya. Yang wajib menurut mereka hanyalah penerapan hukum syariat Islam.

<sup>47</sup> Abdul Wahab Kholaf. (1988), “*Assiyaasah Asy Syar'iyah*”. Kuwait: Daarul Qolam., Hlm. 60

<sup>48</sup> *Ibid.*

Ketika umat sepakat untuk menegakkan keadilan dan menerapkan hukum-hukum Allah, maka umat tidak butuh kepada seorang imam dan tidak wajib mengangkatnya. Pendapat orang-orang ini batal dengan ijma'. Perkara yang membawa mereka sampai berpendapat seperti ini adalah karena (ingin) menjauh dari kekuasaan, karena madzhab-madzhab kekuasaan (selalu) diambil dengan cara merebut dan kudeta”<sup>49</sup>

Kesimpulannya adalah, mayoritas ulama sepakat bahwa wajib ditengah-tengah ummat Islam hadir seorang imam besar atau kepemimpinan tertinggi yang dengannya kalimat ummat menjadi satu dan menjadi syiar persatuan ummat serta menjadi perealisasi kehendak ummat. Pengabaian dalam kewajiban ini tidaklah bergantung pada suatu amal.

Menurut ajaran Islam, untuk mengatakan bahwa suatu pemerintahan dapat disebut *Khilafah Islamiyyah* atau negara Islam harus memenuhi beberapa prinsip dan kriteria<sup>50</sup>. Prinsip *pertama* yang harus diyakini dan dipegangi adalah bahwa seluruh kekuasaan di bumi ini ada pada Allah, karena Dia lah yang menciptakannya. Prinsip *kedua* adalah bahwa syariah Islam telah ditetapkan Allah untuk membimbing umat manusia dalam menjalankan fungsi *Khilafah*nya di bumi ini. Berdasarkan kedua prinsip tersebut, suatu negara yang diatur menurut syariah Islam secara teknis disebut *Khilafah al-Islamiyah atau Dar al-Islam*<sup>51</sup>. Menurut Qomaruddin Khan, negara yang terikat oleh kaidah yang demikian dapat dinamakan sebagai negara agama (*religious state*)<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, Hlm. 61

<sup>50</sup> Sudrajat, Ajat (2009), Jurnal: “*Khilafah Islamiyah Dalam Perspektif Sejarah*”, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Khan, Qomaruddin (2002), “Negara al-Mawardi” terj. Karsidi Diningrat, Bandung: Pustaka

Lebih jauh dikatakan oleh Iqbal bahwa suatu negara disebut negara Islam apabila memenuhi tiga kriteria. Tiga kriteria itu adalah: *ummah* (masyarakat Muslim), *syariah* (diberlakukannya hukum Islam), dan *khalifah* (kepemimpinan masyarakat Muslim). Berdasarkan prinsip bahwa kekuasaan dan kedaulatan mutlak ada pada Allah, maka negara Islam harus menjunjung tinggi syariah Islam. Selanjutnya, karena masyarakat Muslim (*ummah*) harus diperintah menurut hukum atau aturan Islam (*syariah*), dengan demikian menuntut adanya pemimpin (*khalifah*) yang akan melaksanakan dan menjalankannya. Tanggung jawab seorang khalifah atau kepala negara adalah melaksanakan syariah Islam dengan dipandu oleh tujuan pembentukan negara Islam (*Khilafah* Islamiyah) yaitu menuju kebahagiaan (*falah*). Negara atau *Khilafah* menjadi sarana untuk mengantarkan masyarakat Muslim mencapai keberhasilan baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Adapun prinsip-prinsip yang harus dipegangi ketika menjalankan pemerintahan adalah prinsip musyawarah, keadilan, persamaan hak, kemerdekaan, dan solidaritas.<sup>53</sup>

Kepala pemerintahan masyarakat Muslim disebut khalifah atau imam. Untuk menempati posisi sebagai khalifah ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi. Para ulama pada masa klasik telah mencatat dan mensyaratkan adanya kriteria-kriteria ini. Ibn Abi Rabi' misalnya, mengemukakan enam persyaratan yang harus dipenuhi seorang khalifah, yaitu: (1) anggota dari keluarga raja, dan mempunyai hubungan nasab yang dekat dengan raja sebelumnya, (2) aspirasi yang

---

<sup>53</sup> Sudrajat, Ajat. Op.Cit. Hal 7



luhur, (3) pandangan yang mantap dan kokoh, (4) ketahanan dalam menghadapi kesukaran dan tantangan, (5) kekayaan yang besar, dan (6) pembantu-pembantu yang setia.<sup>54</sup> Sedangkan Syaikh Kholaf juga menjelaskan syarat-syarat yang diakui bagi yang memimpin *Khilafah* yang ia nukil dari perkataan Abu al Hasan al Mawardi dalam *al Ahkam as Sulthaniyyah*. Diantaranya:<sup>55</sup>

1. Adil dengan syarat-syarat keseluruhannya
2. Memiliki ilmu untuk berijtihad dalam hukum dan masalah yang terjadi pada masanya.
3. Selamat dari cacat pendengaran, pengelihan dan mulut agar dia mampu memahami apa yang sedang ia hadapi dengan semua panca indera tersebut.
4. Selamat dari cacat fisik yang menghalangi dari gerak dan cepatnya bangkit
5. Memiliki pandangan yang luas dalam mengatur rakyat dan mengatur kemaslahatan
6. Pemberani dan sigap dalam melindungi pusat pemetintahan dan memerangi musuh.
7. Memiliki nasab dari Quraish karena adanya *nash* tentang dan sahnya *Ijma'* akan perkataan tersebut. Tidak dianggap bahaya ketika menyimpang (dari pendapat ini). Karenanya dibolehkan kepemimpinan *Khilafah* dari seluruh kalangan manusia.

Adapun syarat-syarat dari 6 (enam) yang pertama – keadilan sampai pemberani – maka secara jelas mensyaratkan kepada calon pemimpin tersebut untuk kembali

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Abdul Wahab Kholaf. Loc. Cit.

pada poin keadilan, kemampuan, dan kekuatan dalam mengemban amanah kaum muslimin agar mereka mengikuti undang-undang mereka dan mencegah mereka untuk berbuat *dzalim* diantara mereka. Semua itu mengharuskan kepada seorang imam untuk melaksanakan tugasnya berupa menjaga agama dan mengatur dunia. Semua syarat tersebut akhirnya disepakati.

Sedangkan syarat ketujuh diperselisihkan dan munculnya perbedaan tersebut karena ketiadaan yang pasti akan keabsahan *nash* yang terdapat tentangnya, serta bertentangan dengan *nash-nash* kebanyakan yang ada dengan menghilangkan aspek nasab dan penyandaran kepada amal-amal. Hal ini dilakukan untuk menghindari fanatisme serta menghindari kemungkinan-kemungkinan yang membuat menaikkan seorang imam karena hubungan nasabnya. Sedangkan untuk mengatur dunia dirasa cukup dengan orang yang memiliki kemampuan dan kekuatan darimanapun nasabnya. Ibnu Khaldun berkata:

“Jika telah tetap bahwa pensyaratan Quraisy adalah hanya untuk menghilangkan perselisihan fanatisme dan kekuatan diantara mereka, maka kita ketahui bahwa syariat tidak mengkhususkan kekuasaan pada suatu generasi, zaman, dan umat tertentu, kita ketahui juga bahwa hal itu termasuk dari kemampuan maka kami kembalikan pensyaratan tersebut kepada kemampuan dan kami mengembalikan kepada ilat yang mencakup atas maksud dari Quraisy yaitu adanya fanatisme (kekuatan). Pensyaratan kami terhadap yang menjalankan urusan kaum muslimin haruslah dari kaum yang memiliki fanatisme (kekuatan) terkuat untuk mengemban tugas selain mereka dan bersatunya kalimat dengan baiknya penjagaan serta hal tersebut tidak diketahui ada di wilayah belahan dunia sebagaimana dulu pada Quraisy, karena dakwah Islam yang ditujukan kepada mereka adalah dakwah yang bersifat universal, sedangkan fanatisme Arab telah memenuhi (mencukupi) dakwah Islam, maka mereka menjadi penguasa atas berbagai bangsa. Sesungguhnya dikhususkan pada suatu masa setiap wilayah dengan orang yang memiliki fanatisme kuat. Jika anda perhatikan rahasia Allah dalam Khilafah maka anda

tidak akan lepas dari hal ini. Karena Allah تعالى menjadikan khalifah sebagai penggantinya dalam melaksanakan urusan hambanya agar khalifah membawa mereka kepada kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan dari mereka dan khalifah diseru dengan perkara itu, sedangkan Allah tidak akan menyeru suatu urusan kecuali kepada orang yang memiliki kemampuan terhadap urusan tersebut”<sup>56</sup>

Kemudian Syaikh Kholaf dalam kitabnya menyebutkan :

Jika ada seseorang yang sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah disepakati tidak lantas secara langsung menjadi imam atas manusia yang memiliki hak untuk ditaati kecuali apabila ia telah *dibai'at* oleh *ahlu al Halli wa al Aqdi* (Istilah ini digunakan sebagai lembaga representatif umat yang mempunyai kedudukan di luar area kekuasaan eksekutif.)<sup>57</sup> yang telah dipilih oleh ummat dari kalangan orang-orang yang memiliki keadilan, ilmu, pandangan, dan memantau urusan ummat secara *syumul* dan urusan yang paling penting adalah pemilihan *Khilafah* dan pengukuhanannya.<sup>58</sup>

Syaikh Kholaf juga menambahkan bahwa kepemimpinan tertinggi ini dalam pemerintahan Islam adalah posisi tertinggi dari pemerintahan manapun.<sup>59</sup> Menurutny kekuasaan *Khalifah* berasal dari ummat yang terwakili oleh *ahlu al Halli wa al Aqdi*. Keberlangsungan kekuasaan ini bergantung pada kepercayaan mereka terhadap *Khalifah* dan pandangan *Khalifah* akan kemasalahatan ummat. Oleh karenanya ulama kaum muslimin memutuskan bahwa ummat memiliki hak untuk menurunkan *Khalifah* karena suatu sebab yang memang mengharuskannya. Maksudnya, jika mengakibatkan kepada fitnah maka ditimbang *mudharat* yang paling besar. Seperti yang dicontohkan oleh Abu Bakar Ash Shiddiq. Beliau merupakan orang pertama yang menjabat sebagai *Khalifah*, beliau mengatakan

<sup>56</sup> *Ibid.*, Hlm. 63

<sup>57</sup> Umarwan Sutopo, Lc. “*Fiqh Siyasah dan Ahlu al Halli wa al Aqdi*”.

<https://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2015/09/10/77819/fiqh-siyasah-dan-penerapan-ahlu-al-halli-wal-aqdi.html> di akses pada Rabu 28 Maret 2018

<sup>58</sup> Abdul Wahab Kholaf. Op. Cit. Hlm. 64

<sup>59</sup> *Ibid.*, Hal 65

diawal khutbahnya “*Wahai manusia, aku telah diangkat untuk mengurus kalian, sedang aku bukanlah orang terbaik diantara kalian. Jika aku benar maka bantu lah aku, sedang jika aku salah luruskan aku*”. Beliau pun menutup khutbahnya dengan mengatakan “*ta’atilah aku selama aku menaati Allah dan Rasul-Nya, jika aku bermaksiat maka tidak ada ketaatan kalian kapada ku.*” Hal ini diriwayatkan oleh Umar dan Utsman untuk menguatkan iman mereka terhadap kekuasaan yang diamanahkan kepada mereka dan untuk menjaga perasaan mereka atas tanggung jawab yang mereka emban dihadapan Allah sekaligus ummatnya.<sup>60</sup>

Sedangkan Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani menyebutkan yang dirangkum dalam kitab *Nidzom Al-Islam* menyebukan pasal-pasal dalam konsep Khilafah yang dikemukakan oleh HT. Pada dasarnya, akidah Islam harus menjadi dasar negara. Maksudnya adalah, akidah Islam menjadi asas undang-undang dasar dan perundang-undangan syar’i. Segala sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang dasar dan perundang-undangan, harus terpancar dari akidah Islam.<sup>61</sup>

Syaikh Taqiyuddin melanjutkan, dapat dikatakan sebagai *Daarul Islam* adalah ketika sebuah negara didalamnya diterapkan hukum-hukum Islam, dan keamanannya didasarkan pada keamanan Islam. Sedangkan *Daarul Kufr* adalah negara yang didalamnya diterapkan sistem kufur, dan sistem keamanannya berdasarkan selain keamanan Islam.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Taqiyuddin An-Nabhani (1953). “*Nizham Al-Islam*”. Hizbut Tahrir Indonesia. Jakarta. Hlm. 139

<sup>62</sup> *Ibid*

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Sub Bab ini menjelaskan tentang penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. Fungsi dari penelitian terdahulu adalah untuk dijadikan acuan dan kajian terhadap penelitian yang dilakukan sekarang. Dengan penelitian terdahulu dijadikan acuan, maka dapat diketahui perbedaan atau pembaharuan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang dilakukan. Sehingga penelitian terdahulu dapat dikatakan sebagai pembanding dengan penelitian sekarang. Penelitian terdahulu diambil dari berbagai penelitian yang membahas berbagai sudut pandang terhadap Hizbut Tahrir. Infiltrasi Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia, Aktivitas Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia, Konsep *Khilafah* yang ditawarkan Hizbut Tahrir, sampai Model Dakwah Hizbut Tahrir. Berikut penjelasan dari berbagai penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti:

- a. Sudarno Shobron, Jurnal: **“Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia”**<sup>63</sup>, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Jurnal penelitian dengan judul “Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia” dilakukan pada tahun 2014. Fokus yang digunakan oleh penelitian ini adalah mendeskripsikan model dakwah yang diaplikasikan oleh HTI sekaligus menjelaskan secara singkat operasional dakwah Rasulullah SAW yang diaplikasikan juga oleh HTI. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Terdapat 2 (dua) point penting dari hasil penelitian ini, *pertama* sejarah terkait masuknya HTI ke kalangan masyarakat di Indonesia melalui mahasiswa,

---

<sup>63</sup> Sudarno Shobron (2014), Jurnal: *“Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia”*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta



bahwa Hizbut Tahrir Indonesia masuk ke Indonesia sejak tahun 1983 di Bogor. Abdurrahman al-Baghdadi, seorang mubaligh sekaligus Aktivis Hizbut Tahrir dari Australia yang berasal dari Yordania. Beliau datang ke Pondok Pesantren al-Ghazali IPB yang kemudian menjadi tempat penyemaian ide-ide HT kepada Mahasiswa. Mahasiswa yang telah menerima dakwah tentang seluk beluk HT memiliki tugas memperkenalkan HT kepada aktivis mahasiswa lain diluar perguruan tinggi yang aktif di Lembaga Dakwah Kampus (LDK), misal Universitas Padjajaran (UNPAD), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan lain-lainnya. LDK yang telah menerima ideologi HT, secara kelembagaan berkembang menjadi Forum Silaturrahim Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) pada tahun 1986. Muhammad Ismail Yusanto merupakan salah satu pendiri FSLDK itu sendiri.

*Kedua*, Model dakwah HTI itu sendiri. Salah satu tujuan HTI yakni mendirikan *ad-daulah al-islamiyyah* dengan sistem *Khilafah* adalah agar memudahkan dakwah *amar ma'ruf nahyi munkar*. Bagi HTI, dakwah yang dilakukan oleh pemilik kekuasaan akan lebih efektif dibandingkan dakwah yang dilakukan oleh yang tidak memiliki kekuasaan. Penguasa memiliki *power* dapat menyusun undang-undang atau *dustur* atau *qanun* dapat disusun berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, bahkan syariat Islam dapat dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. HTI mengikuti metode dakwah Rasulullah SAW, karena beliau adalah contoh teladan yang baik (QS Azhab/33:21). HT menerapkan operasionalisasi dakwah Rasulullah SAW yang dibagi menjadi dalam tiga tahap yakni:

1. Tahap *tatsqif* (pembinaan dan pengkaderan). Pada tahap ini dakwah dilakukan dengan mengundang orang-orang datang kerumah, dan pada saat lain Rasulullah mendatangi orang-orang kerumah, mengajak mereka masuk Islam, membangun keimanan dan pemahaman akan makna kalimah tahlil
2. Tahap *tafa'ul* (bertinteraksi) dengan ummat, agar ummat melaksanakan ajaran Islam dengan baik dalam kehidupannya. Pada tahap ini ada tahap perjuangan politik, karena berhadapan dengan pemimpin kafir quraaisy yang secara sosiologis telah mapan dalam masyarakat, dan secara teologis telah memiliki keyakinan sendiri. Dakwah dalam tahap kedua ini penuh dengan perjuangan, dan dinamika karena tidak mudah merubah masyarakat yang terbelenggu oleh kekuasaan dan keyakinan tradisional untuk menjadi orang yang beriman kepada satu Tuhan, Allah SWT.
3. Tahap *istilaamu al-hukmi* (penerimaan kekuasaan), untuk menerapkan Islam secara praktis dan menyeluruh serta mendakwahkan risalah Islamiyyah keseluruh dunia.

Hal yang membedakan penelitian peneliti dengan penelitian ini yakni dalam sisi strategi yang digunakan oleh HTI dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Kota Malang.

- b. Dedy Slamet Riyadi, Skripsi: “**Analisis Terhadap Konsep *Khilafah* Menurut Hizbut Tahrir**”<sup>64</sup>, Semarang, IAIN Walisongo.

---

<sup>64</sup> Dedy Slamet Riyadi (2008), Skripsi: “*Analisis Terhadap Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir*”, Semarang, IAIN Walisongo, [library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=19234](http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=19234) diakses pada 10 Mei 2017 pukul 13.05 WIB

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa HT berpandangan bahwa Islam telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk pemerintahan dengan sistem *Khilafah*. Sistem *Khilafah* ini satu-satunya sistem pemerintahan bagi daulah Islam.

Sistem *Khilafah* berbeda dengan sistem pemerintahan yang lain, dalam penelitian ini kitab *Nadham al-Hukm fii al-Islaam* disebutkan menjadi rujukan utama HT dalam memperjuangkan politiknya, bahwa:

“... sistem pemerintahan dalam Islam adalah sistem *Khilafah* ... Sistem *Khilafah* adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia ...”

*Khilafah* merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam. *Khilafah* juga mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad.

Hizbut Tahrir ataupun HTI, dengan konsep *Khilafahnya* menggunakan pendekatan idealistik yakni cenderung melakukan idealisasi terhadap sistem pemerintahan dengan menawarkan formula sistem pemerintahan Islam yang ideal meskipun belum pernah terwujud dalam praktek nyata. HTI mengklaim bahwa ke*Khilafahan* memiliki dimensi-dimensi positif yang tidak dimiliki oleh bentuk negara dengan batas-batas seperti sekarang ini. Negara-negara lain merupakan bagian dari negara *Khilafah*. Sementara itu, dalam bentuk negara modern sekarang ini satu negara mendominasi negara lain berdasarkan kepentingan-kepentingan nasionalnya. Dengan sistem ke*Khilafahan* dapat dihindari dominasi dan hegemoni satu negara kepada negara lain dalam bentuk kolonialisme fisik maupun nonfisik. Persoalannya, apakah negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam yang ada

saat ini yang sudah mapan dalam bentuk *nation state* (negara nasional) rela meleburkan diri atau menjadi bagian dari negara *Khilafah*.

Hal yang membedakan penelitian peneliti dengan penelitian ini yakni, sudut pandang peneliti terhadap Hizbut Tahrir dalam konteks gerakan sosial yang mensosialisasikan pemikiran *Khilafah* kepada masyarakat luas.

- c. Erni Sari Dwi Devi Lubis dan Ma'ruf Jamu'in, Jurnal: **"Infiltrasi Pemikiran Gerakan HTI di Indonesia"**,<sup>65</sup> Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa HTI melakukan infiltrasi *door to door* melalui masjid-masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan. Infiltrasi HTI terlihat jelas ketika anggotanya merambah ke sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi Islam. HTI juga menyusup kedalam organisasi masyarakat besar seperti NU dan Muhammadiyah. Mantan Ketua Umum PBNU (alm) KH. Hasyim Muzadi menyebutkan bahwa masjid-masjid yang selama ini dibangun dan dikelola oleh warga NU beserta takmir dan ritual peribadatannya telah diambil alih oleh HTI. Selain melakukan infiltrasi ke dua organisasi besar Islam tersebut, HTI juga telah merambah ke dunia Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai organisasi terkuat di Indonesia karena keterkaitannya dengan pemerintah, sejak awal didirikan diniatkan sebagai instrumen pemerintah otoriter untuk menyangga kekuasaan dan mejinakkan gerakan keagamaan anti pemerintah, maka ia memiliki fasilitas yang sangat besar. Bagi MUI, ormas ataupun doktrin dan aqidah agamanya benar menurutnya, maka

<sup>65</sup> Erni Sari Dwi Devi Lubis dan Ma'ruf Jamu'in (2015), Jurnal: **"Infiltrasi Pemikiran Gerakan HTI di Indonesia"**, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

bisa bergabung tanpa mempertimbangkan jumlah anggota organisasinya. Demikian nasib mujur yang dirasakan HTI, meskipun mereka memandang demokrasi haram namun ia memiliki aqidah yang benar dipadangan MUI maka anggotanya mampu menggurita di struktur MUI dari pusat sampai daerah.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan diatas maka kemudian dapat dipastikan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara penelitian-penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang akan peneliti bawakan nantinya. Pada beberapa penelitian diatas ruang lingkupnya hanya beririsan secara parsial dengan penelitian yang akan peneliti bawakan. Pada penelitian pertama, secara umum hanya membahas model dakwah HTI yang mereka terapkan. Sementara dalam penelitian yang peneliti bawakan, penelitian yang akan diteliti adalah berkaitan dengan caranya HTI untuk mensosialisasikan pemikiran khilfahnya kepada khalayak di Kota Malang. Jika dibandingkan, maka penelitian peneliti lebih spesifik dari model dakwah yang dilakukan oleh HTI. Penelitian peneliti lebih membuka bagaimana strategi yang dilakukan HTI untuk mensosialisasikan pemikiran *Khilafah*nya. Tidak model dakwahnya secara umum.

Kemudian pada penelitian yang kedua, pembahasan yang diulas hanya sebatas hal-hal naratif terkait konsep *Khilafah* yang dituju oleh HTI. Dalam penelitian ini peneliti hanya mendapatkan wawasan baru saja, namun menjadi dasar pandangan HTI terhadap bentuk *Khilafah* yang mereka inginkan. Pada penelitian ini tidak begitu dijelaskan bagaimana bentuk sosialisasi yang mereka lakukan.

Selanjutnya penelitian ketiga yang peneliti pilih, didalamnya hanya membahas infiltrasi yang dilakukan kader-kader HTI di Indonesia. Penelitian



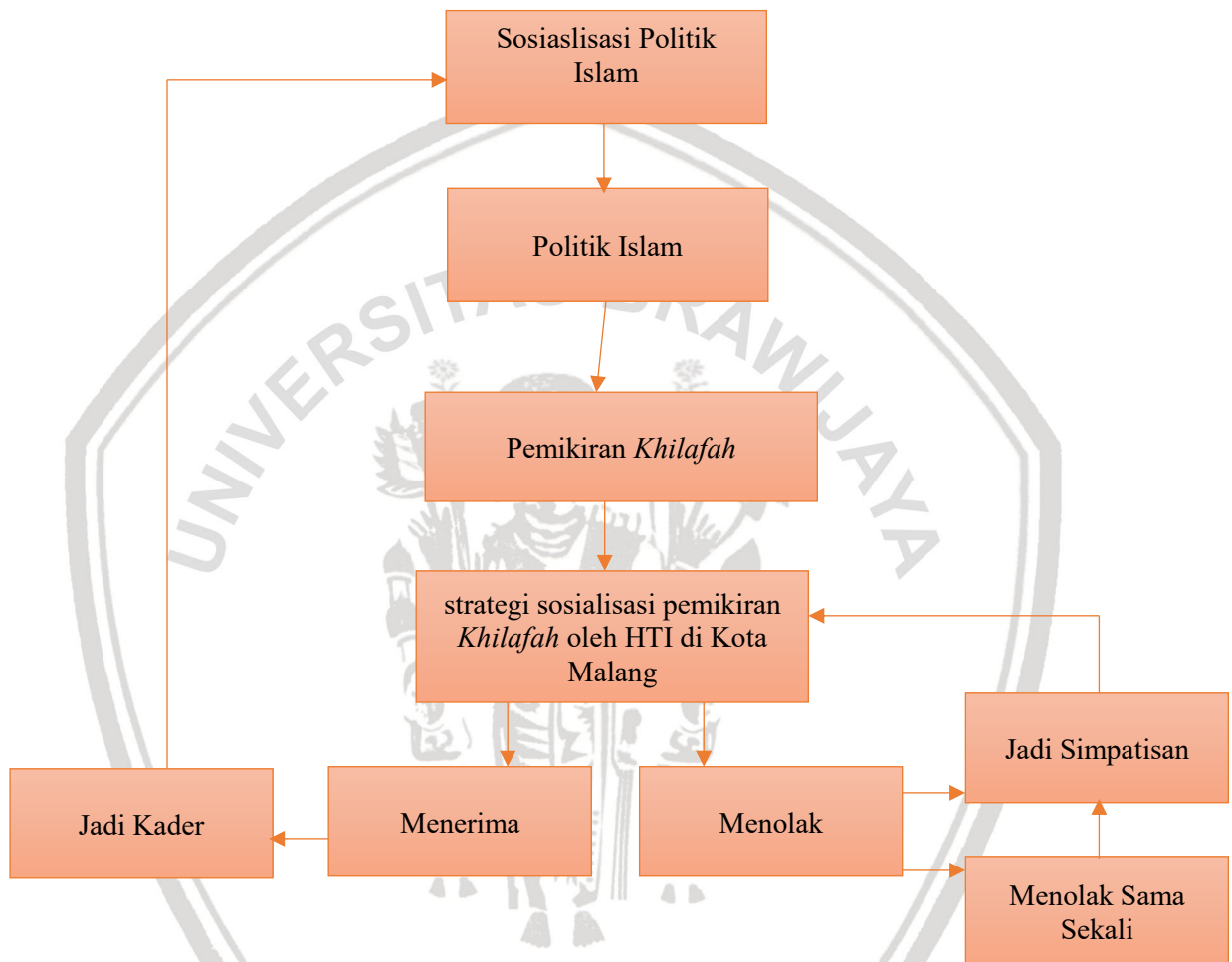
tersebut menjelaskan bersebarunya HTI di organisasi-organisasasi keislaman di Indonesia, masjid-masjid bahkan perkantoran. Namun tidak dijelaskan secara rigit bentuk apa saja yang mereka lakukan sambil melakukan infiltrasi tersebut.

Akhirnya, pada bagian ini peneliti kemudian mengaskan bahwa antara penelitian yang peneliti bawakan dengan penelitian terdahulu memiliki perbedaan. Posisi peneliti dalam hal ini berfokus pada objek penelitian tentang sosialisasi pemikiran *Khilafah* oleh HTI di Kota Malang.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah alur pikir yang digunakan oleh peneliti terhadap penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi Hizbut Tahrir dalam mensosialisasikan pemikiran *Khilafah* di Indonesia dengan menggunakan pisau analisis teori gerakan sosial yang ditambah dengan kerangka konseptual berupa penjabaran tentang *Khilafah* dan Hizbut Tahrir Indonesia.

**Bagan 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber: Diolah oleh peneliti, tahun 2018

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat dijelaskan bahwa gerakan Hizbut Tahrir ini membawa ideologi, nilai-nilai yang mereka perjuangkan untuk disosialisasikan kepada masyarakat di Indonesia dalam hal ini Kota Malang. Tentunya, dalam mensosialisasikan hal tersebut dibutuhkan strategi agar dapat diukur keberhasilannya. Mengingat, proses sosialisasi adalah proses tahap penjajakan agar supaya objek dari agenda sosialisasi tersebut dapat terus bertambah

banyak sehingga nantinya bisa menjadi bagian yang bisa mensosialisasikan hal yang sama kepada objek-objek yang baru. Secara pasti, dapat dikatakan bahwa objek dari sosialisasi pemikiran ini jika objek tersebut secara langsung menerima pemikiran tersebut, ia dijadikan sebagai kader. Jika menolak namun mau menjadi seorang simpatisan, ia akan terus didakwahi hingga akhirnya mejadi kader. Bahkan bagi mereka yang menolak sama sekali akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang menolak, namun hanya ingin menjadi simpatisan.

Saat membuat strategi agar sosialisasi ini terukur dan efektif, maka seharusnya Hizbut Tahrir melihat kultur dari masyarakat Kota Malang itu sendiri. Masyarakat Kota Malang yang mayoritas *Nadhliyyin* akan menjadi tantangan tersendiri bagi Hizbut Tahrir untuk mensosialisasikan pemikiran *Khilafah* ini. Karena, peneliti berpandangan bahwa *Nadhliyyin* di Kota Malang ini sangat resisten terhadap isu *Khilafah* yang canangkan oleh Hizbut Tahrir. Oleh karenanya, sangat dibutuhkan strategi yang terukur serta efektif agar yang diusahakan oleh Hizbut Tahrir dapat menghasilkan hasil yang memang diharapkan.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Secara lebih rinci, Cresswell mendefinisikan Penelitian Kualitatif sebagai berikut<sup>1</sup>:

Cresswell menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan disajikan secara kompleks, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam setting ilmiah yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti.

Lebih mendalam lagi, Cresswell menjelaskan bahwa sesungguhnya dinamika permasalahan manusia tidak terlepas dari konteks sosial dan budaya yang melingkupinya. Oleh karena itu, apapun sikap yang dimunculkan beserta sudut pandang seorang individu sangat dipengaruhi oleh latar sosial, kondisi sosial dan budaya masing-masing. Penelitian menggunakan metode kualitatif mengacu kepada berbagai cara pengumpulan yang berbeda, meliputi penelitian lapangan, observasi partisipan, wawancara secara mendalam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Herdiansyah, Haris. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu – Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika. Halaman: 8

<sup>2</sup> Bruce A. Chadwick, Howard M. Bahr, Stan L. Albrecht. 1991. *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial* (Penerjemah: Sulistia, Yan Mujiyanto, Ahmad Sofwan, Suhardjito). Semarang: IKIP Semarang Press.



### 3.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Malang, Jawa Timur. Diantaranya dilingkupan DPD HTI Kota Malang dan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia yang berada di Kota Malang. Pemilihan lokasi penelitian ini dipilih karena peneliti memandang, terdapat pemimpin-pemimpin HTI di Kota Malang yang paham bagaimana mengeksekusi strategi yang sudah disiapkan untuk melakukan sosialisasi pemikiran khilafah di Kota Malang untuk kalangan umum bahkan mahasiswa sekalipun.

### 3.3 Fokus Penelitian

**Tabel 3.1**  
**Fokus Penelitian**

No	Rumusan Masalah	Indikator Fokus	Metode
1.	Bagaimana strategi sosialisasi pemikiran <i>Khilafah</i> oleh HTI kota Malang?.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strategi yang diupayakan HTI dalam mensosialisasi pemikiran <i>Khilafah</i></li> <li>2. Strategi yang diupayakan dalam melakukan <i>followup</i> dari sosialisasi pemikirannya</li> <li>3. Strategi yang diupayakan oleh HTI dalam menjaga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Studi Pustaka dengan menganalisis berbagai buku <i>manhaj</i> yang digunakan HTI</li> <li>2. Wawancara kepada informan dengan cara <i>Purposive Sampling</i></li> <li>3. Dokumentasi, dengan</li> </ol>

		<p>gerakannya agar terus berjalan</p> <p>4. Implementasi dari strategi yang diupayakan oleh HTI</p>	<p>menganalisis dokumen yang telah dibuat</p> <p>4. Observasi, dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan</p>
--	--	---	---

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2018

### 3.4 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif merupakan hal pokok dalam mendapatkan data penelitian. Untuk menentukan informan, Peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Dalam metode *purposive sampling*, informan ditentukan dengan sengaja oleh Peneliti sesuai dengan tujuan atau permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Peneliti memilih orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi, memberikan pandangan tentang nilai, sikap dan segala informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Data dari informan dalam penelitian kualitatif juga harus jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dibutuhkan untuk menentukan atau memilih informan agar nantinya data yang diperoleh dapat lebih tepat dan akurat.

Terdapat dua jenis informan dalam penelitian ini, yaitu informan kunci atau informan inti dan informan tambahan. Berkenaan dengan metode kualitatif, maka dalam teknik penentuan informan yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci atau informan inti yang memiliki banyak informasi tentang fokus dari penelitian. Informan kunci adalah orang yang mampu memahami masalah

penelitian. Telah cukup lama dan intensif mengetahui tentang masalah penelitian serta informan harus terlibat penuh dan aktif dalam kegiatan yang menjadi perhatian peneliti. Dalam penelitian ini informan kunci yang ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Ketua Gema Pembebasan Kota Malang. Gema Pembebasan Kota Malang merupakan salah satu sayap organisasi dari HTI Kota Malang. GP berfokus kepada gerakan mahasiswa dan rekrutmen HTI dari tingkat mahasiswa. Peneliti berpandangan, karena salah satu cara kaderisasi tiap gerakan melalui mahasiswa maka Ketua GP Kota Malang merupakan variabel penting untuk dijadikan informan terhadap penelitian ini
2. Mantan Kader HTI dan Gema Pembebasan Kota Malang. Merupakan salah satu informan yang menjelaskan bagaimana proses HTI dan Gema Pembebasan melakukan sosialisasi pemikirannya sehingga menjadi variabel penting dalam penelitian ini.

Sedangkan informan tambahan dalam penelitian ini adalah para tokoh-tokoh HTI di Kota Malang, seperti kader HTI dan GP Kota Malang, juga beberapa mantan objek dakwah dari HTI itu sendiri.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang nantinya diolah dan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan sesuatu.<sup>3</sup> Teknik pengumpulan data dapat diperoleh dengan menggunakan berbagai sarana informasi yaitu berupa

---

<sup>3</sup> Herdiansyah, Haris. Op.Cit. Hal. 116

data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara langsung kepada informan kunci dan informan tambahan, observasi dan studi dokumentasi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

#### 3.5.(a). Studi Kepustakaan

Studi literatur merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang berasal dari berbagai referensi yang berisikan teori dan konsep yang relevan dengan fenomena atau permasalahan yang dibahas dalam peneliti ini. Peneliti menggunakan sejumlah literatur yang sesuai dan relevan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti. Salah satu literatur yang dipilih adalah buku yang berjudul *Mafahim Hizbut Tahrir* yang ditulis oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Menurut peneliti, buku tersebut merupakan salah satu buku yang dapat menjelaskan secara mendalam terhadap Hizbut Tahrir. Buku ini menjadi penunjang langsung, karena peneliti dari buku tersebut merupakan pendiri dari Hizbut Tahrir, sehingga sangat relevan dengan yang menjadi bahasan dalam penelitian ini.

#### 3.5.(b). Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri *self report*, atau setidaknya tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. <sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta : Bandung. Hlm. 138

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan media yang bisa digunakan.

Wawancara dilakukan secara mendalam dan diskusi kepada banyak informan. Informan yang diwawancarai tentunya adalah informan yang memahami tentang masalah yang menjadi perhatian peneliti yaitu tentang bentuk sosialisasi pemikiran *Khilafah* oleh HTI di Kota Malang. Jumlah dari informan ditentukan sesuai dengan keperluan penelitian. Wawancara dihentikan ketika informasi yang diterima peneliti sudah dirasa cukup.

### 3.5.(c). Observasi

Selain wawancara, dalam penelitian menggunakan metode kualitatif juga dapat menggunakan observasi dalam pengumpulan data. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara. Kalau wawancara selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek – objek alam yang lainnya. Sutrisno Hadi mengemukakan observasi sebagai berikut :

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses – proses pengamatan dan ingatan.<sup>5</sup>

Dalam proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi observasi berperan serta dan observasi tidak berperan serta, selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Teknik pengumpulan data dengan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hal. 145



observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala – gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

### 3.5.(d). Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen–dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti yang menggunakan metode kuantitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Data yang diperoleh dari studi dokumentasi, nantinya akan digabungkan dengan data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung maupun observasi guna untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian. Studi dokumentasi didapat dari berbagai sumber, baik digital maupun non digital, antara lain sebagai berikut :

1. Buku, artikel maupun jurnal yang sesuai dengan fokus dari penelitian tentang Sosialisasi Pemikiran *Khilafah* oleh HTI di Kota Malang.
2. Dokumen resmi terkait dengan fokus penelitian. Dokumen resmi dipandang mampu memberikan gambaran mengenai aktivitas, keterlibatan individu pada suatu kegiatan tertentu dalam setting sosial.<sup>7</sup>
3. Informasi dari berita yang berkaitan tentang fokus dari penelitian ini.

---

<sup>6</sup> Herdiansyah, Haris. Op.Cit. Hal. 143

<sup>7</sup> *Ibid.*, Hal. 146

4. Informasi dari internet atau website yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan untuk menguraikan dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dapat dengan mudah dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama. Sehingga hasil dari analisis data yang baik adalah data olah yang tepat dan dimaknai sama atau relatif sama dan tidak tidak bias atau menimbulkan perspektif yang berbeda - beda.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar. Artinya pada penelitian ini dibutuhkan pengutamaan penghayatan dan usaha memahami faktor peristiwa dalam situasi tertentu. Selanjutnya, setelah data tersusun teratur dan sistematis, dilakukan analisis data yang selanjutnya menghasilkan suatu kesimpulan terhadap data yang diteliti sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh peneliti.

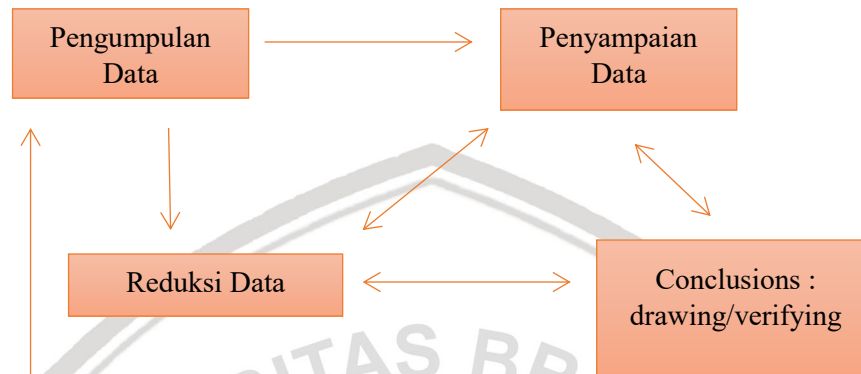
Dalam penelitian tentang sosialisasi pemikiran *Khilafah* oleh Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Malang ini, digunakan teknis analisis data model interaktif *Miles* dan *Huberman*. Teknik analisis data model *Miles* dan *Huberman* terdiri atas empat tahapan yang harus dilakukan. Tahapan pertama adalah tahapan pengumpulan data, kedua adalah tahap reduksi data, ketiga adalah tahapan *display*, dan tahapan keempat adalah tahapan penarikan kesimpulan atau tahap verifikasi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Sugiyono (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. Hal. 164

### Bagan 3.1

#### Alur Teknis Pengolahan Data Model *Mils dan Huberman*



Sumber: Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Tahun 2013

#### 1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti hadir sebagai salah satu instrumen penelitian dalam usaha untuk mendapatkan data di lapangan. Dalam proses pengumpulan data ini, peneliti melakukan pengumpulan data sejak sebelum penelitian ini dimulai. Pada awal penelitian kualitatif, umumnya peneliti melakukan studi *pre elimenary* yang berfungsi untuk verivikasi dan pembuktian awal bahwa fenomena yang diteliti itu benar-benar ada.

Oleh sebab itu, dalam tahap ini peneliti dituntut untuk mendaptkan data yang dapat menggambarkan fenomena yang dapat mewakili fakta lapangan untuk dapat dianalisis. Seluruh data yang telah diperoleh semenjak sebelum dimulainya penelitian hingga proses pencarian data ketika dilapangan setelah penelitian dimulai melalui wawancara, observasi dan lain sebagainya. Ketika seluruh data dirasa cukup menjadi bahan analisis oleh peneliti, maka tahap berikutnya adalah melakukan analisis pada tahap reduksi data.

## 2. Reduksi Data

Dalam proses reduksi data yakni difokuskan pada proses pemilihan dan pemusatan yang dilakukan dengan memberikan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data yang masih kasar. Inti dari reduksi data disini yakni proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (*script*) yang akan di analisis.<sup>9</sup>

Setiap hasil dari pengumpulan data kemudian akan diolah sebelumnya sesuai dengan metode pengumpulan data yang digunakan, baik itu wawancara, observasi langsung hingga dalam bentuk berbagai dokumen tertulis. Segala bentuk data yang diperoleh dalam proses pengumpulan data dituangkan dalam bentuk tulisan yang kemudian formatnya disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

## 3. Penyampaian Data

Setelah proses pengumpulan data selesai beserta proses reduksi data telah diselesaikan dalam bentuk tulisan sesuai dengan bentuk instrumen penelitian yang digunakan. Kemudian dilakukan tahap penyajian data (*display data*) dalam tiga tahap yakni kategori tema, sub kategori tema, dan proses pengodean. Dalam tahap penyajian data ini dilakukan dalam usaha untuk memberikan pengolahan data yang telah direduksi agar seragam dan memiliki tema yang jelas dan konkret serta lebih sederhana. Berikut beberapa ketiga tahapan dalam proses penyajian data:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.* Hal. 165

<sup>10</sup> *Ibid.*, Hlm. 176

- a. Kategori tema merupakan proses pengelompokan tema-tema yang telah disusun dalam tabel akumulasi tema wawancara kedalam suatu matriks kategorisasi
- b. Subkategori tema adalah proses lanjutan setelah melakukan pengelompokan tema kemudian data dikelompokkan kembali kedalam subtema yang lebih kecil, sederhana dan lebih bersifat praktis.
- c. Proses pengkodean yakni inti dalam proses ini adalah mencamtumkan pernyataan subjek sesuai dengan kategori tema dan subkategori temanya kedalam matriks kategorisasi serta memberikan kategori tertentu pada setiap pernyataan-pernyataan subjek.

#### 4. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan metode analisis data interaktif *Miles* dan *Huberman* pada tahap ini merupakan tahap ketika pengumpulan data dilakukan, terlebih dahulu mencari arti dari setiap makna fenomena, mencatat keteraturan, pola - pola, penjelasan, konfigurasi. Dalam desain analisis data interaktif *Miles* dan *Huberman* pada intinya terdapat tiga proses untuk menarik sebuah kesimpulan sekaligus verifikasi data yang telah diperoleh dan dianalisis.

Ketiga proses tersebut diantaranya yakni, *Pertama* menguraikan setiap data atas tema dan subkategori tema bersama dengan verbatim dari setiap instrumen yang digunakan. *Kedua*, dalam penelitian yang telah disusun, terdapat beberapa pertanyaan yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam tahap ini peneliti harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan berbagai faktor hingga komponen yang terlibat dan mempengaruhi jawaban dari setiap pertanyaan yang



telah disusun. *Ketiga*, peneliti harus mampu menjelaskan kesimpulan dari jawaban yang telah disusun dari setiap pertanyaan dari penelitian.

### 3.7 Validitas Data

Dalam sebuah penelitian, terdapat metode yang dikenal dengan validitas data. Hal ini bertujuan untuk menentukan keabsahan data yang diperoleh, melalui teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori.

Triangulasi sumber adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan dan mengecek ulang kebenaran suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.<sup>11</sup> Keabsahan data ini pada akhirnya akan berkaitan dengan valid tidaknya suatu data, yang bertujuan untuk mendapatkan data yang benar-benar mendukung dan sesuai dengan fokus permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Menurut Moleong hal ini dapat dicapai dengan cara<sup>12</sup>:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan;

---

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong (2006), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 350

<sup>12</sup> *Ibid.*

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi Teori yaitu peneliti akan menganalisa temuan-temuan di lapangan yang berhubungan dengan penelitian. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengamati dan memahami fenomena yang diangkat dalam penelitian ini, yang kemudian membandingkan dengan teori yang sudah ada sebelumnya.



## BAB IV

### PROFIL HIZBUT TAHRIR INDONESIA

#### 4.1 Sekilas Tentang Hizbut Tahrir

##### 4.1.(a) Sejarah Berdirinya Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir atau *Hizb ut-Tahrir* (حزب التحرير) atau partai pembebasan awalnya bernama Partai Pembebasan Islam (*Hizb ut-tahrir al-islami*)<sup>1</sup>. Hizbut Tahrir didirikan pada tahun 1953 M/ 1372 H oleh Syaikh Taqiyuddin bin Ibrahim bin Mushtafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani, yaitu seorang Qadhi pada mahkamah *Isti'naf* (Mahkamah Agung) di al-Quds. Beliau merupakan kelahiran Ijzim, Haifa, Palestina dan alumnus Universitas Al Azhar Kairo Mesir.<sup>2</sup>

Hizbut Tahrir merupakan bukan sebuah organisasi kerohanian, melainkan organisasi politik yang bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang sangat parah, membebaskan ummat Islam dari ide-ide, sistem perundang-undangan, hukum-hukum kufr, serta membebaskan mereka dari cengraman dominasi dan pengaruh negara-negara Barat. Selain itu kemunculan Hizbut Tahrir juga bermaksud untuk membangun kembali Daulah Islamiyyah di muka bumi, sehingga urusan pemerintahan dapat dijalankan kembali sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Hizbut\\_Tahrir](https://id.wikipedia.org/wiki/Hizbut_Tahrir) di akses pada 15 Januari 2018 pukul 17.05 WIB

<sup>2</sup> Hussain (2012), *Menuju Jama'atul Muslimin*, Robbani Press: Jakarta.

<sup>3</sup> Tim Hizbut Tahrir (2007), *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, Thariqul Izzah: Bogor. Hal. 4

Semenjak terjadinya perang dunia I dan II, keadaan yang semula hidup dalam system dan kultur Islam mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan adanya aksi pendudukan negara-negara Barat, mulai dari Jazirah Arab, Afrika dan kawasan Asia tenggara. Pendudukan ini tidak saja mengambil alih kekuasaan, akan tetapi juga berbagai upaya negara Barat untuk meruntuhkan simbol kekuasaan kaum Muslim. Hal ini dibuktikan dengan semakin gencarnya negara-negara Barat dalam melancarkan paham dan doktrin nasionalisme<sup>4</sup>

Untuk merespon hegemoni Barat itulah lahir berbagai gerakan Islam yang menamakan diriya sebagai kelompok atau partai. Namun munculnya kelompok maupun partai-partai ini sangat disayangkan, karena masih sangat mudah dipatahkan oleh Barat, sehingga pergerakannya tidak bisa optimal. Berangkat dari perjuangan ideologis dan berbekal pengalaman kegagalan dari sejumlah gerakan Islam, muncullah keinginan sebagian ulama yang dipelopori oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani untuk mendirikan partai. Hizbut Tahrir sebagai gerakan yang meluruskan dan bertujuan untuk menegakkan kembali kejayaan Islam dengan menegakkan kembali khalifah Islamiyah<sup>5</sup>. Selain itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Taqiyuddin an-Nabhani bahwasannya berdirinya Hizbut Tahrir disebabkan oleh beberapa hal<sup>6</sup>:

- a. Bahwasannya dunia Barat yang dengki dan membenci Islam dan Kaum Muslim terus menerus menyerang agama Islam. Satu sisi mereka mencela

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, Hlm. 9

<sup>5</sup> Tim Hizbut Tahrir, Loc. Cit.

<sup>6</sup> Abdullah (2008), *Mafahim Hizbut Tahrir*. Hizbut Tahrir Indonesia: Jakarta. Hal. 13-20

Islam dengan cara meng-ada-ada-kan sesuatu yang tidak ada dalam Islam, sementara disisi lain mereka menjelek-jelek-an sebagian hukum-hukum Islam, padahal semuanya adalah hukum-hukum yang tidak diragukan lagi kebenarannya dalam memecahkan masalah dan persoalan hidup

- b. Sebagai alat menyusutnya Daulah Islamiyyah karena banyaknya negeri-negeri Islam yang melepaskan diri lalu tunduk kepada pemerintahan kufur. Apalagi disusul dengan runtuh dan lenyapnya Daulah Islamiyyah, maka terciptalah dalam benak muslimin gambaran yang memustahilkan terwujudnya kembali Daulah Islamiyyah berikut terlaksananya kembali hukum Islam sebagai satu-satunya hukum yang harus diterapkan. Inilah yang mengakibatkan mereka bersedia menerima begitu saja hukum lain yang bukan berasal dari Allah Swt.

Atas dasar inilah Hizbut Tahrir berdiri. Hizbut Tahrir berusaha untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam di kawasan negeri-negeri Arab. Dari sanalah tujuan untuk melangsungkan kehidupan Islam di seluruh dunia Islam secara alami akan tercapai, yaitu dengan jalan mendirikan Daulah Islamiyah di satu atau beberapa wilayah sebagai titik sentral Islam dan sebagai benih berdirinya Daulah Islamiyah yang besar yang akan mengembalikan kehidupan Islam, dengan menerapkan Islam secara sempurna di seluruh negeri-negeri Islam, serta mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.

Sepeninggal Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, tonggak kepemimpinan Hizbut Tahrir digantikan oleh Syekh Abdul Qadim Zallum. Pandangan-pandangan kedua tokoh dapat dilihat dari buku-buku yang sudah diterbitkan oleh Hizbut



Tahrir melalui HTI Press. Sepeninggal kepemimpinan kedua pada tahun 2003, Hizbut Tahrir dipimpin oleh Syekh A. Abu Rostah secara Internasional hingga saat ini.

#### **4.1.(b) Sejarah Masuknya Hizbut Tahrir Indonesia ke Indonesia**

Masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia diperkirakan pada awal tahun 1980-an, disaat Abdurrahman al-Baghdadi, seorang warga negara Australia keturunan Arab, atas bantuan K.H. Abdullah bin Nuh, pendiri pesantren Al-Ghazali Bogor, mengajaknya tinggal di Indonesia, mulai melakukan safari dakwah dan memperkenalkan Hizbut Tahrir ke berbagai pesantren dan kampus-kampus Indonesia.

Berawal dari para aktivis masjid kampus Al-Ghifari, IPB Bogor, kemudian dibentuklah sebuah halaqah-halaqah (pengajian-pengajian kecil) untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan Hizbut Tahrir. Setelah secara bertahap melakukan pengkaderan dan pergerakan “bawah tanah”, saat ini Hizbut Tahrir telah tersebar di 150 kota di seluruh Indonesia. Bahkan cabang Hizbut Tahrir telah tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia, termasuk di Papua dan bahkan “pulau dewa” Bali.

Menjelang pertengahan tahun 1990-an, ide-ide Hizbut Tahrir mulai menyebar ke berbagai lapisan masyarakat, baik melalui dakwah para kader di mesjid, perkantoran, pabrik, dan perumahan, maupun melalui penerbitan buku-buku, bulletin Al-Islam, dan majalah bulanan Al-Wa'ie, yang membahas tema-tema

khlas, yang menjadi acuan dalam berbagai kegiatan diskusi, seminar, dan bahkan aksi unjuk rasa.<sup>7</sup>

Ketika Indonesia memasuki era reformasi, suatu momentum terbuka luas bagi Hizbut Tahrir untuk memperluas gerakannya. Gebrakan besar dilakukan Hizbut Tahrir pada tahun 2002 dengan sukses menggelar Konferensi *Khilafah Islamiyyah* Internasional di Senayan, Jakarta. Tidak kurang dari 5000 massa aksi yang tergalang sebagai kader serta simpatisan Hizbut Tahrir hadir. Sukses tersebut berlanjut dengan aksi protes kepada Amerika Serikat atas penyerangan AS kepada Afghanistan. Gerakan Hizbut Tahrir semakin terkemuka dengan berhasilnya Hizbut Tahrir menggelar *Long March* dari Monas ke Bundaran HI dengan melibatkan 20.000 orang yang terhimpun sebagai kader dan simpatisan dengan agenda penegakkan syariat Islam dan *Khilafah*<sup>8</sup>

Sejak diselenggarakannya Konferensi Internasional di Istora Senayan pada 2002 yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Hizbut Tahrir nasional maupun Internasional, serta tokoh-tokoh Islam dari gerakan lain, Hizbut Tahrir resmi melakukan aktifitasnya secara terbuka seperti bisa dilihat dari munculnya organisasi ini dalam konteks Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI.

Lahirnya HTI di Indonesia langsung memproklamirkan diri sebagai partai politik yang berideologi Islam, namun menolak bergabung dengan sistem politik

---

<sup>7</sup> Kurniawan Abdullah (2003), Tesis, *Gerakan Politik Islam Ekstra Parlemen: Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia*. UI. Hlm. 49

<sup>8</sup> Abdullah (2008). Op. Cit.

yang ada. Karena Indonesia menganut sistem politik ciptaan kaum Kafir seperti demokrasi dan sebagainya. HTI termasuk sangat berkembang pesat di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dari kuantitas anggotanya dan intensitas kegiatan HTI di ruang publik, seperti seminar, pawai, dialog, diskusi publik, serta proliferasi media diberbagai daerah di Indonesia.

#### 4.1. (c) Karakteristik Dakwah Hizbut Tahrir

Nurfitriani<sup>9</sup> dalam skripsinya menyebutkan bahwa HTI merupakan sebuah partai politik yang berideologi Islam.<sup>10</sup> Politik merupakan kegiatannya, Islam adalah ideologinya. Ia menyampaikan beberapa gambaran umum mengenai karakteristik pemikiran dan gerakan dakwah Hizbut Tahrir yang dituang dalam tabel berikut ini:

No	Klasifikasi	Deskripsi
1.	<i>Dakwah Group – but also Political Party</i>	Hizbut Tahrir adalah kelompok dakwah, yang diperintahkan menasehati apa saja (QS. 3:104), sedang yang paling berhak dinasehati itu adalah penguasa, yang mengurus segala masalah ummat (tanpa dibatasi). Maka dakwah seperti ini bisa disebut sebagai aktivitas politik, dan kelompoknya bisa disebut sebagai partai politik.
2.	<i>Politic – but smarting the people</i>	Aktivitas politik Hizbut Tahrir adalah “ <i>high-politic</i> ” atau “ <i>smart and smarting politics</i> ”. Hizbut Tahrir mendidik masyarakat agar sadar bisa mengawasi penguasanya, agar memerintah sesuai dengan Islam. Bagi Hizbut Tahrir sudah cukup masyarakat bersama penguasanya berjalan Islami, tanpa harus berkuasa sendiri.

<sup>9</sup> Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar

<sup>10</sup> Nurfitriani (2016), Skripsi: “Dakwah HTI Berbasis Multimedia (analisis Framing dakwah HTI dalam buletin Al Islam dan Majalah Al Wa’ie Online)”, Makassar: UIN Alauddin. Hal. 47

3.	<i>Political Party – but extra parliamentary</i>	Meski Hizbut Tahrir adalah partai politik, namun Hizbut Tahrir lebih memilih berjalan diluar parlemen. Karena itu, HT juga tidak mengikuti pemilu, sekalipun memiliki massa yang banyak. Ini karena HTI memandang, parlemen dalam sistem demokrasi tidak sepenuhnya kompetibel dengan Islam, dan tidak mampu untuk memberi jalan bagi tegaknya Islam di manapun. Fakta sejarah diberbagai negara menunjukkan bahwa perubahan yang revolusioner tidak pernah, tidak bisa dan tidak perlu melalui jalan parlemen. Meski demikian, HT membolehkan seorang muslim memperjuangkan Islam <i>via</i> parlemen untuk menasehati penguasa atau untuk menguak hukum-hukum atau perilaku penguasa yang bertentangan dengan Islam.
4.	<i>Revolutonary – but start in the mind</i>	Meski HT mengidamkan perubahan revolusioner, namun itu bukan revolusi (ala) sosialis. Revolusi yang dicitrakan adalah revolusi pemikiran. Pemikiran-pemikiran keliru di masyarakatlah yang menjadi sebab rusaknya sistem dan para penguasa. Karena itu pemikiran keliru ini harus digantikan dengan pemikiran Islam yang cemerlang, yang pada saatnya akan mencerahkan masyarakat, sehingga mereka mampu memilih penguasa yang tercerahkan. Pemikiranlah yang akan merevolusi segala bidang (QS. 13:11).
5.	<i>Social Change – but not forget individu</i>	Meski HT memperjuangkan perubahan atas masyarakat, namun ini tidak didrop dari atas, ataupun didongkreak dari bawah (individu-individu). Masyarakat tidak sekedar himpunan individu, namun individu-individu yang berinteraksi dan diikat pemikiran, perasaan dan peraturan yang sama. Karena itu HT mendidik secara individual para kadernya, seraya bersama-sama melakukan interaksi kepada masyarakat untuk merubah opini umumnya. Bila kader-kader itu kebetulan memiliki power, sementara opini umum juga sudah kondusif untuk Islam, maka

		perubahan sistem akan berjalan mulus. Selanjutnya sistem baru yang islami ini akan memacu islamisasi tanpa harus membuat semua orang menjadi kader.
6.	<i>Fundamentas – but not dogmatic</i>	Sebagai gerakan yang merindukan tegaknya syariat Islam yang diyakini satu-satunya alternatif mengatasi krisis multidimensi, HT dapat dinyatakan di kubu “fundamentalis” atau “revivalis”. Namun demikian, HT bukan gerakan dogmatis. Bahkan untuk masalah aqidah saja (untuk pertanyaan: mengapa mesti percaya pada Islam?). HT menggunakan metode rasional semata. Karena itu oleh sebagian gerakan lain – juga dikubu fundamentalis – HT pernah disalahpersepsikan sebagai neo-mu’tazilah. Dalam fiqh, HT menelusuri dalil secara mendalam, tanpa terbelenggu keharus mengikuti madzhab tertentu.
7.	<i>Syariat Islam – but not just “Jakarta Charter”</i>	Meski menyerikan penerapan syariat Islam, namun berbeda dengan lainnya, HT tidak terjebak pada sekedar usaha memasukkan Piagam Jakarta ke amandemen UUD 45, atau pada jargon piagam Madinah. HT justru mengusulkan suatu rancangan konstitusi baru yang seluruh pasalnya diambil dari Islam, dan memandang piagam Jakarta maupun piagam Madinah baru sebagian kecil dari syariat itu sendiri. HT memandang syariat Islam sebagai solusi integral (politik-ekonomi-sosial-budaya-hankam). Karena itu syariat tidaklah sekedar hukum (=sanksi) Islam, seperti hukum potong tangan bagi pencuri atau rajam bagi pezina. Dalam masalah ekonomi pun, ekonomi syariat tidak sekedar ekonomi anti riba plus zakat, namun lebih jauh mulai dari paradigma, teori kepemilikan, teori harga, peran negara, dsb.
8.	<i>Islamic State – but not theocracy</i>	HT memandang, suatu negara yang menjalankan syariat Islam, dan keamanannya dijamin oleh kaum muslim, adalah negara Islam. Namun, negara itu bukanlah deokrasi yang dikuasai para



		padri yang memerintah atas nama uhan. Negara Islam adalah negara dunia, yang dihuni oleh sholeh maupun orang jahat, muslim maupun bukan. Dalam negara Islam, meski kedaulatan ada pada <i>syuro</i> ’, namun kekuasaan ada pada rakyat, sedang manfaatnya ditujukan ke seluruh alam.
9.	<i>Unity of Umma – but not unity of party</i>	Negara hanya tegak bila kaum muslim bersatu. Namun menurut HT, persatuan ummat tidak berarti harus menyatukan partai. Keberadaan banyak partai itu sunnatullah, karena memang ada banyak dalil yang bisa ditafsirkan beraneka. Ketika ada <i>Khilafah</i> , dialah yang memutuskan pendapat mana yang akan dilegislati dan mengikat semua orang, termasuk yang berbeda pendapat. Namun ini hanya untuk persoalan kemasyarakatan. Pendapat yang berbedapun boleh dipelajari. Inilah mengapa madzhab-madzhab fiqh tetap hidup, sekalipun <i>khalifah</i> saat itu melegislasi pendapat satu madzhab.
10.	<i>Khilafah – but not just group leader</i>	Tentang figur <i>Khilafah</i> , HT memandang <i>Khilafah</i> bukan sekedar pemimpin jama’ah semacam yang ada pada Ahmadiyah atau Laskar Hizbullah. Namun, <i>Khalifah</i> adalah kepala negara dan pemerintahan. <i>Khalifah</i> juga bukan jabatan yang bisa diwariskan, karena ia semaca kontrak sosial. Adapun yang terjadi di masa lalu, harus dikaji secara jernih, dan pula sejarah bukanlah dalil hukum yang mengikat.
11.	<i>Orthodox – but with ijtihad</i>	HT teguh memegang dalil <i>syura</i> ’. Namun demikian HT juga sangat peduli pada ijtihad asal memenuhi syarat. Termasuk arena ijihad yang subur adalah konsep pembentukan dan kebangkitan masyarakat. Ini karena ulama terdahulu tidak mewariskan sedikitpun kajian di sini, sebab saat itu tak ada yang membayangkan bahwa <i>Khilafah Islamiyyah</i> yang besar dan berperadaban tinggi bisa runtuh.

12.	<i>Syuro' – but not democracy</i>	HT membedakan <i>Syuro'</i> dengan demokrasi. Proses pengambilan keputusan dibagi tiga: (1) untuk masalah hukum, <i>syuro'</i> dilakukan untuk memilih pendapat yang terkuat argumentasinya – bukan terbanyak pendukungnya. (2) untuk masalah teknis, serahkan pada ahlinya, bukan pendapat mayoritas. (3) yang diserahkan pendapat mayoritas adalah hal-hal optional yang sama-sama mubah, misalnya memilih pejabat yang paling akseptabel, setelah semua sama-sama memenuhi syarat.
13.	<i>Raducal – but not exclusive</i>	Sebagai gerakan yang memperjuangkan perubahan yang mendasar, HT dapat disebut sebagai gerakan radikal (radix = akan, mendasar, mengakar). Namun HT jauh dari kesan eksklusif. HT berbaur di masyarakat dan tidak berprestensi membentuk perkampungan sendiri. Maka aktivis HT hanya bisa dikenali dari pemikirannya, tidak dari lahiriyahnya. Kalaupun wanita aktivis HT berjilbab, itu bukan karena HT-nya, melainkan itu adalah karena kewajiban dalam Islam. Bendera hitam bertuliskan kalimat tahlil putih yang sering dibawanya adalah bendera Islam.
14.	<i>Substantive – but take also the syimbols</i>	HT memandang segalanya dari sudut hukum <i>syuro'</i> dan tidak dari dikotomi substansi – simbol. Maka tak perlu menonjolkan satu dan mengabaikan lainnya. Pengentaskan kemiskinan atau pemberantasan KKN sama wajibnya dengan menutup aurat atau sholat lima waktu. Keduanya harus didukung baik di tingkat individu dan – bila perlu – di tingkat negara.
15.	<i>Jihad – but peaceful</i>	HT mengakui bahwa jihad memiliki makna bahasa “usaha sungguh-sungguh”. Namun <i>syuro'</i> telah memberi definisi spesifik, bahwa jihad adalah segenap usaha mengatasi kekuasaan tirani asing yang merintangi dakwah secara fisik. Jadi jihad tak hanya untuk mempertahankan diri, apalagi sekedar melawan hawa nafsu.

		Sedang usaha mengoreksi penguasa/melenyapkan kemungkaran di negeri Islam, tidaklah disebut jihad, melainkan dakwah atau nahi mungkar – dan ini tidak dengan kekerasan, kecuali penguasa daulah Islam mengkhianati baiat rakyatnya, yang mewajibkan menerapkan Islam. Sedang usaha mendirikan daulah Islam itu sendiri, sama sekali harus tanpa kekerasan. Rasulullah pun saat di Mekkah, berjuang tanpa kekerasan, meski banyak pengikutnya disiksa. Revolusi pemikiran tak bisa tidak selain dengan pemikiran juga, melalui dialog, diskusi publik, media massa. Dsb.
16	<i>Compromisless – but no violence</i>	Dalam aktivitasnya, HT tidak mengenal kompromi dalam masalah <i>syuro'</i> . Sekalipun bagi gerakan lain itu adalah manuver politik. Namun sikap anti kompromi ini tidak berarti HT pro kekerasan. Bahkan di Jakarta, HT mendapat penghargaan Polda sebagai penggelar demo paling tertib di Jakarta. Hal ini karena HT memandang jalan raya sebagai milik publik dan haram menghalangi orang untuk lewat. Selain itu HT melihat polisi hanya sebagai alat negara, dan preman bahkan pelcur sekalipun bukanlah musuh, karena hakekatnya mereka juga korban dari sistem yang tidak islami.
17.	<i>Liberting – but not liberal</i>	Meski memperjuangkan syariat Islam, HT memilih nama universal “Hizbut Tahrir” (Partai Pembebasan) – tanpa label “Islam”, karena ini merupakan hal mubah. Namun pembebasan itu bukanlah liberalisme (bebas dari batas apapun kecuali yang bermanfaat baginya), melainkan pembebasan dari penghambaan pada sesama manusia menjadi pada Allah saja.
18.	<i>Tolerance – but not pluralism</i>	Dari pemahaman bahwa ada dalil-dalil <i>syuro'</i> yang bisa ditafsirkan berbeda, HT toleran pada mereka yang masih punya “ <i>syubhatul dalil</i> ”(dalil tipis) yang masih islami. Atas pemikiran dan aktivitas

		<p>gerakan lain, HT berpendapat bahwa gerakan lain itu islami, meski pendapatnya bersebrangan dengan HT. Namun tidak berarti HT setuju dengan doktrin yang mengharuskan kekuasaan di bagi-bagi kepada kelompok dengan pemikiran yang berbeda-beda. Karena dalam masyarakat tetap harus ada suatu pemikiran tunggal yang mempersatukan. Untuk hukum yang menyangkut masyarakat tetap harus ada suatu pemikiran tunggal yang mempersatukan. Untuk hukum yang menyangkut masyarakat luas, HT harus dan akan mengambil sikap untuk memperjuangkan pendapat yang terkuat <i>hujjah</i>-nya saja. Terhadap pendukung pendapat islami lainnya, dikembangkan iklim dialog dan toleransi.</p>
19	<i>International – but work local</i>	<p>HT sadar bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Karena itu, seluruh manusia pantas dijadikan sasaran dakwah. Maka HT ada diseluruh dunia, juga di negara-negara barat. Dakwah memang harus dimulai dari entitas yang bisa diakses. Karena itu prioritas dakwah tetap pada kaum muslim dulu. Dan karena bangsa Arab adalah komponen muslim terbesar dengan ikatan emosional tertinggi, maka pada mereka dakwah lebih intensif.</p>
20.	<i>Local – but not nationalism</i>	<p>Meski bekerja secara lokal, tidak berarti HT setuju dengan nasionalisme atau patriotisme. Bahwa HT akan berdiri di garis depan bila negerinya diserang orang-orang kafir, itu pasti. Namun ini bukan karena merasa pengabdian tertinggi adalah pada bangsa dan negara, melainkan karena HT yakin membela negeri Islam dari serangan orang-orang kafir adalah kewajiban <i>syuro</i>. HT berfikir lebih kosmpolit dan globalisasi, karena <i>syuro</i> setiap bicara tentang ummat Islam, tidaklah spesifik hanya untuk muslim di negeri tertentu saja. Demikian juga, cita-cita mendirikan <i>Khilafah</i> Islam sebagai cikal bakal suatu “superstate” tidak tertuju hanya di wilayah teritorial tertentu saja,</p>



		melainkan dimana saja yang memang paling kondusif untuk itu, disanalah cita-cita itu akan mulai direalisasi. Tidak oleh HT, namun oleh ummat yang telah berubah cara berfikirnya.
--	--	---

Tabel 4.1:<sup>11</sup>

**Karakteristik Gerakan Dakwah Hizbut Tahrir**

#### **4.2 Sekilas Tentang Sayap Gerakan Mahasiswa Hizbut Tahrir Indonesia: Gerakan Mahasiswa Pembebasan<sup>12</sup>**

Seperti yang sudah disampaikan pada awal bab IV, secara arti dalam bahasa Indonesia, Hizbut Tahrir memiliki arti Partai Pembebasan. Begitupun dengan gerakan mahasiswanya. Mereka menggunakan tema yang sama untuk memberikan nama gerakan mahasiswanya yang disebut sebagai Gerakan Mahasiswa Pembebasan, atau yang biasa disebut dengan Gema Pembebasan. Gema Pembebasan merupakan organisasi kemahasiswaan yang bergerak untuk mengkampanyekan pemikiran-pemikiran Islam dan solusi-solusi Islam atas segala permasalahan serta untuk melahirkan kader-kader dakwah mahasiswa yang suatu saat akan terjun ke masyarakat. Gema Pembebasan merupakan salah satu jaringan dakwah kampus yang ada di Indonesia. Gema Pembebasan resmi dibentuk pada tanggal 28 Februari 2004 bertempat di Auditorium Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia . setelah dibentuk, organisasi ini menyebar ke seluruh pelosok Indonesia mulai dari Pengurus Pusat (PP), Pengurus Wilayah (PW), Pengurus Daerah (PD) dan Pengurus Komisariat (PK).

<sup>11</sup> *Ibid.*, Hal. 49

<sup>12</sup> <http://www.gemapembebasan.or.id/statis-1-sejarah.html> di akses pada 19 Februari 2018 pukul 14.00 WIB



Adapun, kegiatan yang dilakukan Gema Pembebasan untuk mengimplementasikan tujuannya adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Penelitian dan penyebaran artikel serta buletin keislaman
2. Mengadakan bedah buku
3. Mengadakan kajian keislaman tematik dan kajian bahasa Arab
4. Mengadakan *outbond* dan pelatihan
5. Mengadakan dialog pemikiran
6. Mengadakan seminar-seminar keislaman
7. Menanggapi masalah-masalah yang aktual dengan sudut pandang Islam
8. Mengadakan acara bersama Lembaga Dakwah Kampus lainnya
9. Mengadakan aksi simpatik pada momen-momen tertentu

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan *default* yang dilakukan Gema Pembebasan untuk menyebarkan nilai-nilainya kepada mahasiswa yang tersebar diseluruh kampus di Indonesia. Berbagai pendekatan yang dilalui ini dapat dilakukan dengan berbagai gerakan turunan lainnya. Sehingga segala usaha yang diperjuangkan oleh Gema Pembebasan dapat diterima dengan mudah oleh objek sosialisasinya dalam hal ini adalah mahasiswa.

Layaknya organisasi-organisasi secara umum, Gema Pembebasan juga memiliki visi dan misi dalam gerakannya. Karena, secara umum, visi dan misi merupakan bagian dari penjelasan secara universal arah gerak dari sebuah gerakan.

---

<sup>13</sup> <http://www.gemapembebasan.or.id/statis-9-kegiatan-umum.html> diakses pada 19 Februari 2018 pukul 14.00 WIB

Seperti yang dapat kita akses secara mudah dalam *websitenya*. Berikut adalah visi dan misi dari Gema pembebasan:

Visi:<sup>14</sup>

1. Menjadikan Ideologi Islam sebagai mainstream gerakan mahasiswa di Indonesia
2. Terbentuknya opini Islam Ideologis di kalangan mahasiswa dan pergerakan mahasiswa di Indonesia

Misi:<sup>15</sup>

1. Mengembangkan manajemen pengelolaan opini ideologi Islam sehingga memiliki daya gugah yang membangun kesadaran politik dan daya pembebas terhadap seluruh faktor yang membelenggu Islam
2. Membangun jaringan pergerakan Mahasiswa Islam ideologis di seluruh Indonesia
3. Mengembangkan sistem pendukung bagi transformasi ideologi Islam di kalangan mahasiswa dan pergerakan mahasiswa
4. Membentuk kader pergerakan mahasiswa Islam yang ideologis dan memiliki kemampuan dalam mengembangkan opini.

<sup>14</sup> <http://www.gemapembebasan.or.id/statis-5-visi-misi.html> di akses pada 19 Februari 2018 pukul 14.00 WIB

<sup>15</sup> *Ibid.*

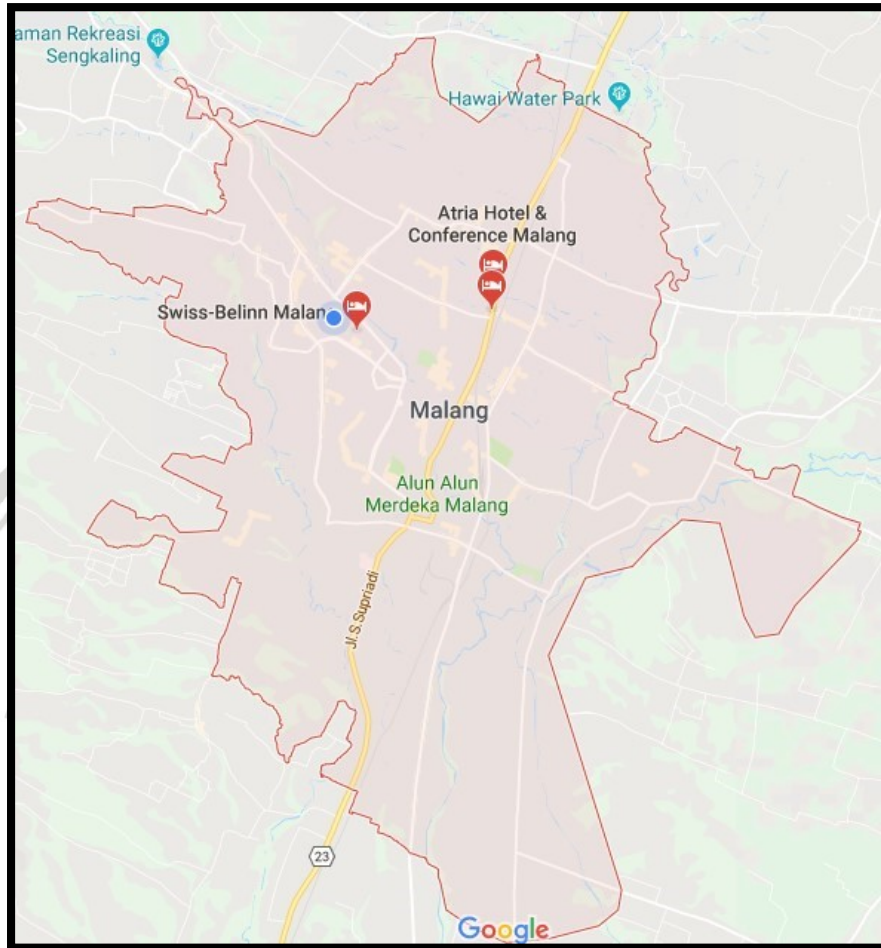
#### 4.3 Sekilas Tentang Kota Malang

Secara geografis,<sup>16</sup> Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440-667 Mdpl. Kota Malang merupakan salah satu Kota tujuan pendidikan karena berbagai fasilitas pendidikan yang dimiliki. Letak Kota Malang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang. Secara astronomis, terletak pada 112,06° – 112, 07° Bujur Timur dan 7,06° – 8,02° Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kec. Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
2. Sebelah Timur: Kec. Pakis dan Kec. Tumpang Kabupaten Malang
3. Sebelah Selatan: Kec. Tajinan dan Kec. Pakisaji Kabupaten Malang
4. Sebelah Barat: Kec. Wagir dan Kec. Dau Kabupaten Malang

---

<sup>16</sup> <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/> di akses pada 19 Februari 2018 pukul 15.41 WIB



**Gambar 4.1:<sup>17</sup>  
Peta Kota Malang**

Sepeti yang dilansir oleh pemerintah Kota Malang dalam laman resminya, Kota Malang juga disebut sebagai Kota Pendidikan.<sup>18</sup> Pemerintah Kota Malang menyebutkan alasannya karena situasi kota yang tenang, penduduknya ramah, harga makanan yang relatif murah dan fasilitas pendidikan yang memadai sehingga cocok untuk menempuh pendidikan. Fasilitas pendidikan di Kota Malang, secara

<sup>17</sup> Maps

<sup>18</sup> <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/> di akses pada 19 Februari 2018 pukul 14.00 WIB

khusus kampus baik PTN maupun PTS sekurang-kurangnya terdapat 62 kampus di Kota Malang.<sup>19</sup> Hal ini semakin melegitimasi bahwa Malang memang pantas untuk disebut sebagai Kota Pendidikan.

Sebagai kota yang disebut sebagai Kota Pendidikan, dalam kegiatan pendidikan mahasiswa di Kota Malang, gerakan mahasiswa di Kota Malang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mahasiswa. Gerakan mahasiswa yang berasal dari kampus-kampus besar yang ada di Kota Malang mayoritas digerakkan oleh gerakan mahasiswa ekstra kampus yang biasa disebut dengan OMEK. Secara khusus, biasanya kader-kader dari berbagai omek ini berusaha untuk mengisi berbagai Lembaga Kedaulatan Mahasiswa seperti BEM kampus dan fakultas, DPM kampus dan fakultas serta lembaga-lebaga lain seperti Himpunan Jurusan dan lain sebagainya.

Omek-omok yang ada di Kota Malang berasal dari berbagai lapisan variabel dan latar belakang dari berbagai jenis mahasiswa. HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia), KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), KMNU (Keluarga Mahasiswa Nadhatul Ulalma), Gema Pembebasan (Gerakan Mahasiswa Pembebasan) merupakan gerakan mahasiswa yang eksis dikalangan mahasiswa di Kota Malang.<sup>20</sup> Gerakan mahasiswa ini memiliki target kaderisasi yang biasanya

<sup>19</sup> GalamediaLabs. "Daftar Perguruan Tinggi Di Kota Malang" <http://ngalam.id/read/66/ Perguruan-tinggi/> di akses pada 19 Februari 2018 pukul 14.00 WIB

<sup>20</sup> Observasi Peneliti sejak 2014



mengikat kepada kadernya. Seperti yang sudah disampaikan diatas, mereka pun berusaha untuk mengisi lembaga-lembaga kedaulatan mahasiswa yang ada di dalam kampus untuk melakukan sosialisasi pemikirannya masing-masing, sehingga mahasiswa pun dapat mengenal omek-omek ini secara tidak langsung melalui tiap-tiap kader yang mempunyai posisi dalam lembaga-lembaga kedaulatan mahasiswa yang ada di dalam kampus.

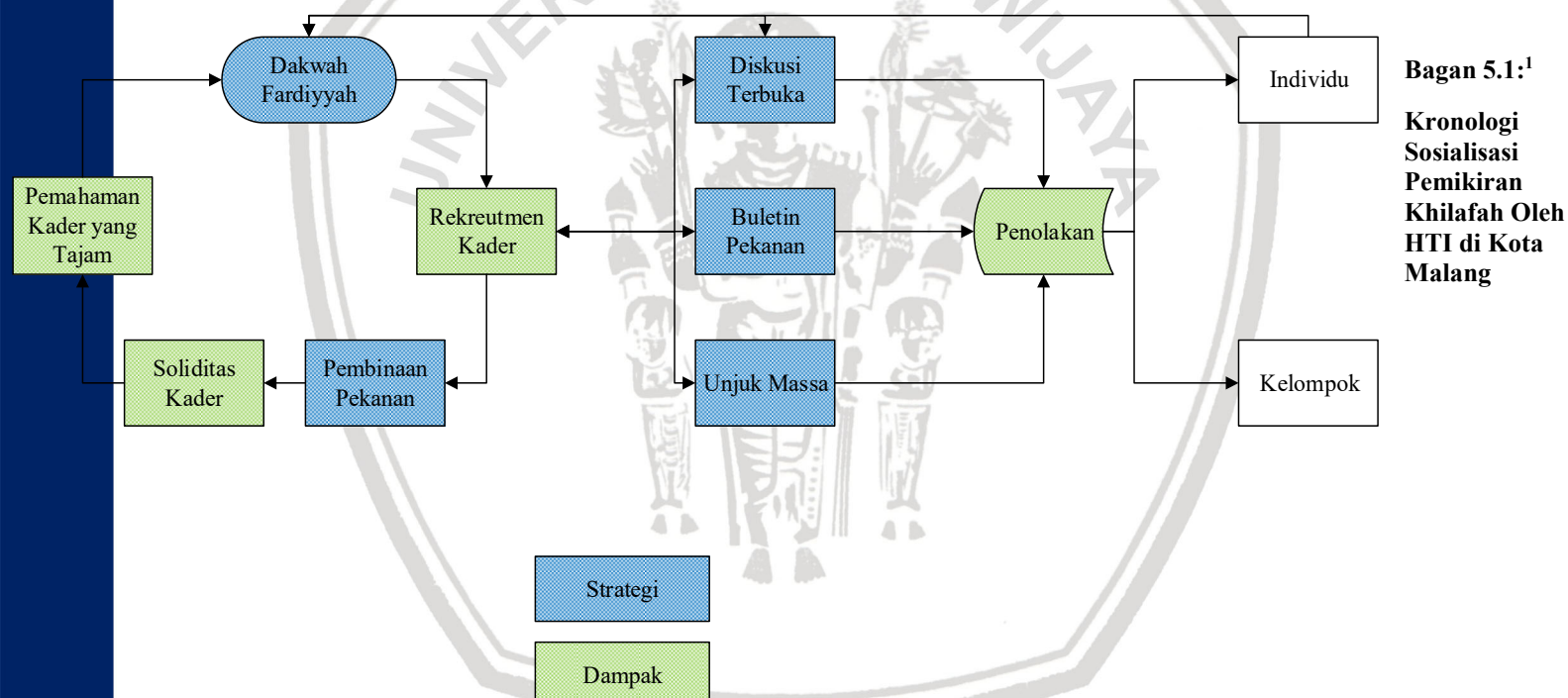




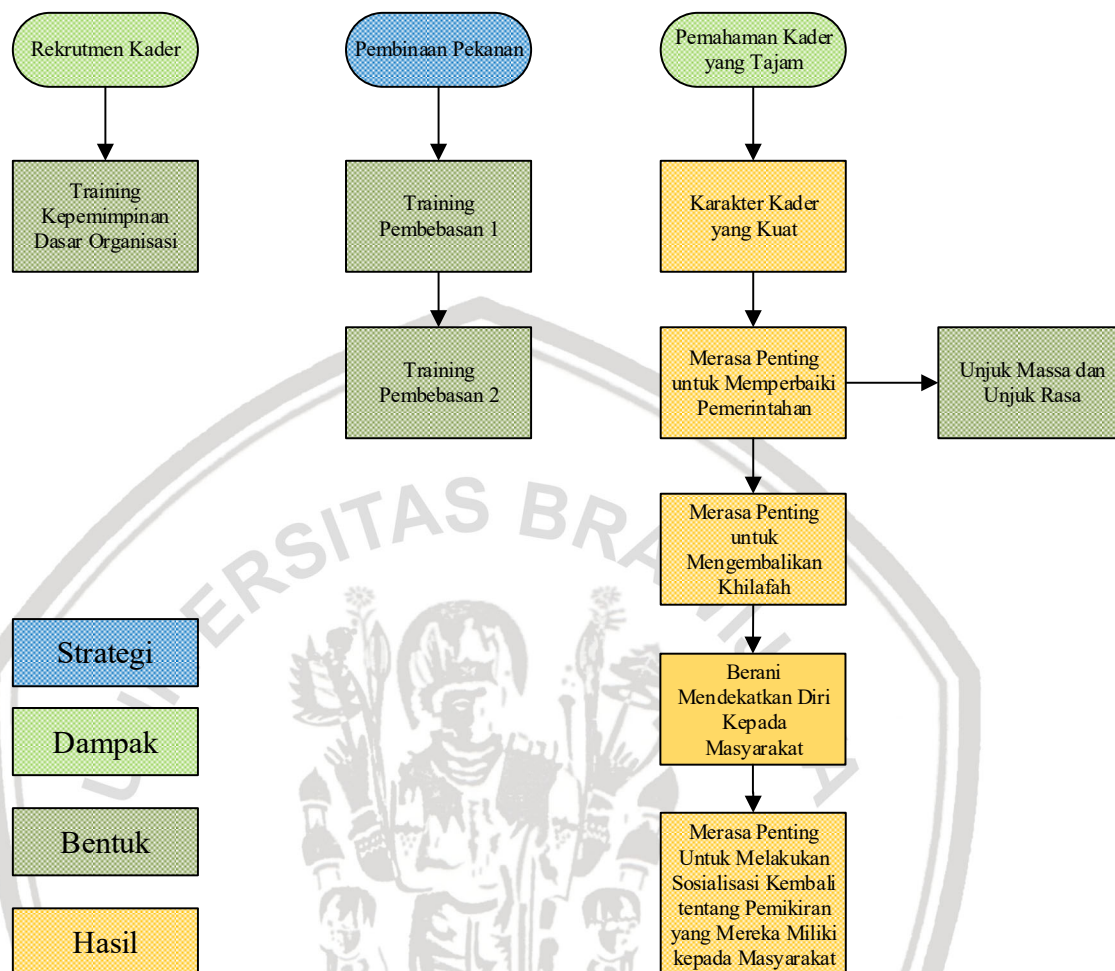
## BAB V

### ANALISIS SOSIALISASI PEMIKIRAN *KHILAFAH* OLEH HIZBUT TAHRIR DI KOTA MALANG

#### 5.1 Kronologi Sosialisasi Pemikiran *Khilafah* oleh HTI di Kota Malang



<sup>1</sup> Diolah oleh Peneliti



Bagan 5.2:<sup>2</sup>

Dampak, Bentuk dan Hasil dari Sosialisasi Pemikiran *Khilafah* oleh HTI di Kota Malang

## 5.2 Strategi Sosialisasi Pemikiran *Khilafah* oleh HTI di Kota Malang

Untuk menyebarkan pemikirannya, secara khusus HTI memiliki beberapa cara yang mereka lakukan. Secara umum, pemikiran yang disampaikan oleh HTI ini terbilang *anti-mainstream* daripada pemikiran-pemikiran politik yang ada. Karenanya ada beberapa tahap yang memang perlu untuk memahami tiap-tiap individu secara mendalam. Sehingga nantinya individu-individu yang sudah tersosialisasi paham betul dan mau untuk melakukan sosialisasi kepada pihak lain.

<sup>2</sup> Diolah Peneliti

Harapannya rantai ini terus berjalan sampai pada nantinya, masyarakat secara umum minimal dapat memahami apa yang dimaksud dengan *Khilafah* bahkan mau untuk terus memperjuangkannya. Ada beberapa bentuk sosialisasi pemikiran *Khilafah* yang dilakukan oleh HTI ataupun *grassrootnya* diantaranya:

#### 5.2.(a) Dakwah *Fardhiyyah*

Dakwah *Fardhiyyah* dapat diartikan sebagai ajakan atau seruan kepada jalan Allah yang dilakukan oleh seorang da'i kepada orang lain secara individual, dengan tujuan memindahkan seorang objek dakwah pada keadaan yang lebih baik dan diridhoi oleh Allah.<sup>3</sup> Setidaknya ada 3 (tiga) tahap dalam melakukan dakwah *fardhiyyah* diantaranya 1). *Mafhum Da'awi*, 2). *Mafhum Haraki* dan 3). *Mafhum Tanzhimi*. Ketiga tahap ini merupakan hal yang harus dilakukan secara berurutan. Secara umum, yang dimaksud dengan *Mafhum Da'awi* adalah usaha seorang da'i untuk lebih dekat dengan mengenal objek dakwahnya dalam rangka mengajaknya kepada jalan Allah. Tahap ini merupakan elaborasi dari *tadabbur* (pencermatan) Q.S. Al Fushillat: 33-36<sup>4</sup>

Tahap kedua merupakan *Mafhum Haraki* adalah menjalin hubungan dengan masyarakat umum, kemudian memilih salah seorang dari mereka untuk membina hubungan lebih erat dalam rangka menuntunnya ke jalan Allah.<sup>5</sup> Sedangkan tahap *Mafhum Tanzhimi* yaitu upaya pengorganisasian terhadap seorang objek dakwah

<sup>3</sup> Admin. "*Dakwah Fardhiyyah*"  
<http://www.ikadi.or.id/artikel/fiqh-dakwah/122-dakwah-fardiyah.html> diakses pada Jum'at 16 Maret 2018 pukul 13.00 WIB

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*



yang diajak dan dituntun ke jalan Allah. *Tanzhimi* meliputi: arahan, penugasan dan penggolongan.<sup>6</sup>

HTI melakukan sosialisasi pemikirannya menggunakan tahap ini. Tahap *dakwah fardhiyyah* merupakan bagian penting bagi mereka. Tahap ini merupakan sebuah pintu gerbang untuk menuju tahap-tahap selanjutnya. Karena pada tahap ini, seluruh kader memiliki kewajiban yang sama untuk mengajak para objek dakwahnya. Mengajak dalam artian mereka mencoba melakukan pendekatan secara personal kepada objek dakwah mereka. Pendekatan secara personal ini nantinya akan menjadi modal sosial dan bahkan karena ini nantinya para objek dakwah ini akhirnya mau untuk menjadi bagian dalam perjuangan kelompok mereka. Tiap-tiap kader memiliki beban yang sama dalam melakukan *dakwah fardhiyyah*.

Menurut Habib, bentuk *dakwah fardhiyyah* yang digunakan oleh HTI dapat dikatakan kaku, dalam artian mereka memiliki beban yang sama namun ada aturan khusus untuk kader yang belum memiliki standar kualitas kader mereka. Bagi mereka yang belum memiliki standar kader yang diharapkan ada perlakuan khusus untuk melakukan sosialisasi. Mereka diberikan beban yang sama untuk terus melakukan *dakwah fardhiyyah* namun masih ada proses *monev* (monitoring dan evaluasi). Hal itu dilakukan karena mereka belum memenuhi standar kualitas. Bagi mereka yang belum memenuhi standar kualitas, secara struktural masih belum bisa dikatakan sebagai kader HTI ataupun Gema Pembebasan. Karenanya, mereka ini

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

masih perlu dievaluasi sehingga ini memancing agar kualitas kader-kader tersebut terus bertambah. Seperti yang disampaikan oleh Habib:

“Jadi, ada kewajiban juga bagi musyrif/guru untuk mengontrol kader-kader yang seperti itu. Memang boleh kader-kader yang belum sesuai standarnya itu untuk melakukan sosialisasi atau menjelaskan ide-ide yang dibawa HTI atau Gema, tapi tetep dalam kontrol guru. Artinya, dalam segala permasalahan dan konsekuensinya yang kena bukan dia saja, tapi gurunya juga kena kalau dia ada kesalahan. Maka dari kita itu ada target-target biar tiap kader itu bisa ketemu tokoh-tokoh ditiap bulannya untuk diajak diskusi. Abis diskusi setelah 2 atau 3 pertemuan, nanti mereka diajak buat ikut agenda-agenda kita. Terus, guru ini pun nanti bisa ikut ketika sudah sampai tahap pertemuan ke-3 biasanya. Sekalian mengoreksi yang sudah dibahas.”<sup>7</sup>

Seperti yang sudah disampaikan diatas, *dakwah fardhiyah* ini adalah corong utama bagi HTI ini untuk melakukan sosialisasi pemikirannya. Karena *dakwah fardhiyah* ini akhirnya menimbulkan perasaan dan bahkan *sense of belongin* pada gerakan tersebut. Akhirnya antara objek dakwah dan pendakwahnya memiliki hubungan personal yang lebih mendalam. Meskipun belum tentu 100% segala usahanya berhasil. Tapi menurut pengakuan Habib, langkah ini merupakan langkah paling efektif untuk mengenalkan pemikiran mereka sebelum menuju tahap sosialisasi selanjutnya.

Dampak terinstan dari usaha melakukan *Dakwah Fardhiyyah* adalah munculnya kader-kader baru. Kader-kader baru ini adalah mereka yang sudah melalui banyak tahap dari proses sosialisasi pemikiran yang dilakukan oleh HTI. Pada tahap yang diikhtiarkan oleh kawan-kawan HTI, untuk muncul kader-kader baru mereka harus melalui berbagai tahap setelah selesai dari tahap *dakwah fardhiyyah*. *Dakwah fardhiyyah* merupakan tahap paling awal untuk menjadikan

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara peneliti kepada Ketua Gema Pembebasan Kota Malang pada 3 Maret 2018

seorang objek dakwah agar nantinya menjadi kader, tidak hanya menjadi seorang simpatisan.

Proses yang dilakukan HTI untuk membuat para objek dakwah mereka akhirnya menjadi kader harus melalui beberapa tahap. Tahapan-tahapan ini mereka lakukan agar objek-objek dakwah yang berhasil mereka dekati melalui proses *dakwah fardhiyyah* ini benar-benar menjadi kader yang tangguh dan tidak tanggung untuk menjadi kader yang mereka sebutkan bahwa ladang dakwah mereka merupakan ladang dakwah yang keras karena wacana yang mereka perjuangkan merupakan wacana yang *anti-mainstream* sehingga akan banyak menimbulkan tantangan-tantangan yang berat. Maka kualifikasi kader yang mereka angkat harus sesuai dengan kualifikasi standar mereka. Habib ketua Gema Pembebasan mengatakan bahwa ini adalah bagian yang sangat penting agar mereka siap menghadapi tantangan-tantangan yang amat berat itu:

“...Kemudian ketika ada orang yang tertarik langsung kita hubungi dan kita ajak diskusi intensif, kalau di KAMMI mungkin sebutannya Ligo atau mentoring lah ya. Diskusi ini butuh beberapa kali pertemuan, minimal 8 kali lah. Itu udah ada disilabus yang kita susun, dan itu sudah sampai pertanyaan ‘kenapa sih harus khilafah?’. Setelah itu, kita adakan TKDO (training kepemimpinan dasar organisasi). Diacara tersebut kita sosialisasikan bagaimana sih GP itu dan bagaimana pergerakan atau perjuangannya ditataran mahasiswa (tergantung level jaringannya: Malang ya Malang, UM ya UM atau UB ya UB). Nah kemudian kita tawari mau lanjut atau enggak. Atau hanya lanjut diskusinya saja (yang nantinya gak akan jadi anggota structural jadi pengurus). Nah, kalau udah jadi anggota secara struktur juga gak langsung dikasih amanah berat. Ada lanjutannya lagi seperti TP (training pembebasan 1 dan 2). Baru setelah itu dikukuhkan sebagai anggota GP. Dan setelah itu ditawarkan, mau ngaji di Hizbut Tahrir atau enggak. Jadi yaa lumayan berat saringannya itu banyak. ‘antum suka GP? Gabung’ kita gak gitu. Kalau dia udah ngaku suka, kita uji dari idenya dia. Idenya itu udah si visi atau enggak. Kalau gak

sevisi berarti Sukanya hanya sekedar suka perjuangannya pun nanti hanya sekedar perjuangan...”<sup>8</sup>

Kader-kader baru yang memang akhirnya direkrut oleh kawan-kawan HTI melalui HTI ataupun Gema Pembebasan ataupun lembaga-lembaga lain, mereka merupakan orang-orang yang terpilih yang menurut mereka (HTI) memiliki kapasitas dan kualifikasi yang cocok untuk menyandang dan dapat memberikan pandangan mereka kepada khalayak untuk menyebutkan mereka adalah HTI atau mewakili HTI secara organisasi. Karena mereka sudah dipandang sebagai orang-orang yang sudah memiliki pandangan kuat terhadap garis perjuangan yang mereka perjuangkan. Sehingga berbagai tantangan yang akan mereka hadapi kedepan mereka sudah siap untuk menghadapinya dan minim kemungkinan hadir fenomena “mutung” dalam proses pelaksanaan dakwah mereka yang membuat hilangnya keseimbangan dalam proses berorganisasi.

Pada beberapa kasus menyebutkan, bahwa

#### 5.2.(b) Pembinaan Pekanan

Pembinaan intensif pekatan, atau biasanya mereka menyebut dengan Mentoring merupakan tahap pembinaan yang mereka lakukan kepada setiap individu setelah mereka melakukan tahap *dakwah fardhiyah*. Setelah melakukan *dakwah fardhiyah* objek dari *dakwah fardhiyah* yang sudah berhasil mereka rekrut akan melanjutkan ketahap selanjutnya, yakni mentoring. Dalam mentoring ini, mereka akan mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih mendalam tentang Islam maupun tentang apa yang akhirnya menjadi apa yang mereka perjuangkan sampai pada tahapnya, dari

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Ketua Gema Pembebasan pada (21/2)

mentoring ini menimbulkan militansi yang kuat dari tiap-tiap kadernya. Seperti yang disampaikan oleh Habib:

“... militansi ini muncul kita coba pupuk dari forum-forum pekanan seperti liqo, atau forum yang umum seperti diskusi-diskusi dan juga aksi. Pun dengan kontak tokoh, karena ide yang kita bawa jelas anti mainstream, pasti pertanyaannya banyak dan kita butuh mereka. Ketika kita ditolak dimana-mana secara struktural kita selalu memompa untuk meyakini bahwa yang kita sampaikan itu Islam...”<sup>9</sup>

Melalui mentoring ini mereka diberikan berbagai materi. Sehingga secara kualitas mereka menjadi orang-orang yang luar biasa dan dapat menarik perhatian orang lain terhadap karakter yang dimiliki oleh kader-kader HTI ataupun Gema Pembebasan secara khusus. Ada beberapa orang yang sudah menjadi kader karena mereka melihat karakter dari individu kader-kader HTI ini. Mereka memberikan sebuah ‘pesona’ kepada objek dakwah mereka sehingga objek dakwah mereka menjadi tertarik dan ingin mengenal lebih dalam bagaimana HTI mengelola dan memperbaiki kualitas-kualitas kadernya. Inilah yang menjadi nilai lebih dari pembinaan intensif yang dilakukan oleh HTI ataupun Gema Pembebasan.

Secara konten, dalam pembinaan intensif pekanan ini, mereka menekankan kepada kondisi diri mereka. Misal, mereka akan selalu dipantau oleh *musyrifnya* tentang hubungan mereka terhadap Allah melalui ibadah-ibadah harian. Hubungan mereka terhadap orang lain melalui *dakwah fardhiyah* yang mereka lakukan. Selanjutnya, pemahaman mereka tentang apa yang mereka perjuangkan, yakni pemahaman mereka terhadap *Khilafah* itu sendiri melalui diskusi yang dilakukan dalam pertemuan pekanan tersebut.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara peneliti kepada Ketua Gema Pembebasan Kota Malang pada 3 Maret 2018



Satu hal yang menjadi nilai plus dalam pembinaan pekanan yang dilakukan oleh HTI adalah mereka akan terus melakukan pembinaan pekanan ini meskipun dalam satu kelompok tersebut hanya dihadiri oleh 1 (satu) orang diluar mentor. Karenanya, hal ini menjadi nilai positif karena mereka tidak akan ‘meliburkan’ pembinaan pekanan mereka karena yang hadir hanya satu orang. Bahkan jika diperhatikan dengan secara mendetail pembinaan pekanan yang dihadiri hanya satu kader pembinaan itu akan sangat intens dan mendalam. Sehingga pemahaman yang didapatkan pun akan semakin mendalam atas apa yang sedang mereka usahakan.

Hal tersebut disampaikan oleh salah satu dari mantan peserta pembinaan pekanan yang pernah merasakan pembinaan pekanan hanya sendiri. Beliau menuturkan bahwa pada saat hadir sendiri ketika pembinaan pekanan maka suasananya lebih terasa mendalam ketika diskusi. Beliau merasakan bahwasannya, untuk bertukar fikiran terasa lebih mendalam untuk menggali hal-hal yang memang tidak pernah dibahas ketika yang hadir banyak. Namun, beliau menuturkan bahwa lebih nyaman ketika semua hadir. Karena fikirannya lebih banyak dan lebih kompleks sehingga lebih dinamis saat melakukan diskusi dibanding ketika hanya berdua saja.

Pada prosesnya, pembinaan pekanan ini juga memiliki marhalahnya (tingkatannya). Menurut salah satu informan yang pernah mengikuti pembinaan pekanan ini, mereka mendapatkan materi dari Aqidah, *hablu min Allah*, *hablu min An-Naas*, *hablu min An-Nafs* dan diakhiri dengan pengkristalan tentang bagaimana cara menggapai *Khilafah* dengan cara yang mereka tawarkan yaitu bertemu dengan

pemerintah dan menawarkan sistem pemerintahan yakni *Khilafah*. Pada materi sebelum cara menggapai *Khilafah* ada stigma yang dibangun, yakni:

“kita sudah bisa memenuhi *hablu min Allah* dan *hablu min An-Nafs*, karena kita bisa memenuhi hak dan kewajiban kita kepada Allah dan diri sendiri. Sedangkan pada tahap *hablu min An-Nas* kita belum sempurna untuk memenuhi hak dan kewajibannya karena kita belum bisa untuk menjalankan hukum *syariat Islam* yang berhubungan dengan manusia (*muamalah*) kepada manusia.”<sup>10</sup>

Stigma ini disampaikan sebagai dasar untuk memahami bahwa pentingnya memperjuangkan *Khilafah*. Karena pada poin tersebut ada makna *hablu min An-Nas* yang belum terpenuhi bagi sebagian manusia. Stigma ini yang akhirnya mampu menggugah semangat para kadernya untuk mendalami tentang *Khilafah* itu sendiri.

Satu hal menarik yang peneliti temukan dilapangan adalah, ketika ada salah satu calon kader mereka yang ternyata sudah menjadi kader dari gerakan lain, maka mereka akan ditinggalkan begitu saja oleh teman-teman HTI tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Mujahid, salah satu mahasiswa yang sudah pernah mengikuti pembinaan selama kurang lebih 1 tahun yang peneliti temui:

“Jadi waktu itu jatah pembinaan pekanannya di kontrakkan saya. Nah kondisinya waktu itu di pintu kontrakkan saya itu ada stikernya KAMMI. Pembinaan tetep jalan itu. Tapi pekan selanjutnya sampai hari ini saya gak pernah diajak lagi. Setelah *tabayyun* ke temen-temen ternyata karena stiker KAMMI itu saya udah gak diajak pembinaan pekanan lagi.”<sup>11</sup>

Secara umum, pertemuan pekanan ini memiliki dampak yang lebih internal karena menyangkut hubungan antar kader. Strategi ini akhirnya akan menumbuhkan

<sup>10</sup> Wawancara penulis dengan salah satu informan yang pernah mengikuti pembinaan pekanan yang dilakukan oleh HTI. Ahad 10 Maret 2018

<sup>11</sup> *Ibid.*

*Ukhuwwah Islamiyyah* antar kader itu sendiri. Ketika kita membahas *Ukhuwwah Islamiyyah*, maka kita akan membahas bagaimana hubungan antar kader dikalangan mereka terikat. Namun, secara global, seharusnya *Ukhuwwah Islamiyyah* ini dimiliki oleh semua umat Islam atas umat Islam yang lain. Bukan hanya antar kader masing-masing gerakan, atau bahkan hanya antara satu individu dengan satu individu lain yang ada dalam sebuah kelompok tertentu. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kita *Ushullus-Sittah* menyebutkan:

“Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar (umat Islam) bersatu di dalam agama dan melarang berpecah belah di dalamnya. Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang sangat terang dan mudah dipahami oleh orang-orang awam. Allah Azza wa Jalla melarang kita menjadi seperti orang-orang sebelum kita yang berpecah belah dan berselisih dalam urusan agama hingga mereka hancur karenanya.”<sup>12</sup>

Hakikat dari *Ukhuwwah Islamiyyah* adalah samanya perasaan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya dan mereka terikat pada ikatan Aqidah Islamiyyah. Pada dasarnya ikatan ini merupakan alasan yang mutlak hingga akhirnya tiap-tiap individu dapat merasakan nikmatnya. Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk saling bersatu dan tidak bercerai-berai.<sup>13</sup> Menurut Dr. Abdullah Nasikh Ulwan, *Ukhuwwah Islamiyyah* adalah ikatan jiwa yang melahirkan perasaan yang mendalam dengan kelembutan, cinta dan hormat kepada setiap individu yang diikat oleh ikatan aqidah *Islamiyyah*.<sup>14</sup> Untuk memiliki rasa

<sup>12</sup> Ahmas Faiz Asifuddin. “Pentingnya *Ukhuwwah*”  
<https://almanhaj.or.id/3434-pentingnya-ukhuwwah.html> diakses pada Kamis 5 April 2018 pukul 22.53 WIB

<sup>13</sup> Q.S Ali Imran: 103

<sup>14</sup> Admin. “Makna dan Kendala-Kendala *Ukhuwwah Islamiyyah*”.  
<http://www.ikadi.or.id/component/content/article/41-tafakkur/108-makna-dan-kendala-kendala-ukhuwwah-islamiyyah.html> di akses pada Rabu 21 Maret 2018 pukul 16.13

*ukhuwwah Islamiyyah* yang lekat ada beberapa proses yang harus dilalui. Sehingga ada rasa persatuan antara manusia dan tidak timbul perpecahan yang merupakan sebuah hal yang dilakukan manusia namun Allah sangat murka bila hal itu terjadi dan dilakukan manusia.

Dasar ini pun diaplikasikan oleh HTI agar proses dakwahnya dapat berjalan dengan sebaik mungkin. Pada prosesnya hal ini dapat diaplikasikan melalui proses pertemuan pekanan mereka yang intensif. Pertemuan pekanan ini merupakan variabel penting agar hadir perasaan persaudaraan antara tiap-tiap kader yang berlandaskan aqidah Islamiyyah. Karena, Bergeraknya mereka atas apa yang mereka perjuangkan merupakan hal yang harus diikat dengan pemahaman yang baik tentang Aqidah sehingga menimbulkan saling paham satu sama lain dan saling mengerti tentang apa yang memang mereka perjuangkan.

Pada pelaksanaan pertemuan pekanan, Secara konten, dalam pembinaan intensif pekanan ini, mereka menekankan kepada kondisi diri mereka. Misal, mereka akan selalu dipantau oleh *musyrifnya* tentang hubungan mereka terhadap Allah melalui ibadah-ibadah harian. Hubungan mereka terhadap sesama kader dan orang lain melalui *dakwah fardhiyah* yang mereka lakukan. Mereka menjadikan forum pekanan ini sebagai tempat mengenal satu sama lain antar individu, sehingga hubungan mereka semakin rekat antar individu dengan individu yang lain. Karena, dalam pertemuan pekanan ini kenal saja tidak cukup. Melainkan dibutuhkan perkanalan yang semakin mendalam. Proses saling mengenal ini dikenal dengan 3T. Yakni, *Ta'aruf*, *Tafahum* dan *Takaful*.. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. dalam melakukan pendekatan kepada para sahabatnya dan

mempersaudarkan para sahabatnya. Proses-proses inilah yang nantinya akan menghasilkan efek yang besar dalam hubungan persaudaraan ini. proses-proses ini akan berkaitan satu dengan yang lainnya. Proses-proses tersebut antara lain:

1. *Ta'aruf* (Proses Saling Kenal)<sup>15</sup>

Pada proses ini antar individu melakukan pengenalan lebih dalam terhadap individu yang lain. Proses pengenalan yang lebih dalam ini harapannya tiap individu bisa saling mengenal sifat, pemikiran bahkan sampai kecenderungan saudaranya. Pengenalan dalam tahap ini mencakup aspek *jasady* (fisik), *fikry* (pemikiran) dan *nafsy* (kejiwaan).

2. *Tafahum* (Proses Saling Memahami)

Proses ini merupakan proses penting. Karena proses ini secara teknis lebih intens dari proses sebelumnya. Antar individu pada tahap ini mereka betul-betul harus lebih mendalam, sehingga mereka jauh lebih paham terkait kebiasaannya, kesukaan, karakter ciri khas individu sampai pada tahap cara pandang atau berfikir saudaranya. Hingga perasaan tidak enak atau tidak cocok antar individu sudah tereliminasi pada tahap ini karena proses saling menasehati. Dalam tahap ini ada 3 proses perpaduan yang harus dilalui:

- a. *Ta'liful Qulb* (Perpaduan Hati)
- b. *Ta'liful Afkar* (Perpaduan Pemikiran)
- c. *Ta'liful 'Amal* (Perpaduan Kerja)

---

<sup>15</sup> Isnet/1368. "Tahapan dan Proses Ukhuwwah Islamiyyah"  
<http://www.unhas.ac.id/rhiza/arsip/tarbiyah3/tarbiyah/tar-0034.htm> di akses pada Rabu 21  
Maret 2018 Pukul 16.30



### 3. *Takaful* (Rasa Senasib Sepenanggungan)

Aplikasi dari *Takaful* ini terbukti dengan tidak adanya masalah yang ditutupi antar individu dengan individu yang lain, sehingga mereka merasakan senasib dan sepenanggungan setelah itu mereka mau untuk saling membantu *hatta* masalah keluarga selama masih dalam koridornya.<sup>16</sup>

Proses sosialisasi pemikiran yang dilakukan oleh HTI tak selamanya berjalan mulus. Peneliti sempat berdiskusi dengan beberapa orang yang merupakan salah satu dari sekian orang yang menolak pemikiran yang ditawarkan HTI kepada mereka. Proses pengenalan dengan teman-teman HTI sampai mereka menolaknya terjadi ketika mereka ada dikampus. Hal ini dikarenakan komunikasi yang terjadi antara kader HTI yang melakukan sosialisasi dan objek dari sosialisasi tersebut berinteraksi ketika mereka sama-sama berada di lembaga yang ada dikampus. Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, bahkan ada di lembaga dakwah kampus.

Penolakan ini terjadi lantaran objek dakwah tersebut sudah melewati tahap *dakwah fardhiyaah*. Informan yang peneliti dapatkan, mereka menolak pemikiran ini setelah mengikuti pembinaan pekanan selama 8 (delapan) sampai (10) pertemuan. Karena pada pertemuan ke-8 (delapan) sampai ke-10 (sepuluh) para peserta pembinaan pekanan ini akan ditawarkan untuk masuk menjadi *syabab* – artinya pemuda – nya HTI yang berarti mereka resmi menjadi kader HTI. Jika

<sup>16</sup> Muhammad Sajirun (2011), *Manajemen Halaqah Efektif*. Era Adicitra Intermedia: Solo Hlm. 74

mereka menerimanya, maka mereka secara otomatis harus mengikuti dauroh (seminar) dan pembinaan pekanan lanjutan yang memang sudah diprogram oleh HTI untuk menunjang kualitas kadernya.<sup>17</sup>

Penolakan yang dilakukan oleh para objek dakwah tidak akan dibiarkan begitu saja oleh kader-kader HTI. Karena, kaderisasi bagi sebuah gerakan merupakan sebuah keniscayaan yang harus dipenuhi agar gerakan ini terus berjalan. Para objek dakwah ini akan terus didekati secara personal (*dakwah fardhiyyah*) oleh mentor-mentornya untuk meyakini pilihan mereka. Harapannya mereka bisa berubah pikiran dan akhirnya mau untuk menerima dan bergabung terhadap dakwah mereka. Namun, bagi mereka yang memang benar-benar menolak setelah tahap pendekatan tersebut maka akan dibiarkan oleh teman-teman HTI atas jalan yang mereka pilih.

### 5.3.(c) Diskusi Terbuka

Diskusi terbuka ini adalah bagian dari salah satu cara mereka melakukan sosialisasi pemikiran. Secara kasat mata, agenda inilah yang akan dilihat oleh masyarakat awam bagaimana HTI ataupun Gema Pembebasan melakukan sosialisasi pemikirannya. Karena, secara jelas mereka melakukan publikasi untuk mensukseskan agenda ini. Publikasi dalam agenda ini mereka lakukan agar banyak orang yang mengakui eksistensi mereka. Eksistensi ini dicari karena ini merupakan bagian dari cara mereka untuk melakukan sosialisasi pemikirannya. Dengan

---

<sup>17</sup> Lihat Hlm. 82

melakukan diskusi ini, mereka akan lebih mudah untuk melakukan *brainstorming* terhadap peserta diskusi.



Gambar 5.1:<sup>18</sup>

Diskusi Terbuka “Menolak Lupa 94 Tahun Dunia Tanpa Khilafah” Oleh Gema Pembebasan Kota Malang

Peneliti melakukan observasi langsung dengan ikut serta pada agenda diskusi terbuka ini. Peneliti menilai bahwa apa yang disampaikan oleh diskusi mereka memang fokus terhadap substansi *Khilafah* yang harus hadir ditengah-tengah masyarakat. Diskusi ini secara rutin dilakukan oleh mereka sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) pekan. Diskusi ini sangat diharapkan dapat mendatangkan berbagai objek dakwah mereka atau minimal kader-kader mereka. Karena, pada akhirnya, meskipun para objek dakwah mereka tidak ada yang hadir agenda ini bisa dijadikan sebagai momentum untuk melakukan *brainstorming* kepada kader-kader mereka agar semakin paham akan substansi yang mereka perjuangkan.

Pada agenda diikuti oleh peneliti, seperti yang sudah disampaikan diatas, mereka memang fokus kepada substansi yang mereka perjuangkan, yakni *Khilafah*.

<sup>18</sup> Dokumentasi Pribadi Peneliti. Gambar diambil pada 3 Maret 2018 Pukul 10.00 WIB

Bukan karena kebetulan saat itu sedang memperingati jatuhnya *Khilafah* dari Tutki Ustmani, melainkan ketika peneliti menelusuri lebih jauh, memang arah diskusi yang mereka jadikan tema besar adalah tentang ‘bagaimana *sih Khilafah* itu?’ karena memang ini adalah narasi yang mereka bawa kepublik sejak munculnya mereka pada 1980-an. Dalam diskusi yang dilaksanakan pada (3/3/2018), mereka mengangkat tema tentang “*Menolak Lupa 94 Tahun Dunia Tanpa Khilafah*”. Pada diskusi tersebut, para pemateri yang berasal dari berbagai kalangan menyampaikan urgensi *Khilafah* itu sendiri, sejarah runtuhnya *Khilafah* sampai bagaimana kita memandang *Khilafah* sebagai *sunnatullah*. Sehingga dalam diskusi tersebut sempat disinggung tentang Indonesia. Mereka menyampaikan bahwa, selama negara ini masih belum menjadikan *Khilafah* sebagai bentuk perjuangan bahkan sebagai bentuk sistem politik, maka negeri ini akan selalu seperti ini saja. Maskud seperti ini saja adalah, negeri ini akan selalu menjadi negara yang akan diintervensi oleh negeri lain, negeri ini akan selalu melakukan hutang, dan berbagai bentuk masalah yang terjadi pada saat ini. mereka memandang bahwa segala bentuk masalah yang menerpa bangsa ini adalah karena sebuah sistem yang sudah terskema dan terstruktur. Maka mau sampai kapanpun, Indonesia akan seperti ini saja. Selama Indonesia belum menjadikan *Khilafah* dan syariat sebagai landasan bernegara.

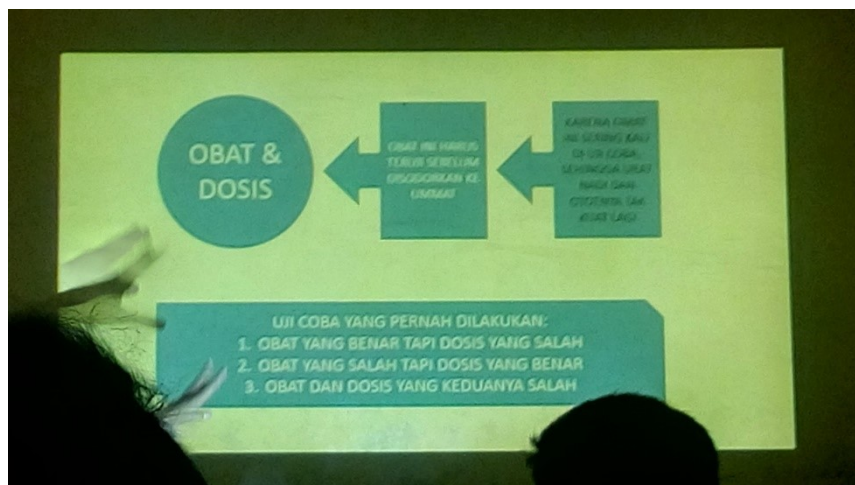
Saat pertemuan kedua peneliti dengan salah satu kader HTI di Kota Malang yang diamanahkan menjadi Ketua Gema Pembebasan Kota Malang, peneliti sengaja untuk menghadiri terlebih dahulu diskusi terbuka yang diagendakan oleh kawan-kawan Gema Pembebasan dalam memperingati 94 tahun dunia tanpa *Khilafah*. Dalam diskusi yang dihadiri oleh mayoritas kader Gema Pembebasan,



simpatisan dan objek dakwah mereka serta beberapa peserta dari kalangan umum, mereka disuguhkan dengan materi diberikan oleh pemantik diskusi terkait *Khilafah* secara mendasar. Seperti yang disampaikan oleh salah satu pemantik, beliau menyampaikan definisi dari *Khilafah*, hukum menegakkan *Khilafah*, dalil tentang *Khilafah*, sejarah tentang *Khilafah* sampai hubungan nusantara dengan *Khilafah* itu sendiri.

Selanjutnya, pemateri yang lain juga menjelaskan bahwa selama ini permasalahan yang ada di Indonesia merupakan hal yang akut terjadi karena kesalahan kita dalam memberikan obat dari permasalahan itu sendiri. Perumpamaan itu beliau sampaikan karena, berbagai masalah yang ada di Indonesia ini selalu tidak pernah selesai yang padahal sudah berbagai solusi dilakukan. Ia menambahkan bahwa Indonesia sudah 7 kali ganti presiden, sudah berbagai cara mahasiswa menyampaikan aspirasinya namun masalahnya akan sama saja karena solusinya bukan Islam, melainkan memberikan solusi yang secara esensial sama saja dengan solusi-solusi sebelumnya namun hanya diganti bungkusnya saja. Ia mencontohkan terkait masalah kepemimpinan di Indonesia yang hari ini dihadapkan dengan pemberantasan korupsi yang tak selesai-selesai bahkan cenderung semakin memburuk. Sang pemantik menyampaikan, selama hukum ini belum hukum Islam maka budaya korupsi ini akan terus bejalan. Karena dengan menggunakan hukum Islam, maka kita pun akan sangat hati-hati dalam memilih pemimpin, sehingga para pemimpin dan perwakilan masyarakat pun tidak berani untuk melakukan praktik korupsi.





Gambar 5.6:<sup>19</sup>  
Gambaran Slide dari Pemantik Diskusi “94 Tahun Dunia Tanpa Khilafah”

Diskusi-diskusi ini rutin mereka agendakan dalam agenda bulanan mereka. Setidaknya untuk agenda diskusi seperti ini mereka melaksanakannya sebanyak 2 kali setiap bulannya. Pemantik diskusi akan digilir kepada setiap kader agar mereka dapat menguasai permasalahan yang mereka hadapi selama ini. mereka akan dipaksa untuk terus berfikir agar solusi yang mereka usulkan dapat diterima masyarakat dan efektif untuk dilakukan. Karena *output* dari agenda ini selain untuk menarik objek dakwah mereka untuk mengenal perjuangan HTI secara menyeluruh, ini juga menjadi wadah para kader untuk mempertajam pemikiran mereka terhadap apa yang sedang mereka perjuangkan.

#### 5.2.(d) Buletin Pekan

Buletin pekan merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh HTI untuk melakukan sosialisasi pemikirannya melalui media cetak. Buletin yang terbit setiap pekan sekali dan dibagikan tiap hari Jum’at ini sempat menjadi fenomena tersendiri

<sup>19</sup> Dokumentasi Pribadi Peneliti

yang menjadi bahan perbincangan masyarakat. Namun sejak dibubarkannya HTI oleh pemerintah pada pertengahan 2017 lalu, buletin ini berhenti cetak. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya buletin yang dibagikan setelah sholat Jum'at.



Gambar 5.2:<sup>20</sup>  
Buletin Al Islam milik HTI

Dalam perjalanannya, buletin yang pada tahun 2018 sudah berusia 25 tahun ini sempat menimbulkan polemik pada khalayak masyarakat di Indonesia. Sekitar April 2017 lalu sempat beredar buletin Al Islam palsu dan menjadi bahan perbincangan masyarakat. Pada April 2017 lalu yang sedang bertepatan dengan sedang berlangsungnya Pilkada Serentak termasuk DKI. Buletin Al Islam menjadi alat yang digunakan untuk *blackcampaign* kepada salah satu pasangan calon yang lolos pada putaran kedua yaitu Anies Baswedan. Buletin edisi ke 852 itu memiliki headline “Menyongsong Gubernur Muslim, Menghentikan Gubernur Kafir, Wujudkan Jakarta Bersyariah”. Ustadz Ismail Yusanto selaku juru bicara HTI

<sup>20</sup> [http://liputanislam.com/wp-content/uploads/2014/09/al-islam\\_1.jpg](http://liputanislam.com/wp-content/uploads/2014/09/al-islam_1.jpg) diakses pada 1 April 2018 pukul 22.28 WIB

langsung memberikan klarifikasi dan menyatakan bahwa itu adalah Buletin Al Islam yang palsu. “itu adalah selebaran gelap yang dibuat oleh orang jahat dengan mengatasnamakan buletin Al Islam” Ujar Ustadz Ismail menambahkan.<sup>21</sup>



**Gambar 5.3:<sup>22</sup>  
Buletin Al Islam Hoax**

Seperti yang sudah disebutkan diawal, buletin Al Islam ini sudah tidak terbit sejak dibubarkannya HTI oleh pertengahan 2017 lalu. Namun, buletin ‘khas’ ini muncul kembali dengan wajah yang berbeda. Awal tahun 2018 muncul buletin yang serupa secara konten namun berbeda secara cover. Seperti yang dilansir oleh *nu.or.id* (17/2) menyebutkan bahwa buletin ini sudah tersebar sejak lama di Masjid Alun-alun Jombang.<sup>23</sup> Betipun di Kota Malang, secara khusus peneliti pernah mendapatkan langsung selebaran ini ketika pulang sholat Jum’at disalah satu masjid di Kota Malang. Kesan pertama yang peneliti dapatkan adalah bahwa ini

<sup>21</sup> Gumiyanti Awaliyah. “HTI: Buletin Al Islam Edisi 852 dipastikan Palsu” <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/04/15/oogg0q384-hti-buletin-al-islam-edisi-852-dipastikan-palsu> diakses pada 01 April 2018 pukul 21.00 WIB

<sup>22</sup> Gumiyanti Awaliyah. “HTI Sebut Semua Konten Buletin Al Islam Edisi 852 Dipalsukan” <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/04/16/oohsmi382-hti-sebut-semua-konten-buletin-al-islam-edisi-852-dipalsukan> diakses pada 01 April 2018 pukul 21.00 WIB

<sup>23</sup> Syamsul Arifin. “Buletin Kaffah Diduga Milik HTI Masih Menyebar di Jombang” <http://www.nu.or.id/post/read/86255/buletin-kaffah-diduga-milik-hti-masih-menyebar-di-jombang> di akses pada 1 April 2018 Pukul 22.00 WIB

merupakan buletin pengganti dari Al Islam karena konten yang mirip namun hanya dibedakan dengan cover serta mengganti namanya.



Gambar 5.4:<sup>24</sup>  
Buletin Kaffah

Bicara konten dari Al Islam dan Kaffah ini, keduanya membahas *Khilafah* sebagai solusi dari berbagai permasalahan yang ada. Karena seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa buletin ini adalah salah satu dari berbagai cara untuk melakukan sosialisasi pemikiran *Khilafah* oleh HTI, maka pembahasan dari buletin ini tak jauh dari makna serta memposisikan *Khilafah* sebagai solusi dari permasalahan kontemporer yang ada di Indonesia sekaligus menjelaskan Islam secara menyeluruh. Seperti yang ditertera pada gambar diatas, buletin tersebut menjelaskan tentang *Khilafah* sebagai ajaran Islam. Tema tiap pekannya dari buletin ini selalu konsisten untuk membahas hal-hal yang sudah disampaikan tadi.

<sup>24</sup> Dokumentasi pribadi peneliti

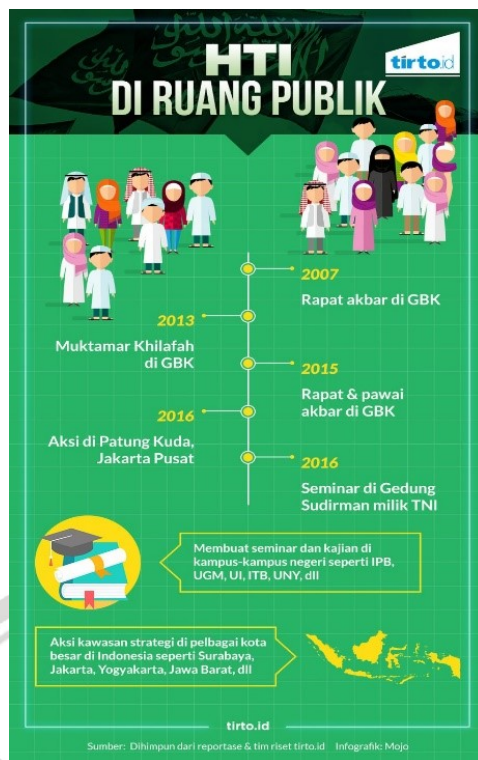


Namun yang perlu menjadi perhatian, buletin ini merupakan agenda nasional, namun setiap daerah wajib untuk mendistribusikan di kotanya masing-masing sehingga buletin ini dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat di seluruh Indonesia.

#### 5.2.(e) Unjuk Massa

Unjuk massa merupakan suatu usaha yang dilakukan HTI untuk menunjukkan eksistensi mereka kepada khalayak. Eksistensi yang dimaksud adalah setidaknya mereka dapat menunjukkan bahwa gerakan mereka sudah didukung oleh banyak orang dari berbagai kalangan ataupun latar belakang. Seperti yang disampaikan oleh Habib (ketua Gema Pembebasan Kota Malang) bahwa gerakan mereka ini bahkan sudah banyak didukung dari kalangan dosen sampai TNI meskipun mereka-mereka ini tidak akan banyak dieskpos kepada khalayak untuk meminimlisir *muhdarat*. Bentuk unjuk massa yang mereka lakukan ada beberapa bentuk seperti unjuk rasa/demonstrasi, Simposium Nasional Lembaga Dakwah Kampus (SIMNAS LDK), Muktamar Khilafah, Pawai *Khilafah*, serta *Tabligh Akbar*.





**Gambar 5.5:<sup>25</sup>**  
**Infografis Penjelasan Penggunaan Ruang Publik yang digunakan HTI untuk mempropagandakan *Khilafah***

Seperti yang dilansir oleh *beritasatu.com* dalam skala nasional, agenda-agenda tersebut sudah pernah telaksana paling tidak satu kali. Agenda Simposium Nasional Lembaga Dakwah Kampus (SIMNAS LDK) yang dilaksanakan 2017 lalu di IPB yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) misalnya, dalam agenda yang dihadiri kurang lebih 1.500 mahasiswa dari seluruh kampus yang tersebar di Indonesia mereka melakukan *bai'at* untuk mendirikan *Khilafah*. Agenda yang menimbulkan polemik sehingga berujung pada pembubaran HTI pada pertengahan 2017 ini setidaknya menunjukkan bahwa mereka berhasil untuk menunjukkan eksistensi mereka bahwa mereka ada. Meskipun menimbulkan polemik, setidaknya hal ini membuka wawasan masyarakat tentang HTI bahkan *Khilafah* sekalipun. Seperti yang disampaikan Habib pada saat wawancara peneliti (21/2) lalu:

<sup>25</sup> Mawa Kresna. "*HTI Memakai Kampus dan GBK untuk Mempropagandakan Khilafah*" <https://tirtoid.id/hti-memakai-kampus-dan-gbk-untuk-mempropagandakan-khilafah-coxM> diakses pada 1 April 2018 Pukul 16.00 WIB

“Salah satu hikmah dari PERPPU ormas ini yaa ide khilafah itu sudah bukan jadi ide yang diam-diam, semuanya jadi tau dengan berbagai sudut pandangnya. Bahkan Cak Nun pun, pembicaraannya sekarang khilafah dengan versi beliau. Pak Mahfud MD juga, yaa pokoknya semua ini bagian dari hikmah kita. Kalau dulu kektika kita bilang khilafah itu ya asing banget. Saya tau khilafah itu sejak SMA. Karena ada di pelajarannya. Sayakan dulu MAN. Di matpel Fiqh itu ada ‘khilafah’. Yang saat ini di bredel dan tidak diajarkan lagi. Padahal itu sudah ada sejak lama.”<sup>26</sup>

Perlu dipahami, bahwasannya unjuk massa ini merupakan bagian dari salah satu strategi sosialisasi pemikiran *Khilafah* oleh HTI yang dilakukan secara nasional. Untuk ukuran Kota Malang, unjuk massa yang dilakukan hanya sekedar melakukan demonstrasi. Namun sejak pertengahan tahun 2017, unjuk rasa yang dilakukan HTI sudah tidak menggunakan nama HTI melainkan bergerak melalui gerakan mahasiswanya yakni Gema Pembebasan. Namun untuk menunjukkan eksistensi mereka secara jumlah massa, dapat terlihat juga ketika mereka melaksanakan diskusi terbuka yang biasa mereka selenggarakan. Seperti yang sudah dipaparkan pada poin 5.1.(c).<sup>27</sup> Meskipun melalui cover gerakan mahasiswanya yakni Gema Pembebasan.

Namun, Pembubaran HTI yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah merupakan puncak dari bentuk penolakan berbagai kalangan terhadap gerak yang dilakukan oleh HTI.<sup>28</sup> Menurut data yang dihimpun oleh *tirto.id*, setidaknya pada 2017 ada 6 aksi yang menolak pergerakan HTI. Salah satu bentuk penolakan HTI

<sup>26</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Ketua Gema Pembebasan Kota Malang pada 21 Februari 2018

<sup>27</sup> Lihat Hlm. 73

<sup>28</sup> Kristian Erdianto. “Yusril: Tanpa Pengadilan, Pemerintah Bisa Menuduh Ormas Anti-Pancasila Secara Sepihak”  
<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/18/05460301/yusril--tanpa-pengadilan-pemerintah-bisa-menuduh-ormas-anti-pancasila-secara> diakses pada Ahad, 8 April 2018 pukul 13.00 WIB

muncul dari GP Anshor Tulungagung, Jawa Timur. Ketua cabang GP Anshor Tulungagung menyebutkan bahwa penghadangan dan aksi ini dilakukan karena kegiatan HTI ini membawa misi *Khilafah* dalam kehidupan bernegara dan berpotensi memecah belah masyarakat.<sup>29</sup> Begitupun seperti yang dilansir oleh [bbc.com](http://bbc.com), mereka menyebutkan bahwa lebih dari 90% orang Indonesia mendukung penolakan terhadap HTI dan ISIS. Hal ini didasari oleh survey SMRC pada 14-20 Mei 2017 dengan 1500 Responden.<sup>30</sup>

Hal serupa terjadi dan dirasakan oleh ustadz yang dikenal memiliki afiliasi dengan HTI seperti Ustadz Felix Siaw.<sup>31</sup> Pada semester akhir 2017 lalu, beberapa penolakan dari GP Anshor dialami olehnya. Sabtu 4 November 2017, Ustadz Felix Siaw berencana untuk menghadiri sebuah forum diskusi di Masjid Manarul Gempeng, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur mendapatkan penolakan langsung dari GP Anshor Pasuruan. Hal ini didasarkan atas prasangka bahwa Ustadz Felix akan melakukan promosi gagasan *Khilafah* sebagaimana yang dilakukan beliau ketika HTI masih berbadan hukum.

Seperti yang sudah disampaikan diatas, bahwa bentuk penolakan ini tidak hanya terjadi sekali ataupun dua kali saja. Di Kota Malang, secara khusus ada 1 (satu) kasus yang pernah terjadi. Penolakan yang juga dilakukan oleh GP Anshor

---

<sup>29</sup> Ahmad Khadafi. "*Hizbut Tahrir Indonesia vs "Pancasila" dan "NKRI"*". <https://tirto.id/hizbut-tahrir-indonesia-vs-pancasila-dan-nkri-cn5x> diakses pada Ahad, 8 April 2018 pukul 13.00 WIB

<sup>30</sup> Isyana Artharini. "*Lebih dari 90% Orang Indonesia Dukung Penolakan HTI dan ISIS*". <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40153060> diakses pada Ahad 8 April 2018 pukul 13.00 WIB

<sup>31</sup> Rio Apinino. "*Penolakan GP Anshor Terhadap Felix Siaw terburu-buru*". <https://tirto.id/penolakan-gp-ansor-terhadap-felix-siauw-terburu-buru-czDF> diakses pada Ahad 8 April 2018 pukul 13.00 WIB

ini akhirnya berujung kepada pembubaran acara tersebut. Kedatangan Ustadz. Felix Siaw saat itu adalah untuk menjadi pemateri dalam agenda *Talk Show* yang bertajuk ‘Cinta Mulia’ pun tak luput dari pembubaran tersebut. Seperti yang dilansir oleh [republika.co.id](http://republika.co.id), menyebutkan bahwa penolakan ini berdasarkan karena agenda tersebut tidak memiliki izin dan sosok Ustadz Felix yang merupakan kader HTI dan sering menyuarakan terbentuknya *Khilafah* di Tanah Air.<sup>32</sup> Padahal jika kita mau untuk menyangkut pautkan pemikiran HTI dengan materi saat itu, maka kita tidak akan pernah penemuan benang merahnya.

Penolakan-penolakan ini mulai terjadi sejak Badan Hukum yang dimiliki oleh HTI dicabut oleh pemerintah pertengahan 2017 lalu. Namun bentuk penolakan yang sampai membubarkan acara nampaknya bukan hal yang elok dilakukan pada era demokrasi seperti saat ini. Hal ini merupakan salah satu dari resiko yang memang harus dihadapi oleh HTI dan para kadernya karena wacana yang mereka bawa, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ketua Gema Pembebasan.

Namun secara umum, penolakan yang terjadi atas pemikiran dan tokoh-tokoh HTI baru dilakukan oleh GP Anshor. Peneliti sampai hari ini belum menemukan penolakan yang dilakukan oleh selain GP Anshor. Masyarakat secara umum memang merasakan keresahan. Hal ini dirasakan oleh penulis ketika melakukan silaturahmi dan mengenalkan diri kepada Ketua RT setempat di lingkungan tempat tinggal peneliti. Ketika peneliti mengenalkan diri sebagai

---

<sup>32</sup> Chrystianingsih. “Ini Alasan GP Anshor Malang Menolak Talk Show Ustadz Felix Siaw” <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/05/01/op9nye361-ini-alasan-gp-ansor-malang-menolak-talk-show-ustaz-felix-siauw> diakses pada Ahad 8 April 2018 Pukul 13.00 WIB



mahasiswa, kegiatan peneliti dan aktif dilembaga apa di kampus. Ketika peneliti mengatakan Rohis, muncul pertanyaan “itu disitu diajarkan tentang *Khilafah* ya?” hal ini sedikit menunjukkan bahwa keresahan muncul akibat informasi yang beredar di media cetak, televisi dan media sosial. Hingga penulis menyampaikan bahwa di Rohis tidak diajarkan tentang *Khilafah*, ketua RT terlihat lebih tenang dan percaya terhadap penulis.

### 5.3 Analisa Hasil Sosialisasi Pemikiran *Khilafah* oleh HTI di Kota Malang

Hadirnya HTI ditengah-tengah masyarakat merupakan salah satu bagian dari perjuangan yang diusahakan oleh HTI. Peneliti mencoba menganalisa usaha yang dilakukan oleh HTI dalam melakukan sosialisasi pemikiran *Khilafah* yang menjadi landasan pemikiran mereka. Seperti yang sudah disebutkan, hadir serta masivnya gerakan kelompok ini merupakan sebuah fenomena yang dapat kita rasakan keberadaannya sampai hari ini. Keberadaan kelompok ini berada dalam puncaknya sejak acara Simposium Nasional (Simnas) Lembaga Dakwah Kampus 2017 oleh Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) yang dilaksanakan di IPB 2017 lalu. Agenda ini menghadirkan polemik hingga sapai diterbitkannya PERPPU Ormas No. 2 Tahun 2017 sekaligus menjadi ajang yang amat terasa untuk mengenalkan HTI ke masyarakat. Hal ini di amini oleh Ketua Gema Pembebasan Kota Malang yang bernama Habib:

“Itu bagian dari usaha kita. Salah satu hikmah dari PERPPU ormas ini yaa ide khilafah itu sudah bukan jadi ide yang diam-diam, semuanya jadi tau dengan berbagai sudut pandangnya. Bahkan Cak Nun pun, pembicaraannya sekarang khilafah dengan versi beliau. Pak



Mahfud MD juga, yaa pokoknya semua ini bagian dari hikmah kita. Kalau dulu kektika kita bilang khilafah itu ya asing banget.”<sup>33</sup>

Hal tersebut disampaikan karena menurutnya, akhirnya masyarakat hari ini paling tidak penasaran dan mencari tau apa yang dimaksud dengan khilafah. Menurutnya, ilmu tentang khilafah ini sudah dibungkam sejak 94 tahun yang lalu akhirnya mulai kembali sering terdengar oleh telinga masyarakat. Meskipun banyak konotasi negatif yang disampaikan oleh masyarakat, namun setidaknya masyarakat udah kembali *aware* terhadap apa yang sedang diperjuangkan oleh HTI.

Karenanya, peneliti mencoba menganalisa bagaimana HTI melakukan sosialisasi pemikirannya melalui sudut pandang yang berbeda. Peneliti mencoba untuk mengelaborasi startegi yang dilakukan oleh HTI dengan 7 (tujuh) aspek besar yang dipaparkan oleh Hasan Al Banna dalam melakukan sosialisasi pemikiran politik Islam. Hal ini didasari dengan tahapan yang dilakukan oleh HTI untuk melakukan dakwahnya. Pada tahapan yang dicanangkan oleh HTI, mereka memiliki 3 (tiga) tahapan dakwah yang mereka lalui agar dapat diterima oleh masyarakat, diantaranya:

1. Tahap Pembinaan dan Pengkaderan (*Marhalah at-Tatsqiif*)

Tahap ini dilaksanakan untuk membentuk kader-kader yang mempercayai pemikiran dan metode Hizbut Tahrir, dalam rangka pembentukan kerangka tubuh partai;

2. Tahap Berinteraksi dengan Ummat (*Marhalah Tafaa'ul ma'a al-Ummah*)

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara Peneliti kepada Ketua Gema Pembebasan pada 21 Februari 2018

Tahap ini dilaksanakan agar umat turut memikul kewajiban dakwah Islam, hingga umat menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, agar umat berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan;

### 3. Tahap Penerimaan Kekuasaan (*Marhalah Istilaam al-Hukm*)

Tahap ini merupakan tahap terakhir, yakni dilakukan setelah masyarakat sudah memahami pentingnya *Khilafah*, dan pemerintah mau untuk memberikan kekuasaannya kepada HTI sehingga mau untuk melaksanakan penerapan hukum Islam secara menyeluruh dan mau untuk mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.<sup>34</sup>

Jika disandingkan dengan 7 (tujuh) tahap dari teori yang disampaikan Hasan Al Banna dalam melakukan sosialisasi pemikiran politik Islam<sup>35</sup>, maka 3 (tiga) tahap yang dijadikan langkah kongkrit oleh HTI dapat dispesifikkan sehingga menjadi 7 (tujuh) tahap dari teori yang dikemukakan oleh Hasan Al Banna. Hal tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

No	Tahap Al Banna	Tahap HTI	Fokus
1	<i>Ishlahul Fardhi wa I'daad ar-Rijaal</i> (Perbaikan kepribadian dan penyiapan SDM/kader)		Pada tahap ini, kesamaan antara kedua tahap diantara mereka adalah fokus untuk membina kader yang mereka miliki, sehingga mereka memiliki karakteristik yang mereka harapkan. Setelah memiliki karakter yang mereka harapkan, harapannya
2.	<i>Binaa'ul Ushrah Muslimah</i> (Pembinaan dalam keluarga muslim)	<i>Marhalah At-Tatsqiif</i> (Tahap Pembinaan dan Pengkaderan)	

<sup>34</sup> Op. Cit. Sudarno Shobron. Hal. 34

<sup>35</sup> Lihat Hal. 8, poin 1

			mereka siap untuk mampu berinteraksi dengan masyarakat untuk melakukan sosialisasi pemikiran mereka kepada masyarakat.
3.	<i>Irsyaadul Mujtama'</i> (Membimbing Masyarakat)		Pada tahap ini, diantara keduanya, mereka sudah mencapai tahapan untuk berinteraksi dengan masyarakat. Melakukan sosialisasi pemikirannya dengan berbagai cara. Misal, melakukan infiltrasi kepada lembaga-lembaga, atau dengan cara yang lain seperti menggunakan berbagai media (sosial/cetak). Selain itu mereka menjadi penggerak di masyarakatnya untuk menjadi bagian dari kontrol sosial kepada pemerintah yang sedang menguasai pemerintahan.
4.	<i>Tahrirul Wathan</i> (Membebaskan negeri)		
5.	<i>Ishlahul Hukumah</i> (Memperbaiki pemerintahan)	<i>Marhalah Tafaa'ul ma'a al Ummat</i> (Tahap berinteraksi dengan Ummat)	
6.	<i>I'daatul Qiyamud Daulih Lil Ummati Islamiyyah</i> (Mengembalikan peran umat Islam dalam percaturan Internasional)	<i>Marhalah Istilaam al-Hukm</i> (Tahap Penerimaan Kekuasaan)	Pada tahap ini, kesamaan diantara keduanya adalah sudah menuju kepada <i>khilafah islamiyyah</i> . Intinya, masyarakat sudah siap untuk menerima Islam sebagai solusi dari pemasalahan yang ada selama ini. sehingga segala sesuatu akan kembali kepada Islam.
7.	<i>I'lamu ustadziyatul 'alam</i> (Mendeklarasikan Islam sebagai soko guru peradaban)		

Tabel 5.1:<sup>36</sup>  
Spesifikasi Tahap yang dimiliki oleh HTI yang disandingkan oleh Tahap Al Banna

Maka, pada sub bab ini, peneliti akan menjelaskan dengan lebih rinci tahapan-tahapan yang dilakukan oleh HTI melalui sudut pandang teori sosialisasi pemikiran politik Islam yang dikemukakan oleh Hasan Al Banna, sebagai berikut:

#### 5.3.(a) Karakter Kader Sebagai Penopang Utama Pemikiran *Khilafah*

Dalam proses melakukan sosialisasi, maka satu hal dasar yang harus disiapkan dan amat diperharikan adalah kondisi kader itu sendiri. Kader dari gerakan tersebut merupakan pondasi sekaligus tulang punggung yang dimiliki untuk terus memberikan pengaruh dari gerakan tersebut kepada masyarakat. Begitupun ketika akan melakukan sosialisasi. Hal ini menurut Elvandi sebagai modal dasar perjuangan politik umat Islam.<sup>37</sup> Karena, kader-kader ini merupakan para muslim calon politisi yang akan terus berkembang menjadi seorang negarawan, seperti halnya 10 sahabat Rasulullah SAW. yang telah dibina di Makkah, yakni Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqash, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'id bin Zaid.

Mereka semua merupakan manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. dan disebut sebagai 10 (sepuluh) sahabat Nabi yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Mereka merupakan contoh pemimpin ummat, sehingga siapapun dari mereka yang menjadi *Khalifah* tidak akan menjadi masalah karena kelayakan mereka. Layaknya

<sup>36</sup> Diolah oleh peneliti

<sup>37</sup> Op.Cit Elvandi 182

mereka tidak dapat dilepaskan dari cara mendidik Rasulullah SAW yang sangat matang secara pemikiran serta gerakan. Modal-modal yang diberikan oleh Rasulullah lah mereka mampu untuk mulai membangun masyarakat baru di Madinah.

Secara spesifik, Al Banna memberikan karakter dasar yang harus dimiliki oleh seorang muslim yang menjalani proses perbaikan karakter. Diantaranya:<sup>38</sup>

- a. *Saliimul 'Aqiidah* (Aqidah yang lurus)
- b. *Shoshiul 'Ibaadaah* (Ibadah yang benar)
- c. *Matiinul Khuluq* (Akhlaq yang kokoh)
- d. *Mutsafaqul Fiqr* (Wawasan yang luas)
- e. *Qowiyul Jism* (Fisik yang kuat)
- f. *Qoodirun 'Ala Al Kasbi* (Mandiri dalam usaha)
- g. *Mujaahidu Lil Hawahu* (Memiliki kesungguhan diri)
- h. *Harishun 'Ala Waqtihi* (Pandai Mengelola waktunya)
- i. *Munazhamun Fii Su'unihi* (Mampu mengorganisasi urusannya)
- j. *Naafi'un Lil Ghairihi* (Bermanfaat bagi orang lain)

Sepuluh dasar karakter inilah yang seharusnya menjadi hal penting yang harus dimiliki oleh seorang muslim, terkhusus bagi mereka yang terjun dalam dunia perpolitikan, atau bahkan bagian dari politik itu sendiri. Mengingat dalam dunia perpolitikan setiap pribadi harus memiliki karakter yang unggul untuk memperjuangkan kepentingan yang ia bawa sendiri. Maka, rasanya karakter-karakter

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, Hlm. 183



tersebut merupakan suatu hal yang memang harus dimiliki oleh seorang politisi muslim agar kepentingan Islam yang dibawa dapat diperjuangkan di medan politik yang amat dinamis.

HTI sebagai partai politik non-partai pun memiliki standar kualitas yang harus dimiliki oleh kader-kadernya. Sebagai salah satu partai politik yang berlandaskan Islam sebagai ideologinya, standar yang dimiliki HTI agar kadernya siap untuk mengarungi medan dakwah bisa dipandang sebagai standar yang tinggi. Standar tinggi ini pun akhirnya menghasilkan kader-kader yang mempunyai daya militansi yang kuat. Militansi yang hadir ini pun dipengaruhi oleh faktor kondisi medan dakwah mereka. Ketua GP Malang menyampaikan:

“Kita ada pembinaan rutin, mungkin karena faktor kita minoritas, dalam artian kita sedikit jumlahnya dan saat ini kita juga gak dipandang dalam artian gak di prioritaskan kalau dikampus jika di jajarkan dengan omek lainnya. Karena secara kuantitas kita jumlahnya sedikit. Bahkan kemarin ketika kita lagi sebar surat ada celetukan ‘GP masih ada tah?’ . gak masalah sebenarnya, tapi karena kita dipandang sebelah mata, akhirnya membuat militansi kita terbangun. Karena ada semangat kalau kita harus mengadakan GP, kita harus menghidupkan GP, dsb. Saya kita wajar juga sih kalau sebuah organisasi yang lagi proses membangun itu wajar kalau kader-kadernya atau anggota-anggotanya militan. Nah, militansi ini muncul kita coba pupuk dari forum-forum pekanan seperti liqo, atau forum yang umum seperti diskusi-diskusi dan juga aksi. Pun dengan kontak tokoh, karena ide yang kita bawa jelas anti mainstream, pasti pertanyaannya banyak dan kita butuh mereka. Ketika kita ditolak dimana-mana secara struktural kita selalu memompa untuk meyakini bahwa yang kita sampaikan itu Islam. Kalau ditolak itu wajar. Dulu rasulullah aja ditolak kok, dari situlah mungkin tumbuh yang namanya militansi.”<sup>39</sup>

Faktor medan dakwah inilah yang menjadikan kader-kader HTI dapat dikatakan sebagai kader-kader yang unggul. Militansi menghadirkan stimulus agar

<sup>39</sup> Hasil Wawancara Peneliti kepada Ketua Gema Pembebasan pada 3 Maret 2018

kader-kader yang terkait merasa harus terus belajar sehingga secara otomatis kualitas mereka pun terus meningkat. Kondisi mereka hadir dimasyarakat sebagai minoritas dikarenakan banyak yang belum bisa menerima *Khilafah* sebagai ide yang mereka wacanakan dan mereka serukan kepada masyarakat. Ini menjadi alasan yang kuat bahwa mereka hadir sebagai minoritas, meskipun mereka adalah bagian dari kaum mayoritas di Indonesia, yakni sebagai kumpulan individu yang muslim.

Secara karekteristik, kualitas yang diinginkan oleh HTI untuk kader-kadernya ada tiga karakteristik. Karakteristik *pertama* memiliki perasaan yang sama, yakni perasaan Islam. *Kedua*, memiliki peraturan yang sama yakni peraturan Islam. *Ketiga*, memiliki pemikiran yang sama yakni pemikiran Islam. Tiga karakter ini merupakan tahapan yang dibangun oleh HTI kepada kader-kadernya. Pada karakter yang pertama, fokusannya adalah agar kader memiliki akhlak yang Islami. Akhlak yang Islami merupakan perilaku keseharian seorang individu yang mencerminkan ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya pada karakter yang kedua, fokusannya adalah memiliki kesamaan dalam standar kedisiplinan tiap-tiap individu maupun antar individu dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya seperti tiap-tiap kader HT ataupun GP tidak boleh melakukan ikhtilat (berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahromnya) ditempat yang sepi atau tiap-tiap kader. Meskipun peraturan ini merupakan peraturan yang amat lumrah diterapkan oleh berbagai gerakan Islam secara umum, namun yang menarik dari Gema Pembebasan adalah tidak adanya status keanggotaan terhadap perempuan. Artinya, tidak ada kader dari Gema Pembebasan yang perempuan. Karena Gema

Pembebasan memang dilahirkan sebagai organisasi yang anggotanya seluruhnya adalah laki-laki.

Ketiga adalah tentang pemikiran yang diikat dengan pemikiran Islam. Pengertian diikatnya kader-kader dengan pemikiran Islam adalah memahami bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan semua hal secara sempurna dan menyeluruh, tidak parsial. Islam mendidik manusia dengan ajaran-ajarannya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Artinya, segala aktifitas yang dilakukan oleh tiap-tiap individu selalu ada petunjuknya untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Karenanya, kader-kader HTI didorong untuk terus memiliki pandangan serta fikiran yang segala sesuatunya dikembalikan kepada Islam. Mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Perlakuan ini dapat dibuktikan ketika kita berkomunikasi dengan kader-kader HTI. Ketika kita sudah masuk kepada tahap yang lebih dalam untuk berdiskusi, mereka selalu mengusahakan untuk mencari solusi atas landasan Islam. Peneliti tidak memungkiri bahwa idealisme mereka merupakan idealisme yang amat berharga, dan masuk akal.

Konsep yang disampaikan oleh Al Banna tentang pembentukan personal, secara tidak langsung terimplementasikan oleh HTI dalam membentuk kadernya. 10 karakter yang dijadikan standar oleh Al Banna secara garis besar cocok dengan 3 (tiga) hal yang dijadikan standar oleh HTI. Peneliti menganalisa bahwa 10 (sepuluh) karakter yang dicanangkan oleh Al Banna merupakan penjelasan spesifik dari 3 (hal) yang jadi standar oleh HTI. Berikut penjelasannya:

No	Karakteristik HTI	Karakteristik Al Banna
1.	Memiliki Perasaan yang sama, yakni perasaan Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Saliimul Aqidah</i> (Aqidah yang lurus)</li> <li>• <i>Mittnul Khuluq</i> (Akhlak yang kokoh)</li> </ul>
2.	Memiliki peraturan yang sama, yakni peraturan Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Shohihul Ibadah</i> (Ibadah yang benar)</li> <li>• <i>Mujaahidu Lil Hawaahu</i> (Memiliki kesungguhan diri)</li> <li>• <i>Qoodirun 'ala Al Kasb</i> (Mandiri dalam usaha)</li> <li>• <i>Qowiyyul Jism</i> (Fisik yang kuat)</li> <li>• <i>Munadzhamun Fii Su'unihi</i> (Mampu mengelola urusannya)</li> </ul>
3.	Memiliki pemikiran yang sama yakni pemikiran Islam.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Mutsaqoful Fiqr</i> (Wawasan yang luas)</li> <li>• <i>Harriishun 'Alal Waqtihi</i> (Pandai mengelola waktunya)</li> <li>• <i>Naaqi'un Lii Ghoirihi</i> (Bermanfaat untuk orang lain)</li> </ul>

Tabel 5.2:<sup>40</sup>

#### Komparasi Karakteristik kader HTI dan Hasan Al Banna

Komparasi antara konsep yang dimiliki oleh HTI dan Hasan Al Banna, dapat kita saksikan bahwa keduanya memiliki karakteristik yang mirip bahkan cenderung sama. Namun yang membedakan antara keduanya adalah suplemen yang diberikan oleh keduanya. Karakter kader-kader HT yang *straigh* terhadap apa yang

<sup>40</sup> Diolah oleh peneliti

menjadi pegangan mereka dalam berbagai kondisi yang mereka hadapi dilapangan. Kondisi lapangan yang mereka hadapi adalah kondisi mereka merasakan bahwa mereka adalah bagian dari minoritas yang ada di Indonesia karena ide yang mereka bawa. Mereka mengakui bahwa ide yang mereka bawa merupakan ide yang sulit diterima banyak orang, namun ide ini adalah hal yang mutlak dan benar menurut mereka. Sehingga, pembentukan karakter ini akan terus ditempa oleh HTI kepada kader-kadernya sampai kadernya memiliki karakter yang kuat. Karakter ini nantinya dicerminkan dengan bentuk militansi yang ditunjukkan oleh para kader tersebut untuk melakukan dakwah atau melakukan sosialisasi pemikirannya kepada masyarakat sekitar.

Karakter yang mereka miliki diatas ini akan sangat menentukan sejauh apa mereka bisa memahami konsep *Khilafah* begitu juga dengan urgensi tentang *Khilafah* itu sendiri – yang nanti akan dibahas pada poin 5.3.(c) – menurut Habib, dengan karakter mereka yang sudah sangat kental, secara oromatis mereka juga memahami apa dan bagaimana bentuk dari konsep *Khilafah* itu sendiri. Semakin dalam mereka memahami bagaimana urgensi dan konsep dari *Khilafah* itu maka mereka akan semakin kuat karakternya yang terintegrasi dengan apa yang menjadi cita-cita mereka.

### 5.3.(b) Merasa Penting untuk Memperbaiki Pemerintahan

HTI akan selalu memposisikan diri sebagai oposisi murni selama pemerintah tidak menggunakan syariat Islam dalam sistem pemerintahannya. Pandangan mereka terhadap pemerintah mutlak untuk melakukan koreksi selama sistem yang digunakan belum dijalankan atas dasar syariat. Mereka memilih sebagai oposisi



murni dalam hal ini. Sehingga, segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah, HTI akan selalu kritis. Bagaimanapun, HTI memiliki garis perjuangan agar kader-kadernya terus melakukan dakwah, sampai nanti pada waktunya pemerintah mau mendengar pandangan mereka. Demo atau aksi turun ke jalan merupakan salah satu upaya yang dilakukan HTI maupun organisasi sayapnya. Selain untuk memberikan pencerdasan kepada masyarakat akan pentingnya *Khilafah*.

Pada beberapa kesempatan aksi yang dilakukan oleh HTI di Kota Malang, mereka mengangkat isu-isu kenegaraan yang memang itu adalah tentang kemaslahatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Setidaknya pada medio 2016 ada dua aksi yang dilakukan oleh HTI di Kota Malang. Diantaranya “Demo Anti-Ahok” dan “Rangkaian Aksi 212”. Pada “Demo Anti-Ahok” disampaikan bahwa aksi ini adalah dampak dari apa yang dilakukan Ahok. Ahok yang menistakan Al Qur’an pada pertengahan Oktober 2016 lalu menyakiti umat muslim diseluruh dunia. Pada aksi yang berlangsung bersama beberapa Ormas Islam di Kota Malang ini, HTI mengirim setidaknya ratusan kadernya untuk mengikuti aksi tersebut.<sup>41</sup> Hal ini peneliti amini karena pada saat aksi tersebut, peneliti mengikuti aksi tersebut dan sempat bertemu dengan beberapa kader HTI yang peneliti kenal dan mereka menyebutkan bahwa mereka membawa ratusan kader dan simpatisan untuk mengikuti aksi. Aksi yang dilaksanakan di Tugu Kota Malang ini merupakan aksi gabungan dari berbagai ormas, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Begitupun dengan aksi yang dilakukan pada 2 Desember

---

<sup>41</sup> Edwin Fajerial. “*Demo Anti Ahok, HTI Pilih Kota Malang*”  
<https://nasional.tempo.co/read/817451/demo-anti-ahok-hizbut-tahrir-idonessia-pilih-kota-malang> diakses pada 15 April 2018 pukul 09.30 WIB

2016 yang dilakukan oleh HTI di Kota Malang. Aksi ini bagian dari rangkaian yang dilakukan di Jakarta yang *mashur* disebut sebagai “Aksi 212”. Aksi ini digalang oleh HTI dan beberapa ormas Islam di Kota Malang. Aksi yang menuntut agar Ahok segera ditahan ini menghadirkan ribuan massa.<sup>42</sup>

Setidaknya, aksi-aksi yang dilakukan HTI ini adalah bagian dari usaha mereka untuk melakukan perbaikan pemerintahan atas apa yang terjadi. Mereka beranggapan bahwa, selama Ahok tidak ditahan, maka pemerintahan kita bermasalah. Pun dengan kondisi latar belakang agama dari Ahok. HTI merupakan salah satu ormas Islam yang dengan lantang menyatakan bahwa “Haram memilih Pemimpin Kafir”. Hal ini sudah dilakukan oleh HTI sejak diangkatnya Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta pasca dilantiknya Presiden Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia pada Oktober 2014. Namun, puncaknya terjadi sejak Ahok mendeklarasikan diri untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Seperti yang diutarakan oleh Habib:

“... Ketemulah HTI, karena kita sebelumnya memang mengadakan aksi besar-besaran “Tolak pemimpin Kafir” kalau dikalangan mahasiswa, yang di UI itu yang akhirnya sampe Ahoknya juga nangepin...”<sup>43</sup>

Karena menurut mereka jika pemimpin sebuah daerah atau bangsa itu kafir, maka tidak akan mungkin terjadi apa yang disebut dengan *Khilafah* serta Allah sudah melarangnya pada Q.S Al Maidah ayat 51. Maka, teman-teman HTI terkesan sangat ‘menggebu-gebu’ untuk terus mengkampanyekan “tolak pemimpin Kafir”.

<sup>42</sup> Aflahul Abidin. “Ditengah Gerimis, Seribuan Massa HTI Malang Berdemo di Jalan Tugu” <http://suryamalang.tribunnews.com/2016/12/02/di-tengah-gerimis-seribuan-massa-hti-malang-berdemo-di-jalan-tugu> diakses pada 15 April 2018 pukul 09.30 WIB

<sup>43</sup> Hasil Wawancara Peneliti Kepada Ketua Umum Gema Pembebasan Kota Malang pada 21 Februari 2018

Aksi tersebut dilakukan secara nyata maupun melalui dunia maya. Pemahaman ini mereka peroleh karena memang pada realitanya, jika pada suatu daerah yang masyarakatnya mayoritas muslim, lalu lebih mendahulukan untuk memilih pemimpin bukan dari bagiannya, maka akan timbul kehancuran. Maka HTI dan sayap gerakannya selain berfokus kepada hal ini, mereka juga fokus untuk terus berusaha memperbaiki pemerintahan yang ada sebagai oposisi murni, seperti yang sudah disampaikan diatas.

Pemahaman bahwa penting bagi mereka untuk memperbaiki pemerintahan nantinya akan terus menggiring opini mereka kepada penerapan syari'at Islam yang *kaffah* di Indonesia. Namun hal ini dilakukan secara perlahan dan sangat persuasif. Mengingat, masih banyak masyarakat di Indonesia yang 'takut' akan ide mereka terkait penerapan syariat Islam secara *kaffah*. Karenanya, mereka mencoba memulai untuk memperbaiki pemerintahan dengan cara melakukan aksi-aksi yang sudah disebutkan diatas sambil memberikan solusi yang sesuai dengan ide dan kajian mereka yang sebenarnya, sampai saat ini belum ada ide ekstrem yang disampaikan mereka kecuali kampanye mereka "ayo tegakkan *Khilafah*".

#### 5.3.(c) Merasa Penting untuk Mengembalikan *Khilafah*

*"Khilafah adalah sebuah keniscayaan, maka pertanyaan mendasar yang harus kita tanyakan kepada diri kita adalah, saat Khilafah itu kembali tegak kita berada pada posisi sedang menolaknya atau kita sedang memperjuangkannya?"*

Kalimat tersebut muncul di tengah-tengah acara diskusi terbuka yang bertajuk "*Menolak Lupa 94 Tahun Dunia Tanpa Khilafah*" di salah satu kafe di tengah-tengah Kota Malang. Kalimat tersebut kembali diperkuat melalui jawaban atas

pertanyaan peneliti kepada pemateri pada saat itu. Peneliti menanyakan “*Jika Khilafah adalah sebuah keniscayaan, maka sudah sampai mana tahap teman-teman HTI untuk memperjuangkannya?*” maka jawaban atas pertanyaan yang peneliti sampaikan adalah “*kita harus kembali lagi pada diri kita. Pertanyaan yang harus kembali ditanyakan kepada diri kita, sudah sejauh mana kita mengusahakan agar Khilafah ini bisa hadir ditengah-tengah kita.*” Atas jawaban tersebut, peneliti merasa sangat tidak puas. Namun pada diskusi selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa bagaimana pun, HTI dan sayap-sayapnya akan berusaha untuk mengenalkan *Khilafah* kepada masyarakat. Sejatinya, mereka pun tidak mengetahui kapan usaha yang mereka lakukan ini akan terasa hasilnya.

Bagi teman-teman HTI beserta gerakan sayapnya, mereka memahami pentingnya untuk mengembalikan *Khilafah* kepada masyarakat berlandaskan ucapan nabi (*hadits*) dan sejarah. *Hadits* yang dimaksud adalah:

تَكُونُ النَّبُوءَةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى  
مِنْهَاجِ النَّبِيِّ ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًا ،  
فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيًّا ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ  
اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النَّبِيِّ ، ثُمَّ سَكَتَ

“Periode kenabian akan berlangsung pada kalian dalam beberapa tahun, kemudian Allah mengangkatnya. Setelah itu datang periode khilafah aala minhaj nubuwwah (kekhilafahan sesuai manhaj kenabian), selama beberapa masa hingga Allah ta’ala mengangkatnya. Kemudian datang periode mulkan aadhdhan (penguasa-penguasa yang menggigit) selama beberapa masa. Selanjutnya datang periode mulkan jabriyyan (penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak) dalam beberapa masa hingga waktu yang ditentukan Allah ta’ala. Setelah itu akan terulang kembali periode khilafah ‘ala minhaj nubuwwah. Kemudian Nabi Muhammad saw diam.” (HR Ahmad; Shahih).

Kondisi di lapangan menyebutkan bahwa landasan mereka semangat untuk bergerak salah satunya karena *hadits* tersebut. Karena disampaikan secara jelas pada *hadits* tersebut bahwa “akan terulang kembali periode *Khilafah ‘ala minhajil nubuwwah*” yang artinya, *Khilafah* atas cara kenabian akan terjadi lagi. Hal inilah yang akhirnya menjadi cita-cita mereka, terlepas sudah seperti apa nanti kondisi masyarakat atau dunia saat itu. Karena jika kita melihat konteks pada *hadits* tersebut konteks yang dimaksud adalah konteks akhir zaman.

Selanjutnya adalah faktor sejarah dan kondisi keummatan saat ini. Sejarah mencatat bahwa kepemimpinan *Khulafaa’ arrasyidin* merupakan salah satu bentuk dari ke *Khalifahan* Islam yang akhirnya mampu untuk menerapkan Islam secara *kaffah*. Pemekaran daerah dapat terjadi seluas-luasnya. Pemerintahan berpusat di Kota Madinah al Munawwarah. Sampai pada akhirnya *Khilafah Islamiyyah* runtuh sejak tahun 1924 M saat Turki Utsmani runtuh oleh Musthafa Kemal Artaturk. Sejak saat itu lah, menurut teman-teman HTI ummat Islam kehilangan arah. Karena tidak memiliki induk yang bisa dijadikan sarana untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan Islam.<sup>44</sup>

Runtuhnya *Khilafah Islamiyyah* pada 1924 M merupakan salah satu kebenaran dari *hadits* yang disampaikan diatas. Maka, ummat Islam hari ini sampai kepada masa mereka dihipit dari berbagai arah dan penjuru. Fitnah akan terorisme adalah produk ummat Islam, sampai hari ini masih menjadi konsumsi publik. Bahkan kalimat *Khilafah Islamiyyah* sampai menjadi hal yang menakutkan bagi

---

<sup>44</sup> Hasil disuksi dengan Ketua Gema Pembebasan Kota Malang pada 3 Ramadhan 1439 H



ummat Islam itu sendiri adalah bagian dari dampak runtuhnya *Khilafah Islamiyyah* pada 1924 itu sendiri. Sampai pada akhirnya hari ini ummat Islam tidak mampu untuk memperlihatkan kedigdayaannya karena ummat Islam tidak memiliki koordinator dalam bergerak, khususnya pada bidang-bidang seperti; sosial, budaya, politik, ekonomi secara khusus. Kondisi seperti ini menunjukkan ummat muslim itu bagaikan buih di samudera.

Karenanya, HTI merasa mendirikan atau mengembalikan kembali *Khilafah Islamiyyah* adalah hal penting yang harus dilakukan ummat Islam di dunia saat ini. bagi mereka, bobroknya suatu bangsa karena maraknya kemiskinan, rusaknya moral anak bangsa, hadirnya korupsi di tengah-tengah masyarakat adalah dampak besar dari tidak diberlakukannya *syariat Islam* secara *kaffah*. Karena bagi mereka, *Khilafah Islamiyyah* ini tak akan pernah tegak selama *syariat Islam* tidak menjadi payung hukum masyarakatnya itu sendiri. Hal ini di amini oleh salah satu pakar gerakan Islam di Kota Malang, yang menyebutkan bahwa HTI merupakan “*Syariah Fighter*”. Mereka akan berusaha mengembalikan pemikiran *Khilafah* tapi harus dimulai dengan menerapkan hukum Islam. Karena dengan mengusahakan agar hukum-hukum Islam dapat dipahami oleh masyarakat itu akan berbanding lurus dengan pemahaman masyarakat akan *Khilafah Islamiyyah* yang mereka perjuangkan. Bagi teman-teman HTI, terus mencerdaskan masyarakat dan mendekatkan masyarakat akan pemahaman Islam yang *kaffah* adalah usaha yang akan memakan waktu lama, namun amalannya akan kekal.

### 5.3.(d) Harus Berani Mendekatkan Diri Kepada Masyarakat

Tahap ini merupakan proses untuk melakukan transformasi nilai-nilai kebaikan yang diyakini pribadi kepada masyarakat. Setelah melalui tahap memperbaiki diri sendiri, menambah kualitas diri yang ada agar nantinya ketika terjun kemasyarakat individu-individu tersebut memiliki nilai lebih dihadapan masyarakat. Sehingga ketika individu-individu tersebut sudah memiliki nilai lebih dihadapan masyarakat, individu tersebut akan lebih mudah untuk terjun kepada masyarakat karena dipercaya oleh masyarakat yang menjadi objek dakwah yang dimaksud.

Dalam konsep Al Banna, individu-individu yang sedang melakukan proses memperbaiki diri, secara khusus mereka akan diterjunkan dilembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dilingkungannya untuk memberikan pengaruh yang baik. Aplikasi dari tahap ini bisa saja disebut sebagai infiltrasi gerakan. Individu-individu yang sudah terbentuk dan memiliki jabatan struktural atau memiliki pengaruh baik dilingkungan manapaun harapanya dapat menjadi individu yang mampu mengarahkan masyarakatnya kepada arah kebaikan atau bahkan hingga mampu untuk menjalankan konsep *Amar Ma'ruf Nahyi Munkar*.

Aplikasi dari konsep ini pun dilakukan oleh HTI maupun kawan-kawan Gema Pembebasan. Gema Pembebasan secara khusus menyampaikan tentang aqidah serta syari'ah hingga konsekuensi atas keduanya. Mereka dalam hal ini menghindari untuk lebih jauh menyampaikan bahwa solusi dari segalanya itu adalah khilafah. Karena menghindari resistensi dari berbagai pihak terhadap kata *Khilafah* itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Habib:

“... Jadi ketika mereka yang beramanah di HMJ atau BEM yang mereka serukan tentang aqidahnya. Minimal ngajak sholat dsb lah yaa. Dan nanti bertahap. Gak bisa langsung pokoknya khilafah. Itu malah bahaya. Termasuk kalau ada kader yang baru trus dikit-dikit khilafah itu kita tegur juga. Gak bisa kayak gitu, gak boleh. Karena yang namanya oorang mendengar kata yang sudah terbungkam selama 94 tahun yaa pasti akan merasa asing tiba-tiba diskusi trus langsung pokoknya khilafah, yaa berbahaya. Malah jadi bomerang buat kita...”<sup>45</sup>

Begitupun dengan HTI itu sendiri. Menurut Erni Sari Dwi,<sup>46</sup> HTI juga melakukan infiltrsi gerakan dengan masuk kedalam organisasi-organisasi besar seperti Muhammadiyah, Nadhatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sejak awal masuknya HTI ke Indonesia tahun 1980an, kader-kader HTI sudah melakukan gerakan ini sedari awal. Berdirinya Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) pun bagian dari usaha HTI untuk melakukan sosialisasi pemikirannya di Indonesia.<sup>47</sup> Setelah itu lebih spesifik dalam bergerak cara HTI melakukan sosialisasi pemikirannya juga dengan *door to door* melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan dan perumahan.<sup>48</sup> Langkah mereka melakukan infiltrasi pun tak lepas melalui NU seperti yang disampaikan diatas. Alm. KH, Hasyim Muzadi, mantan Ketua Umum PBNU juga mengatakan bahwa masjid-masjid yang selama ini dibangun dan dibina oleh warga NU beserta takmir dan ritual peribatannya juga telah diambil oleh HTI<sup>49</sup>. Ini menunjukkan

<sup>45</sup> Hasil Wawancara Peneliti kepada Ketua Gema Pembebasan pada 3 Maret 2018

<sup>46</sup> Erni Sari Dwi Devi Lubis dan Ma'ruf Jamu'in (2015), Jurnal: **“Infiltrasi Pemikiran Gerakan HTI di Indonesia”**, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*,

<sup>49</sup> *Ibid.* Hlm. 9

bahwa infiltrasi pemikiran dan gerakan yang dilakukan oleh HTI dilakukan secara sistematis dan terkonsep serta serius untuk melakukan ini.

Infiltrasi yang dilakukan oleh kader-kader Gema Pembebasan maupun HTI secara umum melalui masuknya mereka kedalam lembaga-lembaga kampus ataupun lembaga-lembaga yang ada didalam struktur negara untuk melakukan dakwah merupakan salah satu penerapan dari konsep membimbing masyarakat yang digagas oleh Al Banna yang diterapkan juga oleh HTI. Kita tidak dapat memungkiri bahwasannya aplikasi dari bentuk tahap ini pun banyak digunakan oleh berbagai kalangan untuk melakukan sosialisasi kepentingan yang mereka punya.

#### 5.3.(e) Merasa Penting untuk Melakukan Sosialisasi Kembali tentang Pemikiran

##### *Khilafah kepada Masyarakat*

Puncak dari pemahaman yang mereka alami tentang *Khilafah* adalah mereka mau melakukan dakwah kepada orang lain setelah mereka menerima dakwah itu sendiri. Melakukan sosialisasi pemikiran *Khilafah* kepada orang lain selain mereka adalah bentuk dari dakwah yang dimaksud. Hal ini didasari atas dasar perasaan yang sama. Karena jalan dakwah yang mereka pilih merupakan jalan dakwah yang *anti-mainstram*. Memunculkan ide *Khilafah Islamiyyah* dan *Syariat Islam* secara terang-terangan merupakan bentuk dari dakwah yang sedang tidak biasa yang terjadi di Indonesia.

Medio 2012-2017 bentuk dakwah HTI dapat dikatakan begitu radikal. Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh salah satu pakar gerakan Islam di Kota Malang menyebutkan bahwa “gerakan mereka itu sangat militan dan radikal dalam

pemikirannya”<sup>50</sup> hal ini sedikit berdampak dengan cara mereka melakukan sosialisasi. Ada sedikit kalimat paksaan yang diterima oleh objek dakwah mereka itu sendiri. Kata-kata “*demokrasi bukan produk Islam*”, atau “*diragukan ke-Islam-an nya jika tidak mau memperjuangkan Khilafah*” adalah hal yang biasa diterima oleh objek dakwah mereka.<sup>51</sup>

Di Malang misalnya, sebelum hadirnya PERPPU No 2 Tahun 2017 dan secara resmi dibubarkannya HTI oleh pemerintah, HTI dan sayap-sayap gerakannya sangat gencar melakukan sosialisasi pemikirannya dengan berbagai cara. Mulai diskusi nasional yang melibatkan banyak peserta sampai kegiatan yang melibatkan hanya 1-2 orang seperti melakukan *dakwah fardhiyyah*. Pada saat itu mereka amat sangat gencar melakukannya dan sedikit sering memaksa secara pemikiran. Sehingga muncul stigma dikalangan bahwa kader-kader HTI ini amat sangat mudah untuk meng*kafir-kafir*kan orang.

Namun ini merupakan bentuk aplikasi dari pemahaman mereka. Seperti yang sudah disampaikan diatas, puncak dari pemahaman mereka adalah mau untuk melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat luas. Pada prosesnya, setelah berbagai tudingan muncul, belakangan bagi mereka kader baru yang mau untuk melakukan sosialisasi harus melaporkan progresnya kepada mentor-mentor mereka dan nantinya akan dievaluasi sedalam mungkin.

---

<sup>50</sup> Wawancara Peneliti dengan salah satu pakar gerakan Islam di Kota Malang (07/06/2018)

<sup>51</sup> Melansir salah satu cerita dari mantan objek dakwah HTI.



Sejak munculnya PERPPU Ormas No 2 Tahun 2017 dan dibubarkannya HTI secara sepihak oleh pemerintah, HTI sudah tidak melakukan sosialisasi secara seporadis lagi. Segala bentuk sosialisasi yang mereka lakukan – seperti yang sudah disampaikan pada sub-bab sebelumnya – akhirnya hanya ada 2 jalan yang mereka lakukan. Yakni; 1. *Dakwah Fardhiyyah*; dan 2. Media Sosial. 2 (dua) bentuk ini mereka lakukan di kampus dan di masyarakat guna menambah jumlah kader dan jumlah orang yang simpati dengan gerakan mereka, meskipun akan lebih sedikit kuantitas yang akan mereka dapatkan. Akan tetapi, mereka meyakini bahwa orang-orang yang berhasil mereka rekrut atau mereka fahami cara dakwah mereka adalah orang-orang terbaik dan mau untuk berjuang dalam kondisi sulit sekalipun. Pun dengan melakukan silaturahmi kepada tokoh-tokoh agama serta tokoh-tokoh publik. Mereka akan melakukannya secara *smooth* (lambut) agar dapat lebih menarik hati objek dakwah mereka.

Di kampus misalnya, penulis menemukan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi proses-proses *dakwah fardhiyyah* secara terang-terangan terjadi. Sebelum HTI dibubarkan secara paksa oleh pemerintah, secara khusus di kampus Brawijaya, hal ini adalah hal yang biasa dan tidak aneh. Tiap Jum'at misalnya, ketika setiap laki-laki sedang shalat Jum'at, untuk kader perempuannya banyak yang bertebaran di sekitaran Widyaloka dan lapangan rektorat. Meskipun ada dari gerakan Tarbiyyah juga yang melakukannya. Namun, sejak HTI dibubarkan oleh pemerintah, teman-teman HTI sudah tidak tersisa lagi untuk melakukan sosialisasi pemikirannya ketika waktu shalat Jum'at.

Satu hal yang pasti, mereka akan semakin kuat secara internal dan mereka akan terus melakukan sosialisasi pemikiran ini melalui keluarga mereka, atau mereka membangun keluarga antara mereka sendiri sehingga keluarga akan menjadi variabel yang tidak bisa dipisahkan dalam melakukan sosialisasi pemikiran mereka.

#### 5.4 Pandangan Kritis Peneliti

Dinamika yang terjadi dilapangan menyebutkan bahwa cara sosialisasi yang dilakukan oleh HTI menimbulkan banyak pandangan yang dirasa perlu untuk diutarakan oleh peneliti sebagai bagian dari proses dinamika yang terjadi. *Pertama*, proses dakwah yang dilakukan oleh HTI dirasa oleh mayoritas kalangan merupakan proses dakwah yang terkesan eksklusif. Hal ini didasari dari cara mereka dalam cara-cara mereka. Seperti halnya ketika sedang melakukan *dakwah fardhiyyah* mereka cenderung enggan untuk orang lain terlibat dalam proses mereka ini. Contoh lainnya adalah ketika pembinaan pekanan dan pada kelompok binaannya ketahuan ada kader dari gerakan lain, maka kader dari gerakan lain itu langsung ditinggalkan begitu saja. Hal ini didasari karena, pandangan mereka yang sudah final terhadap pentingnya *Khilafah*.

*Kedua*, gagalnya membungkus dengan baik ide yang sangat *anti-mainstream*. Ide *Khilafah Islamiyyah* yang dibawa oleh HTI kepada masyarakat Indonesia sudah diakui sejak awal oleh mereka bahwa ide ini merupakan ide yang sangat *anti-mainstream*. Namun, mereka menemukan masalah dalam mentransformasikan ide ini kepada masyarakat yang terlambat agar diterima.

Puncaknya adalah ketika badan hukum yang dimiliki HTI akhirnya dicabut oleh pemerintah.

Gagalnya mereka membungkus gagasan ini dapat dilihat ketika mereka mengkampanyekan *Khilafah* itu sendiri. Mengingat Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi, mereka sering mengatakan “Demokrasi Haram”, “Kafir kalau kita ikut demokrasi karena demokrasi sistem buatan kafir” dan sejenisnya akhirnya membuat masyarakat sangat *shock* dengan apa yang mereka perjuangkan. Sehingga bukannya menimbulkan simpati atau bahkan empati agar mendukung gerakan mereka, yang terjadi malah sebaliknya, masyarakat jadi takut bahkan menolak terhadap gerakan mereka.

Situasi saat ini sebenarnya dapat dikatakan agak semakin memberatkan HTI untuk terus melakukan sosialisasi pemikirannya. Sejak dinon-aktifkannya badan hukum HTI, isu yang berkembang adalah bahwa orang-orang yang ingin mendirikan *Khilafah* adalah orang-orang radikal yang ingin memecah belah bangsa. Hal ini menjadi stigma yang berkembang oleh masyarakat. Seperti yang pernah peneliti alami ketika peneliti melakukan silaturahmi kepada pimpinan RT di lingkungan peneliti, paham *Khilafah* ini nampaknya menjadi momok besar yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Karenanya, nampaknya perlu bagi teman-teman HTI untuk terus melakukan sosialisasi pemikiran ini dengan cara yang lebih *soft*. Masyarakat hari ini sudah mengenal tentang *Khilafah*, usaha yang perlu dilakukan HTI adalah agar masyarakat dapat memahami secara benar apa yang dimaksud dengan *Khilafah* dengan cara yang mudah untuk diterima oleh masyarakat. Karena, peneliti merasakan untuk mencari informasi yang benar tentang *Khilafah* di

Indonesia terasa sulit. Karena literatur yang beredar banyak info yang salah dan juga literatur yang menjelaskan *Khilafah* secara benar tidak berbahasa Indonesia, hingga sukar dipahami oleh masyarakat di Indonesia.







## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Salah satu pakar Gerakan Islam di Kota Malang menyebutkan bahwa HTI merupakan organisasi masyarakat yang memperjuangkan *Khilafah*, menolak demokrasi, sebuah gerakan *syariah fighter*, juga organisasi yang militan dan radikal secara pemikiran<sup>1</sup>. Beberapa ciri yang disebutkan tadi merupakan pandangan masyarakat banyak terhadap HTI.

Sama seperti gerakan Islam atau gerakan sosial manapun, HTI juga memiliki kepentingan untuk melakukan sosialisasi pemikirannya kepada masyarakat. Hal ini didasari dari kebutuhan dasar sebuah organisasi atas kebutuhan kader untuk melegitimasi usaha yang mereka lakukan agar terlihat besar dan orang percaya akan gerakan tersebut adalah gerakan yang sah dalam sudut pandang agama dan negara. Maka dari itu, HTI dan gerakan-gerakan sayapnya berusaha untuk melakukan proses sosialisasi pemikiran dan melakukan kaderisasi agar roda organisasi dapat terus berjalan dengan sehat.

Proses sosialisasi pemikiran *Khilafah* yang dilakukan oleh HTI merupakan salah satu bentuk dakwah yang dilakukan oleh mereka. Karena sosialisasi merupakan tahap awal yang harus dilakukan agar masyarakat dapat mengenal apa yang diperjuangkan oleh HTI. Setelah masyarakat mengenal apa yang diperjuangkan oleh HTI, maka masyarakat mempunyai pilihan untuk bergabung atau

---

<sup>1</sup> Wawancara Peneliti dengan salah satu pakar gerakan Islam di Kota Malang (07/06/2018)

bahkan menolak. Maka proses sosialisasi ini adalah bagian yang menentukan agar masyarakat dapat memandang apa yang sedang diusahakan oleh HTI merupakan suatu hal yang benar.

Di Kota Malang, sosialisasi yang dilakukan oleh HTI belakangan lebih banyak dilakukan oleh gerakan mahasiswanya, dalam hal ini adalah Gema Pembebasan. Hal ini terjadi karena sejak dibekukannya badan hukum yang dimiliki oleh HTI, sehingga secara organisasi kemasyarakatan HTI dapat dikatakan sedang tidak aktif. Bahkan diketahui bahwasannya kantor DPD HTI Kota Malang resmi ditutup. Namun hal ini tidak berlaku bagi gerakan sayap HTI yang berada pada tataran mahasiswa. Gerakan Mahasiswa Pembebasan atau GP Malang yang merupakan sayap gerakan mahasiswa dari HTI terus melakukan dakwahnya dan terus melakukan sosialisasi pemikiran *Khilafah* yang memang menjadi landasan bergerak mereka. Sehingga, proses ini tidak dapat dikatakan berhenti. Proses sosialisasi ini terus berjalan namun dengan cara yang berbeda meskipun hanya tercakup pada segmentasi mahasiswa saja.

Proses sosialisasi yang dilakukan oleh HTI memiliki beberapa bentuk. Diantaranya; *dakwah fardhiyyah*, pembinaan pekanan, diskusi terbuka, buletin pekanan hingga unjuk massa. Hal-hal ini dilakukan agar semakin banyak masyarakat yang mengenal pemikiran dan apa yang diperjuangkan oleh HTI. Dampak dari proses sosialisasi yang dilakukan oleh HTI antara lain:

1. HTI atau GP Malang pasti memiliki kader-kader baru. Hal ini dapat dirasakan ketika proses *dakwah fardhiyyah* yang dilakukan oleh kader-

kader HTI benar-benar efektif dan dilakukan secara sungguh-sungguh. Keterikatan hati atau sosial antara kader yang melakukan sosialisasi dan calon kader yang menjadi objek sosialisasi menjadi titik penting atas keberhasilan proses ini.

2. *Ukhuwwah Islamiyyah* antar kader sangat kuat. Dampak ini terjadi ketika kader-kader hasil dari proses *dakwah fardhiyyah* berhasil menuju tahap sosialisasi selanjutnya yakni mengikuti pembinaan pekanan. Pembinaan pekanan ini secara khusus dilakukan agar antar kader ini memiliki hubungan yang kuat sehingga dapat saling memahami antara satu dengan yang lainnya secara mendalam. Jika sudah dapat saling memahami secara mendalam maka akan timbul rasa persaudaraan sehingga hal ini menjadikan mereka sebagai barisan yang kuat. Karena *Ukhuwwah Islamiyyah* itu sendiri.
3. Tiap-tiap dari kader memiliki pemahaman yang tajam dan menyeluruh terhadap apa yang mereka perjuangkan. Dampak ini muncul dengan proses yang mereka lakukan dengan melaksanakan kajian atau diskusi-diskusi pekanan yang mereka lakukan. Diskusi yang memang terbuka secara umum namun kader-kader mereka tetap memiliki kewajiban untuk hadir menjadi bagian yang penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekaligus menguatkan *fikrah* yang dimiliki oleh dari masing-masing kader.
4. Munculnya penolakan dari beberapa kalangan. Dampak ini muncul atas segala proses yang mereka lakukan. Secara umum penolakan ini muncul secara terbuka sejak dibubarkannya status badan hukum yang dimiliki oleh

HTI. Beberapa kasus dan agenda yang dilakukan oleh HTI dibubarkan secara paksa dengan alasan bahwa pemikiran dan sosialisasi pemikiran yang dilakukan oleh HTI sangat membahayakan NKRI. Sehingga kasus-kasus penolakan ini marak terjadi pada semester pertama tahun 2017 lalu.

Strategi dan dampak ini setelah diteliti memberikan hasil yang akan terasa keapda mayoritas kadernya. Diantaranya:

1. Karakter Kader Sebagai Penopang Utama Pemikiran Khilafah;
2. Merasa Penting untuk Memperbaiki Pemerintahan;
3. Merasa Penting untuk Mengembalikan Khilafah;
4. Harus Berani Mendekatkan Diri Kepada Masyarakat;
5. Merasa Penting untuk Melakukan Sosialisasi Kembali tentang Pemikiran Khilafah kepada Masyarakat.

Lima poin diatas, jika dianalisa berdasarkan sosialisasi pemikiran yang dicanangkan oleh Hasan Al Banna dapat kita temukan bahwa dari ke-lima poin diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan. Meskipun memang, dari 7 poin yang dicanangkan oleh Al Banna, baru hanya 4 poin yang sudah diaplikasikan oleh HTI beserta sayap gerakannya dalam melakukan sosialisasi pemikiran. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

No	Teori Al Banna	Aplikasi Lapangan oleh HTI
----	----------------	----------------------------

1	<i>Ishlahul Fardhi wa I'daad ar Rijal</i> (Perbaikan kepribadian dan penyiapan SDM)	Karakter Kader Sebagai Penopang Utama Pemikiran <i>Khilafah</i> . Dan; Merasa Penting untuk Melakukan Sosialisasi Kembali tentang Pemikiran <i>Khilafah</i> kepada Masyarakat
2	<i>Binaa 'ul Ussrah Muslimah</i> (Pembinaan dalam keluarga Muslim).	
3	<i>Irsyaadul Mujtama'</i> (Membimbing Masyarakat)	Harus Berani Mendekatkan Diri Kepada Masyarakat
4	<i>Tahriirul Wathan</i> (Membebaskan Negeri).	
5	<i>'Ishlahul Hukumah</i> (memperbaiki pemerintahan)	Merasa Penting untuk Memperbaiki Pemerintahan
6	<i>I'adatul Qiyanid Daulih Lil Ummati Islamiyyah</i> (mengembalikan peran ummat Islam dalam percaturan Internasional)	Merasa Penting untuk Mengembalikan <i>Khilafah</i> . (baru hanya tahap pemikiran)
7	<i>I'laanu ustadziyatul 'alam</i> (mendeklarasikan Islam sebagai soku guru peradaban alam semesta)	

**Tabel 6.1:<sup>2</sup>**  
**Aplikasi Sosialisasi Pemikiran *Khilafah* oleh HTI di Kota Malang menurut Teori Sosialisasi Pemikiran Politik Islam Hasan Al Banna**

Tabel ini dapat menunjukkan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan HTI dapat dikatakan sama dengan teori yang sudah dicanangkan Al Baanna. Namun diantara keduanya memiliki perbedaan secara pemikiran. Proses input yang sama,

<sup>2</sup> Disusun oleh peneliti



akan tetapi outputnya yang membedakan. Input yang dimaksud adalah cara dakwah yang dilakukannya sama, akan tetapi secara pemikiran ada perbedaan. Maka, outputnya akan sangat berbeda. Hal ini berdampak kepada penerimaan objek dakwah itu sendiri.

Namun, proses sosialisasi pemikiran ini jalannya tidak selalu mudah. Munculnya berbagai penolakan terhadap gerak-geraknya HTI nampaknya ini merupakan bagian penting yang perlu diperbaiki dalam melakukan sosialisasi pemikiran mereka. Sosialisasi yang dilakukan oleh HTI belakangan kadang terasa kasar, sehingga wajar ketika timbul penolakan dari masyarakat. Masyarakat yang menolak nampaknya tidak siap dengan pola yang dilakukan oleh HTI, meskipun secara pola yang sudah dibahas pada sebelumnya merupakan pola yang efektif. Namun yang harus diperhatikan adalah hal teknis yang mereka lakukan daripada pola-pola yang sudah mereka lakukan. Kata-kata “kafir” jika masih menjadikan demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan, dan sejenisnya harus benar-benar dikurangi atau bahkan tidak boleh lagi untuk kedepannya.

## **6.2 Rekomendasi**

Untuk peneliti selanjutnya, ada berbagai ruang yang dapat diteliti lebih dalam pada tema strategi sosialisasi pemikiran khilafah dengan meneliti apa yang mereka lakukan pasca dibubarkan oleh pemerintah. Hal ini didasari bahwa penulis sudah menguraikan proses sosialisasi pemikiran yang dilakukan oleh HTI. Sehingga topik-topik lain tentang HTI masih dapat ditelaah lebih dalam dan dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan perbandingan.

## Daftar Pustaka

### BUKU:

- Abdullah. (2008). *Mengenal Hizbut Tahrir*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.
- Afian. (1981). *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- An-Nabhani, T. (1953). *Nizham Al-Islam*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.
- Burce A Chadwick, Howard M Bahr, Stan L Albrech. (1991). *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Elvandi, M. (2011). *Inilah Politikku*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Salmeha Humanika.
- Hussain. (2012). *Menuju Jama'atul Muslimin*. Jakarta: Rabbani Press.
- Ishaq, M. M. (2012). *Fiqh Politik Hasan Al-Banna*. Jakarta: Robbani Press.
- Kantraprawira, R. (1988). *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Biru.
- Khan, Q. (2002). *Negara al-Mawardi*. Bandung: Pustaka.
- Kholaf, A. W. (1988). *As Siyasa Asy Asyar'iyah*. Safaa, Kuwait: Daarul Qolaam.
- Lexy, J. M. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Masyhur, M. (2009). *Fiqh Dakwah*. Jakarta: Al Itishom.
- Nurfitriani. (2016). *Dakwah HTI Berbasis Multimedia (analisis Framing dakwah HTI dalam buletin Al Islam dan Majalah Al Wa'ie Online)*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Ramadhan, A. A.-M. (2015). *Manhaj Ishlah*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Sarijun, M. (2011). *Manajemen Halaqah Efektif*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Sastroadmodjo, S. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tahrir, T. H. (2007). *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*. Bogor: Thariqul Izzah.
- Wahyuningsih, E. (2013). Konstruksi Pendidikan Politik pada Sekolah Menengan Atas di Kota Pangkalpinang. *Repository UPI*, 40. Diambil kembali dari repository.upi.edu.

**JURNAL:**

Ghulam Nabi Ganai (2001). *“Muslim Thinkers and Their Concept of Khilafah dalam Hamdard Islamicius: Quartely Journal of Studies and Reseach in Islam*, Vol. XXIV, No 1 Hal. 59

Lubis, E.S.D.D dan Ma’arif Jamuin (2015), *Jurnal. Infiltrasi Pemikiran dan Gerakan HTI di Indonesia*. SUHUF Vol.27 No. 2. journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/download/1431/983, di akses pada 14 Mei 2017 pukul 10.00 WIB

Sudrajat, Ajat (2009), *Jurnal: “Khilafah Islamiyah Dalam Perspektif Sejarah”*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta

Sudarno Shobron (2014), *Jurnal: “Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia”*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

**SKRIPSI**

Dedy Slamet Riyadi (2008), Skripsi: *“Analisis Terhadap Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir”*, Semarang, IAIN Walisongo, library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=19234 diakses pada 10 Mei 2017 pukul 13.05 WIB

Nurfitriani. (2016). *Dakwah HTI Berbasis Multimedia (analisis Framing dakwah HTI dalam buletin Al Islam dan Majalah Al Wa'ie Online)*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.

**TESIS**

Kurniawan Abdullah (2003). Tesis, *Gerakan Politik Islam Ekstra Parlementer: Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia*. UI.

**WEBSITE**

Efriza. (2012). *Sosialisasi Politik*. Diambil kembali dari Digilib Unila: <http://digilib.unila.ac.id/3314/17/BAB%20II.pdf>

Radar Cakrawala. *“Aksi Bela Palestina Gema Pembebasan Malang”*. <http://www.radarcakrawala.com/2017/12/aksi-bela-palestina-gema.html> di akses pada 10 Januari 2018

- Ambaranie Nadia Kemala Movanita. “*HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah*”.  
<http://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah> di akses pada 1 Januari 2018 pukul 21.00 WIB
- Umarwan Sutopo, Lc. “*Fiqh Siyasah dan Ahlu al Halli wa al Aqdi*”.  
<https://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2015/09/10/77819/fiqh-siyasah-dan-penerapan-ahlu-al-halli-wal-aqdi.html> di akses pada Rabu 28 Maret 2018
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Hizbut\\_Tahrir](https://id.wikipedia.org/wiki/Hizbut_Tahrir) di akses pada 15 Januari 2018 pukul 17.05 WIB
- <http://www.gemapembebasan.or.id/statis-1-sejarah.html> di akses pada 19 Februari 2018 pukul 14.00 WIB
- <http://www.gemapembebasan.or.id/statis-9-kegiatan-umum.html> di akses pada 19 Februari 2018 pukul 14.00 WIB
- <http://www.gemapembebasan.or.id/statis-5-visi-misi.html> di akses pada 19 Februari 2018 pukul 14.00 WIB
- <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/> di akses pada 19 Februari 2018 pukul 15.41 WIB
- <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/> di akses pada 19 Februari 2018 pukul 14.00 WIB
- GalamediaLabs. “*Daftar Perguruan Tinggi Di Kota Malang*”  
<http://ngalam.id/read/66/ Perguruan-tinggi/> di akses pada 19 Februari 2018 pukul 14.00 WIB
- Admin. “*Dakwah Fardhiyyah*”  
<http://www.ikadi.or.id/artikel/fiqh-dakwah/122-dakwah-fardiyah.html> diakses pada Jum’at 16 Maret 2018 pukul 13.00 WIB
- Admin. “*Makna dan Kendala-Kendala Ukhuwwah Islamiyyah*”.  
<http://www.ikadi.or.id/component/content/article/41-tafakkur/108-makna-dan-kendala-kendala-ukhuwah-islamiyyah.html> di akses pada Rabu 21 Maret 2018 pukul 16.13
- Isnet/1368. “*Tahapan dan Proses Ukhuwwah Islamiyyah*”  
<http://www.unhas.ac.id/rhiza/arsip/tarbiyah3/tarbiyah/tar-0034.htm> di akses pada Rabu 21 Maret 2018 Pukul 16.30
- [http://liputanislam.com/wp-content/uploads/2014/09/al-islam\\_1.jpg](http://liputanislam.com/wp-content/uploads/2014/09/al-islam_1.jpg) diakses pada 1 April 2018 pukul 22.28 WIB
- Gumiyanti Awaliyah. “*HTI: Buletin Al Islam Edisi 852 dipastikan Palsu*”  
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/04/15/oogg0q384-hti-buletin-al-islam-edisi-852-dipastikan-palsu> diakses pada 01 April 2018 pukul 21.00 WIB



- Gumiyanti Awaliyah. *"HTI Sebut Semua Konten Buletin Al Islam Edisi 852 Dipalsukan"*  
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/04/16/oohsmi382-hti-sebut-semua-konten-buletin-al-islam-edisi-852-dipalsukan> diakses pada 01 April 2018 pukul 21.00 WIB
- Syamsul Arifin. *"Buletin Kaffah Diduga Milik HTI Masih Menyebar di Jombang"*  
<http://www.nu.or.id/post/read/86255/buletin-kaffah-diduga-milik-hti-masih-menyebar-di-jombang> di akses pada 1 April 2018 Pukul 22.00 WIB
- Mawa Kresna. *"HTI Memakai Kampus dan GBK untuk Mempromogandakan Khilafah"*  
<https://tirto.id/hti-memakai-kampus-dan-gbk-untuk-mempromogandakan-khilafah-coxM> diakses pada 1 April 2018 Pukul 16.00 WIB
- Ahmad Khadafi. *"Hizbut Tahrir Indonesia vs "Pancasila" dan "NKRI"*.  
<https://tirto.id/hizbut-tahrir-indonesia-vs-pancasila-dan-nkri-cn5x> diakses pada Ahad, 8 April 2018 pukul 13.00 WIB
- Isyana Artharini. *"Lebih dari 90% Orang Indonesia Dukung Penolakan HTI dan ISIS"*.  
<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40153060> diakses pada Ahad 8 April 2018 Pukul 13.00 WIB
- Rio Apinino. *"Penolakan GP Anshor Terhadap Felix Siaw terburu-buru"*  
<https://tirto.id/penolakan-gp-ansor-terhadap-felix-siauw-terburu-buru-czDF> diakses pada Ahad 8 April 2018 pukul 13.00 WIB
- Chrystianingsih. *"Ini Alasan GP Anshor Malang Menolak Talk Show Ustadz Felix Siaw"*  
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/05/01/op9nye361-ini-alasan-gp-ansor-malang-menolak-talk-show-ustaz-felix-siauw> diakses pada Ahad 8 April 2018 Pukul 13.00 WIB